

HADIAH

**HUBUNGAN
INDONESIA-AMERIKA SERIKAT
DALAM MENYIKAPI
MASALAH TERORISME
PASCA 9/11**



Awani Irewati
CPF. Luhulima
Indriana Kartini
Riza Sihbudi
Rosita Dewi



Pusat Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2005

KATALOG DALAM TERBITAN

Hubungan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Menyikapi Masalah
Terorisme Pasca 9/11 / Awani Irewati (et al). - Jakarta: Pusat
Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005
vi + 150 hlm.

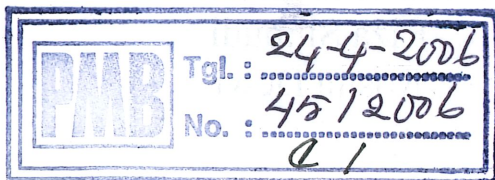
ISBN 979-3673-95-8

1. International cooperation-terrorism

I. Irewati, Awani

Klas : 327.17

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id



Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorise Pasca 9/11

Copyright© 2005 Pusat Penelitian Politik-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax.: (021) 5207118

KATA PENGANTAR

Penelitian *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11* merupakan salah satu dari sembilan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam DIPA Tahun Anggaran 2005.

Penelitian ini dilaksanakan dengan personalia sebagai berikut:

1. Dra. Awani Irewati, MA (Koordinator)
2. CPF. Luhulima (Anggota)
3. Drs. Riza Sihbudi, APU (Anggota)
4. Indriana Kartini, S.Ip (Anggota)
5. Rosita Dewi, S.Ip (Anggota)

Sebelum menjadi naskah akhir, laporan penelitian ini telah dibahas dalam Seminar Akhir Hasil Penelitian P2P LIPI di Wisma Jasasena TNI AL Cipayung, Bogor yang mengundang Pembahas dari luar P2P, baik dari LIPI maupun non LIPI.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan dengan penyusunan laporan penelitian ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para peneliti dan staf administrasi P2P LIPI, serta para peneliti dari luar P2P LIPI yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan atau kekeliruan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai adanya saran maupun kritik demi penyempurnaan laporan-laporan penelitian kami di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2005
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Dr. Ikrar Nusa Bhakti
NIP. 320004778

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pendahuluan	1
<i>Awani Irewati</i>	
Rumusan Masalah	2
Asumsi	2
Metodologi	3
Kerangka Pemikiran	4
Pembabakan Penulisan	8
Bab 2 Isu Terrorisme dalam Politik Luar Negeri	21
Amerika Serikat	
<i>CPF. Luhulima</i>	
Pemerintahan Bush dan Hegemoni Amerika	22
Arah Politik Luar Negeri AS di masa	28
Kepresidenan Bush II	
Politik Luar Negeri AS dan Reaksi Asia Tenggara	34
Penutup	38
Bab 3 Respon Masyarakat Indonesia terhadap Doktrin	41
“Anti Terorisme” AS	
<i>Riza Sihbudi</i>	
Respon Masyarakat tentang Jamaah Islamiyah	42
Problem Definisi	46
Fundamentalis = Teroris ?	51
Kampanye Disinformasi	54

	Konspirasi Anti Islam	57
	Penutup	66
Bab 4	Respon Indonesia atas Sikap “Perang terhadap Terorisme” Amerika Serikat	69
	<i>Awani Irewati</i>	
	Landasan Hukum bagi Kebijakan Anti-Terrorisme	70
	Kebijakan Indonesia di Tingkat Regional	75
	Kebijakan Indonesia dimasa Megawati Soekarnoputri.....	79
	a. Reaksi Pemerintah sesudah 9/11	81
	b. Reaksi Pemerintah sesudah Bom Bali 2002	84
	Kebijakan Indonesia di masa Susilo Bambang Yudhoyono	89
	Penutup	93
Bab 5	Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-AS Pasca 9/11	95
	<i>Indriana Kartini & Rosita Dewi</i>	
	Indonesia dan Perang Melawan Teror	97
	Bantuan AS dalam Perang Melawan Terorisme	101
	a. Penguatan Aparat Keamanan	102
	b. Upaya Pemulihan Hubungan Militer Indonesia-AS	104
	Dukungan AS terhadap Demokratisasi Indonesia ...	116
	a. Reformasi Hukum	122
	b. Bantuan Pendidikan	126
	c. Bantuan Kemanusiaan	131
	Peran USINDO pasca 9/11	133
	Penutup	134

Bab 6	Kesimpulan dan Rekomendasi	137
	<i>Tim Peneliti</i>	
	Rekomendasi	139
Daftar Pustaka		141

Bab I

PENDAHULUAN

Awani Irewati

Peristiwa 11 September 2001 (yang selanjutnya disingkat 9/11) di Amerika Serikat telah merubah peta hubungan internasional khususnya hubungan politik dan keamanan antara Amerika Serikat dan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Di bawah kepemimpinan George W. Bush, Amerika menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat kontroversial terutama di dalam memperjuangkan ambisi politik dengan menekan kekuatan-kekuatan terorisme yang menurut perspektif Amerika Serikat (AS) banyak tumbuh dan berkembang di “negara-negara Islam”. Pada malam 11 September 2001, Presiden Bush mendeklarasikan, “*America and our friends allies*” would together win the “war” against terrorism”.¹ Pernyataan ini disusul dengan serangkaian usaha diplomasi gencar guna membentuk koalisi global melawan terorisme.

Mengingat hubungan Indonesia - Amerika Serikat begitu penting, maka sedikit permasalahan yang terjadi dapat membawa implikasi serius bagi keduanya, terutama Indonesia. Indonesia menaruh perhatian besar atas kepentingan AS di Indonesia. Karena AS menjadi pusat orientasi kepentingan politik, ekonomi dan keamanan bagi dunia. Satu pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana membangun hubungan Indonesia-Amerika Serikat sesudah tragedi 9/11. Sesudah tragedi 9/11 menjadi titik awal AS melakukan “pembalasan” atas serangan teroris, yang selanjutnya dipersempit ke arah Islam radikal yang diyakini Amerika sebagai lingkaran utama terorisme global. Tak pelak Indonesia juga terkena imbas atas keyakinan AS yang demikian. Serangkaian

¹ *East Asian Strategic Review 2002*, The National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2002, hlm. 21.

peristiwa bom yang terjadi di Indonesia menambah kuat keyakinan AS itu bahwa Indonesia masuk dalam lingkaran terorisme global yang harus diwaspadai. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini terpecah dalam beberapa pertanyaan di bawah ini.

Perumusan Masalah

1. Seberapa jauh tragedi 9/11 menjadi titik balik (*turning point*) sikap unileteral Amerika Serikat yang begitu menonjol dalam kiprah politik luar negerinya?
2. Bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi doktrin anti terorisme ala Bush? Bagaimana pula pandangan mereka terhadap Amerika Serikat?
3. Bagaimana respon pemerintah Indonesia atas sikap *war against terrorism* dari pemerintah Amerika Serikat?
4. Mekanisme apa yang hendak dibangun Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka peningkatan hubungan antar mereka?

Asumsi:

- Sikap “perang melawan terorisme” (*war against terrorism*) pemerintah Bush didasarkan pada lingkup kepentingan keamanan negara berhadapan dengan terorisme (*state security vis a vis terrorism*), dan bukan pada lingkup keamanan manusia berhadapan dengan terorisme (*human security vis a vis terrorism*).
- Respon masyarakat Indonesia terhadap doktrin anti terorisme ala Bush tidak menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi.
- Respon pemerintah Indonesia atas sikap *war against terrorism* Bush lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan domestiknya.
- Upaya peningkatan hubungan Indonesia-Amerika Serikat ditentukan oleh besarnya tingkat *bargaining position* yang dimiliki Indonesia di mata Amerika Serikat.

Metodologi

Penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan lewat proses pencarian, pengumpulan dan pemetaan permasalahan dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal, media massa, artikel-artikel serta media online (internet) yang banyak memberikan informasi terkini atas permasalahan yang diteliti. Kemudian, dari proses tahapan itu disusun materi pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengarahkan struktur analisis permasalahan serta menjadi pedoman bagi para peneliti dalam melakukan *depth interview* (wawancara mendalam).

Wawancara mendalam yang dilakukan ditujukan kepada para akademisi, pengamat, pembuat kebijakan, pihak swasta/LSM dan tokoh masyarakat. Sementara daerah penelitian di Indonesia difokuskan pada dua kota, Solo dan Denpasar dengan pertimbangan daerah pertama menjadi sasaran kecaman dari publik internasional sebagai kantong jaringan Islam radikal, yang disinyalir memberi 'angin' lahirnya kelompok terorisme. Sebagai contoh, pesantren di Ngruki-Solo dituduh sebagai tempat penyemaian ajaran Islam radikal yang mengarah pada lahirnya teroris. Bali utamanya Kuta tempat di mana terjadinya peledakan bom tektonik tahun 2002 juga sebagai sasaran para teroris. Setelah tahap itu, tim melakukan kegiatan transkrip dari hasil wawancara mendalam untuk kemudian diolah dan ditulis secara analitis. Sementara itu studi kepustakaan terus dilakukan sejak awal hingga sebelum penulisan berakhir.

Kerangka Pemikiran

Terorisme dalam kajian hubungan internasional, khususnya studi keamanan masih belum mendapat perhatian besar.² Terorisme dikategorikan dalam *soft security discourse* yang mendapat perhatian sekunder dibanding dengan ancaman perang antar negara dan bencana nuklir.³ Sebagai sebuah masalah keamanan dalam hubungan antar negara, terorisme pada abad 20 ditengarai muncul dari beberapa faktor yang beragam. Perjuangan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri (*right of self determination*) yang diperjuangkan oleh pihak tertindas (terjajah) merupakan bentuk perlawanan terhadap sipenjajah, yang dimata tertindas dilihat sebagai teroris (*state terrorism*). Kolonialisme Eropa di Asia dan Afrika dengan pembagian wilayah yang mengabaikan kondisi kebudayaan dan etnisitas setempat melahirkan konflik berkepanjangan yang menjadi ciri khas bentuk terorisme. Jika Fukuyama beranggapan runtuhnya komunisme adalah akhir sejarah dengan penyatuan gerak semua bangsa dalam kapitalisme global,⁴ Benjamin R. Barber lebih melihat bentuk tribalisme dengan berbagai

² Masalah terorisme pada dasarnya bukanlah sebuah isu baru dikajian akademis maupun di kalangan praktisi/negarawan. Istilah ini dapat ditemukan sejak Revolusi Perancis (1789-1795) yang ditujukan kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Sejak saat itu terorisme mengalami perubahan makna terkait dengan modus dan pelaku yang dicap sebagai teroris.² Terorisme dengan demikian secara konseptual sangat bermakna *pejorative* yang pemaknaannya sangat peka terhadap konteks ruang dan waktu serta pemberi makna. Kalangan akademisi masih terus berkutat untuk melakukan pendefinisian yang tepat sehingga dikalangan akademisi disebut oleh H. H. A. Cooper sebagai, "*a problem in the problem definition*". Terorisme adalah masalah bersama yang dapat dirasakan namun kita akan kesulitan menentukan apa itu terorisme.²

³ M. Riefqi Muna, '*Securitization*' in *Globalized World: Emergence of Non-Traditional Security Discourse*, Makalah Seminar disampaikan pada Seminar Intern P2P LIPI, 27 Januari 2003

⁴ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (London, Penguin, 1993)

corak dan motif menjadi sebuah bentuk perlawanan terhadap globalisme yang kerap mengabaikan nilai lokal dan keadilan bagi warga lokal. Globalisme dapat menjadi pemicu munculnya perlawanan tribalisme, yang disebut dengan Jihad oleh Barber⁵, apabila mengabaikan pelaksanaan demokrasi yang menghargai hak untuk menentukan nasib sendiri.⁶ Pada konteks ini sebenarnya terjadi tindak terorisme negara atas warga sipil. Namun ini seringkali menjadi “terabaikan” dan seolah menjadi tindakan “sepatutnya” dari negara atas warga sipil.

Berkembangnya pendekatan keamanan kemanusiaan, pada akhirnya, menyadarkan warga sipil untuk memperjuangkan hak mereka mendapatkan jaminan keamanan personal. Di mata mereka, negara harus memberikan jaminan bukan saja keamanan nasional tetapi yang terpenting keamanan manusia didalamnya. Peristiwa serangan kelompok teroris atas WTC dan Pentagon, dua lambang kekuatan kapitalisme negara AS, bisa dimaknai sebagai serangan *non-state terrorism* kepada negara AS. Serangan ini dimaknai sebagai tindak protes berat atas dominasi politik-ekonomi-militer AS yang berkepanjangan terhadap sekelompok tertentu di luar AS yang selama ini terpinggirkan. Lalu muncullah penguatan istilah *non-state terrorism* yang dipakai oleh Presiden George W. Bush untuk menekan dan memojokkan kelompok agama tertentu sebagai pelaku terorisme. Terorisme oleh negara dapat dilakukan dengan menekan pihak yang berbeda pendapat dan kepentingan, baik di wilayahnya

⁵ Barber mendefinisikan konsep “Jihad” yang dalam konteks *in its militant construction to suggest dogmatic and violent particularism of a kind known to christians less than muslims, to German and Hindus as well as Arabs.*, Benjamin R. Barber, *Jihad vs McWorld: How Globalism are Reshaping The World*, (New York, Ballentin Books, 1995), hlm. 9

⁶ Barber, *ibid*, hlm. 15

sendiri maupun di wilayah negara lain.⁷ Terorisme oleh non negara, yang biasanya dalam posisi lemah terutama karena tidak memiliki kekuatan struktur (politik, ekonomi, militer dan hukum) seperti halnya yang dimiliki negara, melakukan aksi terornya dengan target tempat-tempat publik.

Di samping implikasi yang muncul dari aksi terorisme 9/11, wajah lama terorisme adalah bahwa aksi teror dapat menimbulkan korban yang indiskriminatif, sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum internasional. Korban aksi ini tidak lagi dibatasi pada sejumlah elit ataupun kelompok tertentu, tapi sudah meluas pada masyarakat dan ini menyangkut faktor keamanan manusia (*human security*). Oleh karena itu, akibat tindakan teror merupakan ancaman bagi setiap individu. Negara dalam hal ini harus memberi ruang kepada individu dan kelompok untuk membela diri terhadap aksi terorisme seperti yang tercantum dalam Resolusi DK PBB 1368 tahun 2001. Dalam hal ini, salah satu usulannya adalah menegakan kembali prinsip diskriminasi (*ius in bello*) dan delegitimasi teror sebagai suatu cara pencapaian tujuan kelompok.⁸ Penegasan ini dapat dilakukan dalam komunikasi massa dengan menggunakan tokoh masyarakat yang dapat memberikan penegasan nilai.

Peristiwa 9/11 bukan saja dipandang sebagai dorongan bagi peningkatan kesadaran masyarakat dunia, namun juga munculnya perdebatan mengenai penanganan yang tepat terhadap bahaya terorisme. Adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk

⁷ Kasus dukungan Pemerintah AS pada era Presiden Reagan ini dikenal dengan Skandal *Iran Contra*. Penjualan senjata kepada pihak Iran yang secara dilakukan secara rahasia digunakan untuk mendukung kelompok *Contra* yang anti Pemerintah resmi Nikaragua yang komunis. Noam Chomsky menyebut aksi subversif sejumlah kelompok perlawanan di Nikaragua didukung oleh Pemerintah AS, lihat Noam Chomsky, "Who are the Global Terrorists?", dalam Ken Booth dan Tim Dunne, *World in Collision: Terror and Future of Global Order*, (New York, Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 130

⁸ Schmid dan Crelisten (1993) dikutip dari Widjajanto, *loc cit*, hlm.17

mengutuk aksi 9/11 sebagai bentuk terorisme adalah sebuah momentum yang terus berkembang seiring dengan perbedaan penentuan mekanisme penanganannya. Bahwa kemudian pencitraan teroris 9/11 cenderung mengarah ke kelompok agama tertentu, ini menjadikan satu bentuk “pertarungan” atas pandangan siapa sebenarnya yang menjadi teroris. Masalahnya, belum adanya definisi tegas tentang terorisme itu sendiri sangat mengaburkan opini dunia. Jika sejumlah kesepakatan telah dicapai oleh organisasi regional dan dunia untuk mendapatkan definisi operasional atas bentuk tindakan terorisme, penanganan atas tindakan terorisme relatif bisa lebih mudah dicapai.⁹ Pentingnya memahami makna simbolik dalam sebuah tindakan terorisme, di mana sasaran langsung kekerasan sebenarnya bukanlah sasaran utama (*“the direct targets of violence are not the main target”*) seharusnya juga diperhatikan.¹⁰ Munculnya dua pola penyelesaian multilateral dan unilateral menjadi ajang persetujuan mekanisme penanganan.

Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam menghadapi masalah terorisme akan sangat terkait dengan bagaimana keduanya menempatkan negara sebagai aktor pemecah masalah, dan bukan sebagai pemicu masalah. Sikap AS yang menyatakan perang melawan terorisme global sebaiknya disikapi Indonesia secara proporsional. Bahwa di Indonesia marak terjadi aksi terorisme, yang kemudian dipakai AS sebagai penegasan “Indonesia sebagai tempat penyemaian terorisme”, tidak dapat dipungkiri. Namun porsi penanganan aksi terorisme lokal ini sepatutnya tidak melebihi porsi yang ada. Artinya, penanganan pemerintah atas aksi terorisme harus didasarkan pada kerangka keamanan manusia di atas segalanya, dan bukan semata keamanan negara saja. Apapun bentuk kerjasama AS dan Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia harus diorientasikan pada tingkat prioritas kesiagaan lokal dan regional, bukan kesiagaan global. Jika diprioritaskan pada kesiagaan global dikhawatirkan bisa menyeret kesertaan Indonesia pada

⁹ <http://untreaty/un.org/english/terrorism.asp>, 1 Februari 2005

¹⁰ Alex P. Schmid dikutip dari Kohane, 2002, *loc cit*, hlm. 142

skenario anti terorisme globalisme dan radikalisme milik AS. Dalam kaitan ini, Indonesia sebaiknya cermat dan berhati-hati untuk tidak masuk dalam skenario itu. Karena skenario itu semakin diperdebatkan di dalam AS sendiri bahwa semuanya itu bisa bermula dari teori konspirasi AS.

Pembabakan Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab penulisan, yang diawali dengan pendahuluan sebagai bab pertama. Dalam bab awal ini secara umum menyetengahkan apa yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Bab kedua mengenai Terorisme dalam Politik Luar Negeri Amerika; bab tiga Respon Masyarakat Indonesia terhadap Doktrin Anti-Terrorisme; bab empat menjelaskan Respon Pemerintah Indonesia atas Sikap “Perang terhadap Terorisme” Amerika Serikat; sementara bab lima melihat Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia –AS pasca 9/11; dan diakhiri dengan bab enam sebagai bab penutup.

Bab dua menjelaskan Terorisme dalam Politik Luar Negeri Amerika dimaksud untuk memahami bagaimana sebenarnya arah dan sikap AS menghadapi terorisme. Kehendak pemerintah Bush untuk memperbesar *primacy* Amerika tampaknya tidak dilakukan untuk mempertahankan stabilitas internasional sebagaimana umumnya dikemukakan teori neorealisme dalam hubungan internasional, melainkan untuk kepentingan nasional Amerika sendiri dan dianggap *by default* akan baik bagi dunia internasional.¹¹ Mempertahankan *primacy* ini merupakan suatu anggapan yang terdapat dalam teori-teori neorealis dalam hubungan internasional dan yang mengemukakan bahwa semakin sedikit pusat-pusat kekuatan dalam suatu sistem internasional, semakin stabil sistem itu. Semakin sedikit kekuatan besar yang bersaing untuk supremasi dalam sistem itu, semakin “sederhana” peraihan keseimbangan yang stabil dalam politik global.

Upaya-upaya untuk menciptakan suatu strategi besar membangun hegemoni Amerika Serikat ini mendapat dorongan luar

¹¹ Ashley, *ibid.*

Pendahuluan

biasa dari akibat serangan 9/11. Peristiwa ini segera menggeser pemusatan perhatian Presiden Bush untuk mempertahankan tatanan dunia yang unipolar dan stabil. Strategi itu kini diarahkan untuk memerangi terorisme secara global. Dan terorisme dalam pandangan resmi pemerintah Amerika ialah setiap "premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually to influence an audience." Rumusan ini menjelaskan bahwa bagi lembaga-lembaga keamanan dan penegak hukum AS melihat gerakan para teroris politis sifatnya dan sasaran mereka ialah *non-combatants*.

Dalam tahun-tahun berikut, perang ini akan berbentuk suatu kampanye masif yang dipimpin AS bersama-sama dengan negara-negara lain, dengan sasaran:—*defeating, denying, diminishing, and defending*. Perumusan "strategi 4 D" terhadap terorisme global segera diberlakukan di wilayah Asia Selatan dan segera sesudah itu strategi itu disebarkan ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Asia Tengah sampai ke Eropa.

Pada pemerintahan Presiden Bush tahap pertama, menteri luar negeri dan menteri pertahanan memiliki pandangan yang saling bersaing dalam hal bagaimana mewujudkan politik luar negeri bagi Presiden. Pandangan menteri luar negeri pada umumnya mengemukakan pentingnya peran para sekutu, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pentingnya kewajiban-kewajiban internasional. Sebaliknya, pandangan menteri pertahanan cenderung untuk mencari penyelesaian suatu masalah internasional melalui penggunaan kekuatan militer AS. Ia sering pula mengemukakan pentingnya penyelesaian masalah-masalah internasional dengan menggunakan kekuatan militer. Dalam masa pemerintahan Bush yang pertama ini, Menteri Luar Negeri Colin Powell seringkali mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi "kubu" gabungan kekuatan Wakil Presiden Dick Cheney dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dalam menjalankan politik luar negeri AS. Gabungan kekuatan itu, pada kenyataannya, lebih didengar oleh Bush yang pada akhirnya menunjuk kekuatan militer AS untuk menjalankan misi politik luar negerinya di Afghanistan dan Irak

Pertanyaannya kini, dalam masa Kepresidenan George W. Bush yang kedua apakah Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice memilih pola departemen luar negeri (yakni pentingnya peran sekutu, PBB dan rambu-rambu internasional) atau pola departemen pertahanan ? Apabila ia memilih pola pertama, apakah Presiden Bush akan beralih pula dari kecenderungan-kecenderungan unilateralnya? Menlu Condoleeza Rice ini memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Bush, tetapi kedekatannya itu akan dihadapkan pula dengan lawan-lawan politiknya yang kuat terutama dalam pertarungan antarlembaga mengenai pelaksanaan politik luar negeri.¹² Satu perubahan sikap dari Amerika untuk tidak bertindak secara sepihak tentu sangat diharapkan dunia, bahkan oleh rakyat Amerika sendiri. Kiprah dari Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice untuk dapat menerapkan pola departemen luar negeri ini setidaknya diharap pula oleh negara-negara yang selama ini bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Bab tiga mengetengahkan respon masyarakat Indonesia terhadap doktrin Anti Terorisme milik AS. Doktrin perang melawan terorisme yang dikembangkan pemerintahan Amerika Serikat pasca 11 September 2001, dalam kenyataannya justru semakin membuat tata internasional menjadi lebih didominasi ketegangan dan konflik. Bush dan kelompok neokonservatif yang praktis menentukan politik AS sejak tahun 2000, sangat berambisi menguasai dunia, baik secara politik, militer, maupun (dan terutama) secara ekonomi. Melalui sebuah *think tank* bernama PNAC (*the Project for New American Century*) AS berupaya keras merealisasikan sebuah “*Pax-Americana*”, yakni “pemerintahan dunia” yang dikendalikan AS.

Guna mewujudkan ambisi itu, mereka melakukan berbagai kampanye disinformasi. Kampanye disinformasi ini dipandang oleh masyarakat akademis (setidaknya didua tempat penelitian ini)

¹² Parker Borg, Condoleeza Rice and American Foreign Policy in the Second Bush Administration, *Center for International Policy's National Security Project*, Fifth Column, 11 Februari 2005, <http://ciponline.org/nationalsecurity/articles/021105borg.htm>, diakses pada 17 Maret 2005.

Pendahuluan

sebagai hal yang menyesatkan. Siasat AS menciptakan “ikon” yang bisa dijadikan sebagai musuh bersama guna mendapatkan dukungan luas, baik dari publik domestik maupun internasional, tampaknya cukup berhasil. Islam, setelah surutnya komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur, menjadi pilihan yang tepat untuk dimunculkan sebagai musuh bersama, seperti sudah “disodorkan” oleh Samuel P. Huntington (salah seorang pakar politik yang dikenal sangat berpengaruh di kalangan kaum neokonservatif AS) dalam “*clash of civilizations*.”

Bersama Al-Qaeda, dimunculkan pula “Jamaah Islamiyah” (JI) sebagai “jaringan teroris muslim” yang paling dahsyat di kawasan Asia Tenggara. Jika serangan 11 September 2001 dijadikan sebagai “karya monumental” Al-Qaeda, maka Bom Bali I (2002)—yang kemudian diikuti dengan Bom Marriot (2003), Bom Kuningan (2004), dan Bom Bali II (2005)—dengan cepat melambungkan nama JI di Indonesia. Jika oleh Bush dan kawan-kawan, Osama bin Laden berhasil ditampilkan sebagai “imam” Al-Qaeda, maka Ustad Abubakar Ba’asyir¹³ pun berusaha keras untuk dinobatkan—terutama oleh John Howard dan Lee Kuan Yew—sebagai “imam” JI. Respon masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terhadap pemunculan citra Abubakar Ba’asyir memiliki tingkat yang relatif sama. Bagi mereka yang Islam moderat melihat penekanan AS pada Abubakar Ba’asyir itu sebagai hal yang dibesar-besarkan. Bahwa masalah benar-tidaknya Abubakar Ba’asyir terlibat sebagai teroris adalah menjadi otoritas pemerintah Indonesia, bukan AS, di dalam menyelidikinya. Untuk membuktikan benar tidaknya ia seorang teroris dibutuhkan satu bukti yang secara hukum kuat.

Terdapat reaksi emosional yang tinggi dari mereka yang Islam fundamentalis atas penangkapan Abubakar Ba’asyir yang hingga kini belum ada kejelasan pengadilannya. Mereka ini sangat anti AS dan menentang keras atas sikap AS yang “merajam” saudara sesama

¹³ Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, salah satu organisasi yang paling lantang memperjuangkan penegakan hukum Islam dan getol menyerang politik Bush.

Muslim mereka di Afghanistan maupun Irak. Selain itu, adanya penggalangan opini internasional bahwa kalangan pesantren seperti pesantren Al Mukmin di Ngruki, Solo dan pesantren Al Islam di Lamongan adalah pesantren-pesantren yang “mencetak” Islam radikal sangat menyudutkan peran pesantren. Beberapa pengamat berpendapat bahwa bukan sosok fisik Abubakar Ba’asyir yang ditakuti oleh Amerika, melainkan semangat dan ideologi termasuk pemikirannya setidaknya memberi “nafas” kepada murid-muridnya. Sementara dari kelompok sekuler mengikuti dan mempercayai tuduhan AS pada Abubakar Ba’asyir sebagai tokoh Jamaah Islamiyah yang berkaitan erat dengan jaringan Al Qaeda.

Memang bukan suatu kebetulan jika setiap tahun Indonesia dilanda berbagai aksi serangan terorisme. Selain karena melemahnya kekuatan aparat negara (khususnya TNI dan intelijen) pasca reformasi 1998, juga lantaran makin berkembangnya kelompok-kelompok “Islam fundamentalis”¹⁴ yang berupaya keras menegakkan hukum Islam. Mereka ini pada umumnya bersikap sangat kritis terhadap kebijakan AS di bawah GW Bush. Hal inilah yang justru dianggap dapat merintangangi ambisi Bush dan kaum neokonservatif untuk mewujudkan sebuah “*Pax-Americana*”.

Bab empat menjelaskan Respon Pemerintah Indonesia atas Sikap “Perang Terhadap Terorisme” Amerika Serikat. Dalam menyikapi ancaman terorisme, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mengcounter-nya dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 ini merupakan ketetapan dari Perpu No. 01/2002. Sebelumnya, ketika peledakan bom Bali I terjadi, pemerintah secara cepat mengakomodir tekanan luar maupun dalam atas pentingnya Perpu guna mengatasi ancaman terorisme. Pada 18 Oktober 2002 akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu Anti-Terrorisme itu. Perpu No. 01/2002 menyangkut Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan Perpu No. 02/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 01 dalam hal

¹⁴ Sekalipun kebangkitan fundamentalisme agama sebenarnya juga merupakan fenomena universal, bukan hanya di Islam saja.

melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap para pelaku bom di Bali.¹⁵

Dikeluarkannya Perpu Anti-Terrorisme ini bisa direfleksikan sebagai respon pemerintah atas sikap Amerika Serikat yang menyatakan perang terhadap terorisme (*war against terrorism*). Apalagi peristiwa bom di Bali (Oktober 2002) membuat posisi Indonesia di mata Amerika tersudut dalam citra sebagai *terrorist breeding ground*.¹⁶ Permasalahannya kemudian Perpu ini mendapat beberapa kritikan dari masyarakat bahwa adanya Perpu ini bisa mematikan hak-hak dasar manusia. Kedua Perpu dipandang lebih mengedepankan konsepsi keamanan nasional daripada keamanan manusia. Di poin ini terjadi perbedaan orientasi atas Perpu, yakni di sisi aparat keamanan dan penegak hukum, konsepsi keamanan nasional menjadi hal yang diutamakan. Sementara di sisi masyarakat, ini dipandang bisa mematikan nilai-nilai demokrasi yang tengah diperjuangkan di Indonesia. Pemerintah seharusnya mengakomodir kedua pandangan tersebut, dan atau setidaknya mulai mengadopsi konsepsi keamanan manusia mengingat korban dari serangan teroris adalah warga sipil.

Undang-Undang No. 15/2003 di bawah pemerintah Megawati mengalami usulan untuk direvisi. Usulan revisi ini menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang mendukung sebagian besar dari TNI dan purnawirawan yang melihat upaya revisi sebagai jalan melawan terorisme yang kini sudah menjadi *common enemy* secara global. Sementara yang menentang adalah masyarakat yang melihat upaya revisi sebagai cara yang tidak benar. Mereka mempertanyakan apakah UU Anti-Terrorisme yang ada itu memang benar-benar tidak "bergigi" untuk menghadapi terorisme, sebagaimana diyakini oleh kelompok yang mendukung. Apakah UU tersebut tidak cukup bagi aparat keamanan untuk memiliki otoritas dalam melakukan aksi-aksi preventif? Bagi mereka UU Anti-terorisme yang ada sebenarnya

¹⁵ Lihat lebih lengkap pada Donny Gahril Adian, "Mencegah Lahirnya Terorisme Negara: Indonesia Pasca Bom Bali", *Analisis CSIS*, tahun XXXII, No. 1, tahun 2003, hlm. 82-83.

¹⁶ *Ibid.*

sudah cukup digunakan untuk memberantas aksi-aksi terorisme. Jadi upaya revisi terhadapnya sebenarnya tidak diperlukan kecuali itu hanya untuk memberi keleluasaan bagi aparat keamanan untuk memburu teroris, yang mungkin tidak mengindahkan nilai-nilai HAM. Hingga kini (setidaknya hingga penulisan penelitian ini dilakukan), di bawah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, draf revisi UU Anti-terorisme belum tuntas benar dan masih dibahas di Departemen Hukum dan HAM.¹⁷ Upaya revisi ini merefleksikan semakin besarnya “intervensi” AS atas pemahaman konteks terorisme sebagai *common enemy* secara global di Indonesia.

Pandangan Indonesia (di bawah pemerintah Megawati Soekarnoputri) berbeda dengan pandangan Singapura dan Amerika Serikat. Baik Indonesia dan Malaysia tidak melihat terorisme sebagai suatu ancaman besar seperti halnya Singapura dan Amerika Serikat dan Australia. Bagi Indonesia, terorisme merupakan suatu masalah politik yang erat kaitannya dengan dinamika politik internal. Dr. Mahathir tidak dapat menerima laporan-laporan yang mengaitkan organisasi politik dan agama dengan jaringan global Al-Qaeda. Sementara Wakil Presiden, Hamzah Haz, memperlihatkan ketidaksenangannya dengan usaha Amerika untuk mendiskreditkan dunia Islam.

Peristiwa bom Bali 2 Oktober 2005 (meski korbannya tidak sebesar bom bali I), semakin memberi label tebal bahwa Indonesia memang telah menjadi *terrorist breeding ground*. Di poin ini semakin tipis harapan Indonesia untuk ke luar dari jeratan label itu, dan sebaliknya, semakin kuat tarikan kepentingan AS dalam menebar terorisme sebagai ancaman global di Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia sepatutnya melakukan penyeimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Pemahaman dengan disertai sikap yang hati-hati atas munculnya asumsi “terorisme global identik dengan Islam” milik AS ini seharusnya dikedepankan. Indonesia dengan mayoritas Muslimnya sudah sepatutnya tidak terpancing dengan asumsi itu. Adanya radikalisme

¹⁷ *Kompas*, 20 Oktober 2005.

Pendahuluan

Islam yang berbuntut kekerasan sebaiknya dipahami dalam konteks ketidakadilan ekonomi dan politik dunia. Dan sesuatu tindak kekerasan dari kelompok tertentu biasanya politis sifatnya dan *non-combatants*, bukan agama.

Bab lima mengulas tentang Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-AS pasca 9/11. Di bagian ini dipaparkan tentang hubungan Indonesia-AS di beberapa sektor, seperti politik, militer, HAM, pendidikan. Cakupan dari penjelasan di bagian ini lebih ditekankan pada dinamika hubungan pada masa sesudah tragedi 9/11. Bahasan tidak semata menyangkut bagaimana warna hubungan Indonesia-AS dalam konteks perang melawan terorisme (*war against terrorism*), tetapi lebih luas dari itu. Sudah sejak dahulu Amerika melihat pentingnya peran Indonesia dalam politik luar negerinya. Kebijakan AS memerangi terorisme sebenarnya tak bisa lepas dari dukungan Indonesia. AS sangat berkepentingan untuk memperoleh dukungan Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Apalagi secara geopolitik, Indonesia berada di jalur perairan – Selat Malaka – yang strategis di kawasan Asia Tenggara.

Untuk itu pemerintah AS memberikan bantuan melalui program bantuan anti-terorisme (*Anti-Terrorism Assistance /ATA*). Inisiatif program ATA di Indonesia bermula pada tahun 2001 tatkala Departemen Luar Negeri AS melakukan penilaian terhadap kapabilitas Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam memerangi terorisme. Pada akhirnya program ATA di Indonesia dimulai pada 2003. Pada Juli 2003 program tersebut menghasilkan 30 investigator kontra terorisme yang dikirim ke bagian *Counter-Narcotics Task Force* yang dikepalai Jenderal Gorys Mere. Pada Oktober 2003 program ATA menghasilkan *Crisis Response Teams* (CRT) dan teknisi penjinak bom yang akan menjadi bagian utama dari pasukan Detasemen 88. Pada Maret 2004 Detasemen 88 secara resmi berdiri.

Sementara itu, apabila kita mencermati hubungan militer Indonesia – AS dalam satu dekade terakhir, terdapat fluktuasi yang cukup serius. Sejak pecahnya kerusuhan Santa Cruz tahun 1991,

pemerintah AS memutuskan hubungan militer dengan Indonesia lewat penghentian program *International Military Education and Training* (IMET). Menyusul terjadinya kerusuhan di Dili, Timor Timur pada tahun 1999, pemerintah AS kemudian mengeluarkan embargo militer atas pembelian senjata dan suku cadang oleh Indonesia. Sanksi militer tersebut diambil pemerintah AS karena mereka meyakini akan keterlibatan militer Indonesia pada 2 peristiwa kekerasan itu. Meskipun demikian, upaya pemulihan hubungan militer kedua negara telah diupayakan oleh kedua negara. Apalagi, dalam kampanye perang global melawan terorisme, AS membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Megawati dengan Presiden Bush pada 19 September 2001, maka kedua negara sepakat untuk melaksanakan Dialog Keamanan Indonesia – AS ke 1 (*Indonesia – U.S. Security Dialogue/ IUSSD*) di Jakarta pada 24-25 April 2002, dialog ke-2 dilaksanakan di Washington, D.C. pada 22-23 April 2004, dan dialog ke-3 yang diselenggarakan di Jakarta pada 2-3 Agustus 2005. Terlaksananya serangkaian pertemuan dialog keamanan I, II, dan III serta pertemuan interim *Bilateral Defense Dialogue* pada tahun 2004, mengindikasikan bahwa proses Dialog Keamanan (*Security Dialogue*) telah melembaga sebagai salah satu komponen permanen dalam hubungan bilateral Indonesia-AS.

Pada bulan Oktober 2002, pihak Kongres AS merencanakan akan mengeluarkan persetujuan atas pembukaan kembali kerja sama militer dengan TNI. Namun, rencana ini akhirnya tertunda, karena terjadi insiden penyerangan rombongan guru Sekolah Internasional Tembagapura pada 31 Agustus 2002 di Timika, yang menewaskan 2 warga AS dan seorang warga Indonesia. Para senator AS menilai pemerintah Indonesia lamban dalam mengungkap insiden ini, termasuk tudingan pada militer Indonesia yang terlibat didalamnya. Meski begitu, setelah dialog keamanan ke-2 dan ke-3 dilaksanakan, pemerintah AS kembali memberikan sinyal positif dalam normalisasi hubungan militer Indonesia – AS. Hal ini terlihat dari operasi bantuan darurat militer AS untuk korban tsunami, serta dibukanya

kembali program pendidikan dan pelatihan militer internasional (IMET) untuk para perwira Indonesia di AS.

Di mata AS demokrasi merupakan *the best antidote of terrorism* (penangkal terbaik terorisme), karena terorisme akan muncul jika, [1] negara gagal dalam memperbaiki perekonomian secepatnya; [2] negara gagal untuk mengkonsolidasikan proses demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dipandang sebagai peluang oleh pemerintah AS. Karenanya pemerintah AS menawarkan bantuan ekonomi ke Indonesia, karena dianggap memiliki perhatian besar terhadap demokrasi. Meskipun pemerintah AS memberi dukungannya pada demokratisasi di Indonesia, namun dukungan tersebut seperti “bermata dua.” Di satu sisi pemerintah AS mendukung demokratisasi di Indonesia, namun di lain sisi pemerintah AS juga menguatkan militer di Indonesia, di mana penguatan militer ini juga berarti dapat berimbas pada penguatan terhadap kecenderungan anti demokrasi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa penguatan militer di Indonesia nantinya bisa berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi.

Upaya AS dalam meningkatkan hubungan dengan Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk bantuan dana penegakkan hukum, khususnya untuk reformasi hukum dan peradilan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional termasuk kejahatan terorisme dan *money laundering*. Di samping itu, AS juga mengarahkan bantuan bagi pengembangan di sektor pendidikan Islam. Selama bantuan ini tidak ditujukan sebagai cara pemaksaan untuk mengubah sistem kurikulum pendidikannya, ini sah-sah saja. Namun jika ditarik dalam konteks terorisme global menurut kacamata AS, di balik bantuan itu, pemerintah AS menginginkan terjadinya pergeseran penafsiran-penafsiran terhadap Islam, berupa penerapan sekulerisasi di institusi-institusi pendidikan Islam. Jika bantuan ini tidak disikapi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, sistem sekulerisasi bisa saja mengganti sistem pendidikan yang ada selama ini.

Bantuan kemanusiaan pemerintah AS untuk pemulihan korban bencana Tsunami di Aceh merupakan bentuk lain dari upaya peningkatan hubungan kedua negara. Keinginan AS untuk

memperbaiki citranya di mata internasional, terlebih di mata masyarakat Indonesia, diharap tercapai. Di poin ini, pengaruh Menlu Condoleeza Rice, yang ingin menerapkan pola pendekatan norma-norma internasional pada politik luar negeri Bush bisa dianggap sebagai langkah awal. Ini setidaknya memberi citra positif bagi AS bahwa dirinya masih sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Keinginan untuk memperbaiki citra bagi AS, bersanding dengan kebutuhan darurat Indonesia dalam mengatasi bencana Tsunami di Aceh, terwujud dalam momen kemanusiaan di Aceh.

Bab enam menyimpulkan bahwa tragedi 9/11 memang telah menjadi titik balik (*turning point*) bagi warna politik luar negeri AS terutama terhadap negara Islam. Sikap perang melawan terorisme AS terkesan lebih diwarnai adanya kepentingan bisnis ekonomi lingkaran Bush. Pada masa pemerintah Bush I politik luar negerinya lebih terkesan kaku dan sepihak, tanpa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan luar negeri para sekutu dan kebijakan PBB. Pada masa pemerintahan Bush II menjadi satu tantangan sekaligus ujian bagi Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice untuk mengembalikan pola politik luar negeri AS berdasar pada pola yang tidak unilateral.

Hubungan AS dengan Indonesia adalah menjadi bagian peta kekuatan AS di Asia Tenggara yang sangat penting. Peristiwa 9/11 (2001) disertai dengan peledakan bom Bali (2002) yang mengguncang dunia “menyandingkan” dua kepentingan Amerika dan Indonesia untuk menghadapi dan mencegah terorisme. Berbagai bantuan dan kerjasama antar mereka mengalami peningkatan. Namun bagi Indonesia semua bentuk kerjasama itu tidak semata bahwa Indonesia mengikuti dan masuk dalam lingkaran peta politik luar negeri AS yang menyatakan perang melawan terorisme global, yang cenderung mengidentikkan Terorisme dengan Islam. Ada beberapa kepentingan Indonesia yang penting untuk diperjuangkan yaitu pengusutan serta upaya minimalisasi ancaman teroris di dalam negeri sendiri. Semua itu ditujukan untuk memberi dan menjaga kelangsungan perbaikan dan peningkatan ekonomi dalam negeri. Jika aktivitas sentra-sentra ekonomi terganggu karena ulah teroris akan runyam lah stabilitas nasional kita.

Pendahuluan

Pemerintah menyadari bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk meredam setiap gejolak masyarakat terhadap sikap AS yang kontroversial diperlukan kehati-hatian pemerintah di dalam mengakomodir tuntutan dari gejolak itu. Untuk itu diperlukan satu sikap ataupun respon tegas dari pemerintah di dalam menyikapinya. Sikap tegas yang mencerminkan adanya sinergi antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Guna meningkatkan level saling memahami antara kedua negara diperlukan upaya peningkatan hubungan dalam segala bidang. Yang telah berjalan adalah upaya di bidang keamanan lewat Dialog keamanan Amerika Serikat-Indonesia; bantuan ekonomi; bantuan pendidikan; kerjasama militer dan sebagainya. Bagi Indonesia upaya peningkatan hubungan itu tentunya harus disesuaikan dengan prioritas kepentingan nasional, dengan menyertakan perjuangan kepentingan bagi keamanan manusia. Karena terorisme bukan saja mengancam negara namun terlebih mengancam keamanan dan kehidupan manusia didalamnya. Dan saatnya bagi Indonesia untuk mulai memperhatikan dan memperjuangkan itu di tingkat yang lebih tinggi.

Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11

Bab 2

TERORISME DALAM POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

CPF. Luhulima

Setelah Perang Dingin, elit politik luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat, baik di sisi Demokrat maupun Republik, menyetujui bahwa pemerintah AS menjalankan kebijakan luar negeri yang hegemonis, yaitu memperluas dan mengkonsolidasi kekuatannya untuk membentuk suatu sistem internasional yang sesuai dengan kepentingannya, selama distribusi kekuatan dunia tetap unipolar sifatnya. Serangan terhadap WTC pada 11 September 2001, dan perang terhadap terorisme yang menyusulnya memberikan dukungan yang lebih besar bagi suatu politik luar negeri yang hegemonis itu.¹ Kecenderungan Presiden George W. Bush untuk menetapkan kebijakan luar negeri yang hegemonis itu bersumber dari suatu keyakinan bahwa hegemoni Amerika Serikat adalah baik untuk Amerika dan karena itu perlu diperjuangkan terus, terlepas dari apakah negara-negara lain menyukainya atau tidak.

Kehendak pemerintah Bush untuk memperbesar *primacy* Amerika tampaknya tidak dilakukan untuk mempertahankan stabilitas internasional sebagaimana umumnya dikemukakan pada teori neorealisme dalam hubungan internasional, melainkan untuk kepentingan nasional Amerika sendiri dan dianggap *by default* akan baik bagi dunia internasional.² Penulisan bab ini mengkaji mengapa Amerika di bawah kepemimpinan George W. Bush cenderung bersikap unilateral di dalam menghadapi dan mengeliminasi ancaman terorisme pasca tragedi 9/11.

¹ Ashley J. Tells, *Assessing America's War on Terror: Confronting Insurgency, Cementing Primacy*, NBR Analysis, 2004, hlm. 9.

² Ashley, *ibid.*

Pemerintah Bush dan Hegemoni Amerika

Mempertahankan *primacy* ini merupakan suatu anggapan yang terdapat dalam teori-teori neorealis dalam hubungan internasional dan yang mengemukakan bahwa semakin sedikit pusat-pusat kekuatan dalam suatu sistem internasional, semakin stabil sistem itu. Semakin sedikit kekuatan besar yang bersaing untuk supremasi dalam sistem itu, semakin “sederhana” peraihan keseimbangan yang stabil dalam politik global. Logika dari teori neorealis ini ialah bahwa suatu sistem hegemonis, selama ia bertahan, dianggap lebih stabil dalam arti struktural daripada suatu sistem bipolar, yang pada gilirannya akan lebih stabil daripada suatu sistem multilateral, dan seterusnya.³

Sasaran pemerintah Bush untuk mempertahankan hegemoni Amerika selama mungkin merupakan jaminan bagi kepentingan nasional AS yang spesifik, kendatipun upaya untuk mencapai sasaran itu sekaligus kurang membawa keuntungan bagi beberapa belahan dunia. Strategi untuk mempertahankan *primacy* ini didasarkan atas suatu upaya komprehensif dengan mempertumbuhkan kekuatan nasional AS, seraya menciptakan suatu rangkaian lembaga dan norma internasional untuk memperkecil biaya penggunaan kekuatan untuk *regime maintenance*. Pemerintah Bush memang tidak memberi cukup perhatian untuk membangun suatu konsensus internasional guna mengurangi beban “imperial” ini, tetapi ia sadar bahwa mempertahankan dominasi Amerika merupakan suatu tugas yang berat dan yang memerlukan persiapan yang sangat banyak.

Untuk melaksanakan strategi ini, pemerintah Bush melakukan suatu upaya multidimensional yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Transforming the U.S. armed forces by exploiting the revolution in military affairs and new basing arrangements to create an agile and lethal expeditionary force capable of effective global operations with the smallest possible footprint;

³ Lihat juga Ashley J. Tells, *ibid.*

- Reducing the salience of nuclear weapons in U.S. military strategy in order to minimize the incentives of other state and non-state actors to acquire these strategic equalizers, while simultaneously working to contain the spread of weapons of mass destruction (WMD) through a new approach that emphasized smaller nuclear forces, nonproliferation, counter-proliferation, and strategic defenses;
- Revitalizing traditional alliances (among other ways through enlargement) to deal with both the traditional problems of international security and a range of new challenges;
- Creating new partnerships with key countries that, despite not being formal allies of the United States, would collaborate with Washington through various “coalitions of the willing” to deal with emerging threats to peace and security;
- Enlarging the liberal international economic order through greater economic integration and access to new markets in order to increase national prosperity, wealth, and power through a steady outward shift of the global production possibility frontier.⁴

Upaya ini dilakukan pemerintah Bush untuk menciptakan suatu *preponderance* yang berkepanjangan yang mampu menangkal setiap ancaman yang dapat timbul dari kekuatan-kekuatan yang akan muncul di masa depan.

Upaya-upaya untuk menciptakan suatu strategi besar untuk membangun hegemoni Amerika Serikat ini mendapat dorongan yang luar biasa dari serangan terhadap WTC pada bulan September 2001 itu. Peristiwa ini segera menggeser pemusatan perhatian Presiden Bush untuk mempertahankan tatanan dunia yang unipolar dan stabil. Strategi itu kini diarahkan untuk memerangi terorisme secara global. Dan terorisme dalam pandangan resmi pemerintah Amerika ialah setiap “premeditated, politically motivated violence perpetrated

⁴ Ashley, hlm. 11-12

against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually to influence an audience.” Rumusan ini menjelaskan kepada lembaga-lembaga keamanan dan penegak hukum AS bahwa gerakan para teroris itu politis sifatnya dan sasaran mereka ialah *non-combatants*.

"[An] Act of terrorism means any activity that [a] involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the laws of the United States or any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State; and [b] appears to be intended [i] to intimidate or coerce a civilian population, [ii] to influence the policy of a government by intimidation or coercion, or [iii] to affect the conduct of a government by assassination or kidnapping."⁵

Dalam pidatonya di depan sidang gabungan *Congress* dan *American People* pada 21 September 2001, segera setelah serangan atas *World Trade Center* dan Pentagon, George Bush menyatakan:

Al Qaeda is to terror what the mafia is to crime. But its goal is not making money; its goal is remaking the world -- and imposing its radical beliefs on people everywhere.

The terrorists practice a fringe form of Islamic extremism that has been rejected by Muslim scholars and the vast majority of Muslim clerics -- a fringe movement that perverts the peaceful teachings of Islam. The terrorists' directive commands them to kill Christians and Jews, to kill all Americans, and make no distinction among military and civilians, including women and children.

Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. ... We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. (Applause.) From this day forward, any nation that

⁵ *United States Code Congressional and Administrative News*, 98th Congress, Second Session, 1984, Oct. 19, Vol. 2; par 3077, 98 STAT. 2707

continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.

... But the only way to defeat terrorism as a threat to our way of life is to stop it, eliminate it, and destroy it where it grows.⁶

Dalam tahun-tahun berikut, perang ini akan berbentuk suatu kampanye yang masif yang dipimpin AS bersama-sama dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, dengan sasaran:—*defeating, denying, diminishing, and defending*:

- Together with U.S. allies, **defeating** terrorists by attacking their sanctuaries; leadership; command, control, and communications; material support; and finances. Components include: (1) identifying and locating terrorists by making optimal use of all intelligence sources, foreign and U.S., and (2) destroying terrorists and their organizations by capture and detention and prosecution, use of special forces and other military power, and employment of specialized intelligence resources, and international cooperation to curb terrorist funding;
- **Denying** terrorists state sponsorship, support, and sanctuary/safehavens. A central strategy objective is to ensure that other sovereign states take action against such elements within their sovereign territory and areas which they may control in neighboring countries. Elements include: (1) tailoring strategies to induce individual state sponsors of terrorism to change policies; (2) promoting international standards for combating terrorism; (3) eliminating sanctuaries; and (4) interdicting terrorist ground, air, maritime, and cyber traffic, in order to deny terrorists access to arms, financing, information, WMD materials, sensitive technology, recruits, and funding from illicit drug activities;
- **Diminishing** underlying conditions that terrorists exploit, by fostering economic, social, and political development, market-based economies, good governance, and the rule of law. Emphasis includes: (1) partnering with the international community to alleviate conditions leading to failed states that breed terrorism; and (2) using public

⁶ George W. Bush, *Address to a Joint Session of Congress and the American People*, Sept. 20, 2001

information initiatives to de-legitimize terrorism; and

- **Defending** U.S. citizens and interests at home and abroad to include protection of physical and cyber infrastructures.⁷

Perumusan “strategi 4 D” terhadap terorisme global – *defeat, deny, diminish, dan defend* – segera diberlakukan di wilayah Asia Selatan dan segera sesudah itu, strategi itu disebarkan ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Asia Tengah sampai ke Eropa. Karena lawan yang dihadapi sangat berbeda dari musuh-musuh konvensional, maka kebijakan baru ini memerlukan pemanfaatan menyeluruh dari semua kegiatan suatu pemerintah, yaitu diplomasi, ekonomi, militer, keuangan, penegakan hukum dan intelijen. Seluruh upaya harus ditujukan untuk menurunkan derajat ancaman teroris menjadi ancaman kriminal.

Usaha yang komprehensif ini kemudian menggeser fokus politik luar negeri AS dari tantangan geopolitik global ke arah perang terhadap terorisme. Tetapi dengan penekanan pada perang melawan terorisme AS tidak menurunkan ambisinya untuk melingkari RRC. Seperti dicatat harian *Guardian* pada 30 Januari 2002:

Every twist in the war on terrorism seems to leave a new Pentagon outpost in the Asia-Pacific region, from the former USSR to the Philippines. One of the lasting consequences of the war **could** be what amounts to a military encirclement of China.

Dalam perang melawan terorisme Amerika Serikat menentukan bahwa Afghanistan merupakan “an incubator of Islamic terrorists.” Pelatihan di daerah-daerah yang dikuasai Taliban, yang beraliansi dengan Osama bin Laden, memberi pengalaman pendahuluan bagi para teroris yang akan beroperasi menuju sasaran-sasaran yang jauh dari Afghanistan, termasuk ke Asia Tenggara.⁸

⁷ The White House, *National Strategy for Combating Terrorism*, February 2003, hlm. 11-12.

⁸ Paul R. Pillar, *Terrorism and U.S. Foreign Policy*, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2001, hlm. 47.

Bagi Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah, seorang tokoh Libanon, akar terorisme global sebenarnya dimulai di Afghanistan, yakni melalui pelatihan Mujahidin dalam perang mereka melawan Uni Soviet. Keterlibatan Amerika berupa bantuannya dalam segala hal memberi mereka budaya terorisme untuk melawan Uni Soviet yang kini dipakai dan diterapkan Al-Qaeda, Taliban dan Arab Saudi di seluruh Timur Tengah. “Amerikalah yang meluncurkan budaya terorisme yang mereka perangi sekarang,” kata Fadlallah sambil menunjuk kepada apa yang disebut CIA sebagai “blowback.” Fadlallah meramalkan bahwa selama kebijakan Amerika masih seperti apa yang mereka jalankan sekarang, dan selama masalah Palestina tidak ada penyelesaiannya, serta keadaan di Irak yang masih seperti saat ini, terorisme yang muncul di dunia Islam, dan bahkan di seluruh dunia, akan meningkat terus.⁹

Ada dua perkembangan yang memungkinkan penyebaran terorisme internasional secara cepat. *Pertama* ialah penyebaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pesatnya TIK ini sangat berdampak pada metoda operasi para teroris. Dampak paling utama dari TIK ialah perbaikan atas efisiensi semua kegiatannya. Komputer dan telpon satelit menjadi alat standar bagi media komunikasi kelompok-kelompok teroris. TIK mampu mempermudah operasi jarak jauh para teroris itu serta meminimalisasi kebutuhan akan suatu kehadiran fisik yang tetap dan besar. Karena itu kelompok-kelompok itu sangat mobil, dengan mudah dapat beroperasi dari tempat-tempat yang jauh sehingga keberadaan mereka yang tetap itu sangat sulit untuk ditemukan. Tapi dengan kemajuan TIK pula bisa sangat membantu gerakan anti-terorisme untuk melacaknya. Sinyal yang dapat ditangkap dari suatu komputer milik gerakan anti-teroris dapat memberikan informasi mengenai rencana dan kemampuan para teroris, sehingga memudahkan mereka mengejar teroris-teroris itu.

Kedua, perkembangan global yang mendukung kegiatan para teroris ialah peningkatan dan pemudahan gerak lintas batas. Hal ini

⁹ Paul Cochrane, Will U.S. Foreign Policy Increase Terrorism?, http://www.worldpress.org/article_model.cfm?article_id=2010&don't=yes, diakses 1 April 2005.

terjadi karena regionalisasi hubungan antarnegara semakin terbuka, seperti di Asia Tenggara karena pemberlakuan bebas visa di antara negara-negara pendiri ASEAN dan Brunei Darussalam, dan di Eropa dengan pembentukan Uni Eropa dengan Perjanjian Schengennya. Lagi pula, peningkatan eksponensial perjalanan internasional yang mengiringi globalisasi, dengan peningkatan jumlah pesawat yang terbang ke berbagai penjuru dunia dan peningkatan penumpang yang lebih besar memudahkan para teroris untuk menyelip di antara para penumpang. "What is good for international business executives, however, is also good for international terrorists."¹⁰

Arah Politik Luar Negeri AS di masa Kepresidenan Bush II

Selama pemerintahan Presiden Bush tahap pertama, menteri luar negeri dan menteri pertahanan mengemukakan pandangan yang saling bersaing dalam hal bagaimana mewujudkan politik luar negeri bagi Presiden. Pandangan menteri luar negeri pada umumnya mengemukakan pentingnya peran para sekutu, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pentingnya kewajiban-kewajiban internasional. Sebaliknya, pandangan menteri pertahanan cenderung untuk mencari penyelesaian suatu masalah internasional melalui penggunaan kekuatan militer AS. Ia sering pula mengemukakan pentingnya penyelesaian masalah-masalah internasional dengan menggunakan kekuatan militer.

Dalam masa pemerintahan Bush yang pertama ini, Menteri Luar Negeri Colin Powell seringkali mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi "kubu" gabungan kekuatan Wakil Presiden Dick Cheney dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dalam menjalankan politik luar negeri AS. Gabungan kekuatan itu, pada kenyataannya, lebih didengar oleh Bush yang pada akhirnya menunjuk kekuatan militer AS untuk menjalankan misi politik luar negerinya di Afghanistan dan Irak

Pertanyaannya kini, dalam masa Kepresidenan George W. Bush yang kedua apakah Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice

¹⁰ Pillar, *Op.cit.*, hlm. 48.

memilih pola departemen luar negeri (yakni pentingnya peran sekutu, PBB dan rambu-rambu internasional) dalam melaksanakan politik luar negeri Amerika Serikat ? Apabila ia memilih pola ini, apakah Presiden Bush akan beralih pula dari kecenderungan-kecenderungan unilateralnya? Menlu Condoleeza Rice ini mempunyai hubungan yang baik dengan Presiden Bush, tetapi kedekatannya itu akan dihadapkan pula dengan lawan-lawan politiknya yang kuat terutama dalam pertarungan antarlembaga mengenai pelaksanaan politik luar negeri.¹¹

Dalam *Inaugural Address* Presiden Bush dimasa kepresidenannya yang kedua ia menetapkan bahwa

It is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic movements and institutions in every nation and culture with the ultimate goal of ending tyranny in our world.

Dan dalam usaha ini

The United States has no right, no desire, and no intention to impose our form of government on anyone else. ... Our aim is to build and preserve a community of free and independent nations, with governments that answer to their citizens, and reflect their own cultures. And because democracies respect their own people and their neighbours, the advance of freedom will lead to peace.¹²

Touche, Presiden Bush, sebagaimana halnya dengan presiden-presiden Amerika lainnya, tidak sadar bahwa apa yang digariskan dalam politik luar negerinya senantiasa dipaksakan pada negara-negara lain, sehingga meluasnya sikap anti-Amerika merupakan suatu *surprise* bagi mereka.

¹¹ Parker Borg, Condoleeza Rice and American Foreign Policy in the Second Bush Administration, *Center for International Policy's National Security Project*, Fifth Column, 11 Februari 2005, <http://ciponline.org/nationalsecurity/articles/021105borg.htm>, diakses 17 Maret 2005

¹² State of the Union Address, 2 Februari 2005, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/print/20050202-11.html>

Selama ini seorang presiden dari partai Republik tidak biasanya mengemukakan kebijakan proaktif untuk merubah dunia. Hal yang biasanya ditekankan oleh Partai Republik selama ini ialah pentingnya memperkuat pertahanan nasional saja untuk melindungi kepentingan Amerika dari musuh-musuhnya. Dalam *State of the Union Address 2005* Bush mengucapkan:

In the three and a half years since September the 11th, 2001, we have taken unprecedented actions to protect Americans. We've created a new department of government to defend our homeland, focused the FBI on preventing terrorism, begun to reform our intelligence agencies, broken up terror cells across the country, expanded research on defenses against biological and chemical attack, improved border security, and trained more than a half-million first responders. Police and firefighters, air marshals, researchers, and so many others are working every day to make our homeland safer, and we thank them all.

Our nation, working with allies and friends, has also confronted the enemy abroad, with measures that are determined, successful, and continuing. The Al Qaeda terror network that attacked our country still has leaders -- but many of its top commanders have been removed. There are still governments that sponsor and harbor terrorists -- but their number has declined. There are still regimes seeking weapons of mass destruction -- but no longer without attention and without consequence. Our country is still the target of terrorists who want to kill many, and intimidate us all -- and we will stay on the offensive against them, until the fight is won. Pursuing our enemies is a vital commitment of the war on terror.

Dari *Inaugural Address 2004* dan *State of the Union Address 2005* Presiden Bush dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah utama dalam politik luar negeri AS ialah pertama-tama perang melawan terorisme dan usaha-usaha untuk mendorong perkembangan demokrasi, masalah Israel-Palestina, khususnya bagaimana AS melibatkan diri dalam perselisihan antara Israel dan Palestina, dan perang melawan penyebaran senjata nuklir, khususnya ke Iran dan Korea Utara. Dukungan bagi demokrasi merupakan semboyan perjuangan Condoleeza Rice yang mengidentikkan gerakan

pembentukan demokrasi di Timur Tengah, atau di mana pun di dunia dengan gerakan *Civil Rights* di Amerika sendiri. "We are not going to turn a blind eye to the human desire for freedom anywhere in the world," kata Rice kepada mahasiswa Sophia University di Tokyo pada 19 Maret 2005.¹³

Penegasan ini dibuat Menlu Rice juga pada *Annual State Department Iftar Dinner*, pada acara berbuka puasa tahunan di Departemen Luar Negeri AS pada 25 Oktober 2005. Ketika itu ia menegaskan bahwa "the right to live without oppression, the right to worship without persecution, and the right to think and speak and assemble without wrongful retribution" merupakan hak-hak azasi manusia yang berlaku bagi semua orang, "unanimously desired and universally deserved." Penegasan ini dibuatnya karena ia sendiri mengalami ketiadaan hak azasi dan kebebasan manusia bagi orang-orang Amerika hitam sewaktu ia hidup dan bersekolah di Birmingham, Alabama. Ia menyatakan bahwa semboyan "We the people" yang dicanangkan para pendiri Amerika Serikat tidak berlaku bagi dirinya dan orang-orang Amerika hitam lainnya, yaitu hak untuk hidup tanpa aniaya, hak untuk beribadah tanpa penganiayaan, dan hak untuk berpikir dan berbicara dan berkumpul tanpa melanggar undang-undang. Kini hak-hak itu telah berlaku bagi orang-orang Amerika hitam di Birmingham. Dan ia menegaskan bahwa hak-hak ini harus berlaku pula bagi orang-orang Amerika yang beragama Islam.

Memajukan dan menyebarluaskan demokrasi, disertai memajukan nilai-nilai Amerika adalah suatu tema yang senantiasa dikumandangkannya dalam setiap konferensi pers, wawancara dan ceramah yang ia berikan. Kepada tentara AS di Kabul dia berucap: "It's in the finest tradition of America that power comes with compassion . . . that strength comes with a belief in values."¹⁴ Kemudian, di Tokyo, pada 19 Maret 2005 pula, ia menggariskan visi

¹³ Glenn Kessler, Rice Gives Diplomacy New Focus
Secretary of State Reshapes State Department in White House Image,
Washington Post, 20 Maret 2005

¹⁴ *Ibid.*

AS yang baru tentang semakin pentingnya Jepang sebagai kekuatan global dan menantang China untuk bekerja lebih keras dan "embrace some form of open and generally representative government." ¹⁵

Di *Gumilyov Eurasian National University* di Astana, ibu kota Kazakhstan, pada 13 Oktober 2005, dalam suatu ceramah, Menlu Rice mengakui bahwa dalam membahas masalah demokrasi Amerika Serikat sendiri harus bersikap rendah hati karena di negara itu sendiri jaminan hak-hak demokrasi bagi semua warga negaranya belum lama diraihinya. Pertanyaan yang paling mendasar di sini ialah bagaimana menteri luar negeri AS ini mampu mendorong demokrasi di negara-negara di mana Amerika hadir dengan lebih mementingkan stabilitas politik, perdamaian dengan Israel, dan jaminan arus suplai minyak dari Timur Tengah dengan harga yang memadai?

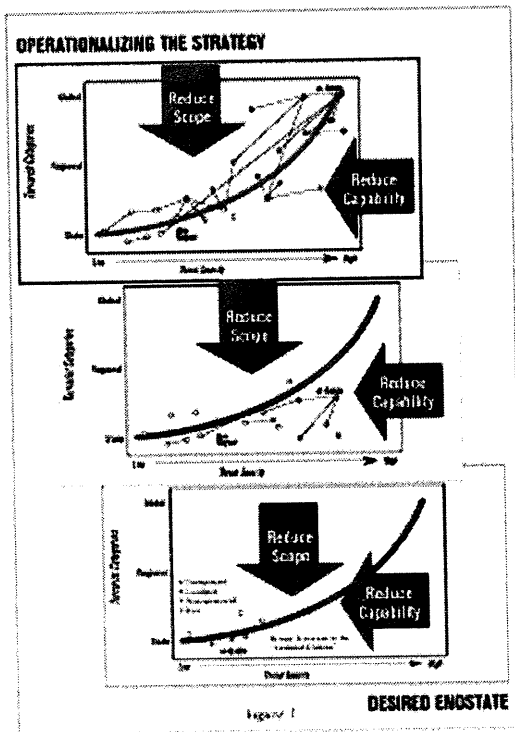
Pada satu tingkat yang lebih rendah, politik luar negeri AS ditujukan untuk menghadapi tersebarnya penyakit AIDS, kecenderungan Rusia menuju ke pemerintahan yang terpusat dan menguatnya *euro* sebagai mata uang global. Di dalam menjalankan politik luar negeri Amerika Serikat, Condoleeza Rice bermaksud untuk menghidupkan kembali diplomasi (*invigorate diplomacy*). Apa yang dimaksudkan dengan istilah itu? Secara tradisional diplomasi berarti suatu jalan dengan dua arah: kita menjelaskan segi pandangan kita tentang suatu masalah, lalu kita mendengarkan perspektif pihak-pihak lain tentang masalah itu, dan, apabila mungkin, kita menemukan penyelesaian atas masalah bersama yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak. Inilah kekurangan pemerintah Bush yang paling besar: tidak mengindahkan pandangan sekutu-sekutunya pada waktu pengambilan keputusan tentang suatu kebijakan.

Syarat-syarat untuk menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah ditentukan di Washington, ibu kota Amerika Serikat. Pada saat itulah muncul kritik utama kaum neokonservatif kepada mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell bahwa Powell tidak berhasil "menjual" politik luar negeri AS kepada sekutu-sekutunya bahkan

¹⁵ *Ibid.*

dunia. Dalam keadaan demikian, bagaimanakah Condoleeza Rice bisa menghidupkan kembali diplomasinya (*invigorate diplomacy*)?

Dalam perjalanannya ke Eropa, Presiden Bush berpesan bahwa AS akan “menaklukkan terorisme” dan “mendorong kebebasan dan demokrasi sebagai alternatif bagi tirani dan teror” (“encourage freedom and democracy as alternatives to tyranny and terror.”) Penaklukan terorisme sudah dicanangkan pemerintah Amerika Serikat seperti terpampang dalam grafik berikut:



Sumber: *U.S. National Strategy for Combating Terrorism*, February 2003, hlm. 9

Grafik ini menggambarkan operasionalisasi strategi perang Amerika Serikat terhadap terorisme internasional yang dijalankan Al-Qaeda secara global dan Abu Sayyaf secara regional. Operasi strategi anti-terorisme dilakukan dengan memperkecil jangkauan gerak dan kemampuannya (memporakporandakan gerakannya, melokalisasi gerakan itu ke dalam ruangan yang sekecil mungkin dan membasmi sponsor-sponsornya) sepanjang garis eskalasinya (garis lengkung), memusnahkannya sehingga gerakan terorisme itu kemudian lebih merupakan suatu kejahatan lintas batas biasa seperti perdagangan manusia, perempuan dan anak, narkoba, dan sebagainya.

Dapatkah Rice meyakinkan Presiden Bush untuk bertindak lebih lunak, lebih menyejukkan dalam menjelaskan strategi perang Amerika Serikat terhadap terorisme global kepada dunia internasional? Berhasil tidaknya akan meningkatkan atau menurunkan pamor Rice secara internasional. Memang, Menteri Luar Negeri Rice perlu membangun dirinya sebagai pemain yang penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri,

push solution forward on tough issues like Iran, Middle East peace, and North Korea, and demonstrate that she can be an effective salesperson for the US perspective around the globe. Under the best of circumstances, the tasks will be difficult, but she faces the additional challenge of the American unpopularity, particularly in Europe and the Middle East. While foreign policy should never be a popularity contest, her own effectiveness will also be judged by her ability to either change the way the President deals with the rest of the world or the way the rest of the world views George W. Bush.¹⁶

Politik Luar Negeri AS dan Reaksi Asia Tenggara

Dari uraian di atas tampaklah bahwa pemberantasan terorisme harus disertai dengan pembangunan dan pengembangan demokrasi dan kebebasan manusia secara global. Hal ini juga diberlakukan untuk Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Amerika Serikat perlu menyusun dan mengembangkan suatu pendekatan jangka panjang untuk Asia

¹⁶ Parker Borg, *Ibid.*

Tenggara dan sekaligus mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang peran China di wilayah ini. Kalau kita lihat pada masa Perang Dingin, pemerintah Amerika baru akan memberikan perhatian ke Asia Tenggara apabila ada masalah di mana ini bisa berpengaruh langsung maupun tak langsung kepada kepentingan Amerika.

Namun jauh sesudah itu, terutama pasca 11 September 2001, area Asia Tenggara pun muncul dalam peta perang Amerika melawan terorisme. Hal ini tampak, pertama, dalam penggelaran pasukan AS di Filipina Selatan di bulan Januari 2002 dalam rangka *counterinsurgency operations*. AS menyebut wilayah Asia Tenggara ini sebagai front kedua dalam perang melawan terorisme. Dua sebab mendasari sebutan ini: eksistensi *Jemaah Islamyiah* dan kaitan yang dianggap ada antara JI dan *Al-Qaeda* dan pemberontakan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Filipina Selatan. Ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002 merupakan peristiwa teror kedua di Asia Tenggara.

Terorisme memang tidak merupakan suatu gejala yang baru bagi negara-negara Asia Tenggara. Tetapi, manifestasi tindakan teror yang dialami Amerika Serikat pada 11 September 2001 dengan maksud untuk memporakporandakan suatu masyarakat juga mendapat reaksi keras di Asia Tenggara. Gejala 11 September 2001 itu menyadari negara-negara ASEAN bahwa terorisme juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Dampak terorisme internasional mendesak keamanan manusia ke belakang dan mengembalikan keamanan negara dalam *mindset* keamanan pemimpin-pemimpin ASEAN, meskipun faktor “kemanusiaan” masih muncul dalam reaksi pertama mereka terhadap serangan 11 September 2001 itu. Tetapi pernyataan mereka itu tidak menegaskan bahwa dalam memberantas terorisme, faktor keamanan manusia harus dijunjung tinggi.

Pada KTT VII ASEAN di Bandar Seri Begawan (5 November 2001), para pemimpin ASEAN dalam *Joint Action to Counter Terrorism* mengutuk serangan teroris tanggal 11 September 2001 sebagai suatu “serangan terhadap kemanusiaan dan suatu serangan

terhadap kita semua”. Mereka melihat terorisme sebagai suatu “tantangan langsung bagi tercapainya perdamaian, kemajuan dan kemakmuran ASEAN serta realisasi Visi ASEAN 2020, sambil menolak “setiap upaya untuk mengaitkan terorisme dengan agama atau ras manapun”. ASEAN juga sepakat untuk “menghadapi, menghindari dan menindas semua bentuk terorisme sesuai dengan Piagam PBB”. Semua upaya bersama untuk memerangi terorisme pada tingkat regional harus memperhatikan tindakan anti-terorisme bersama sesuai dengan keadaan di wilayah ini dan di setiap negara anggota. KTT VII tersebut mengeluarkan suatu rencana kerja sebanyak sembilan butir yang berkisar dari penguatan mekanisme nasional, meningkatkan kerja sama antara badan-badan penegak hukum, meningkatkan pertukaran informasi/intelijen, pembangunan kemampuan regional, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk memerangi terorisme di bawah payung PBB.

Sikap ASEAN tidak disertai dukungan kepada Amerika Serikat yang mengajak bekerja sama untuk menghadapi terorisme internasional. Kendatipun demikian, ASEAN membuat suatu deklarasi bersama dengan AS untuk bersama-sama memerangi terorisme internasional. ASEAN dan Amerika Serikat menandatangani *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* pada Sidang Menteri Luar Negeri dan *Post Ministerial Meeting* di Bandar Seri Begawan pada 1 Agustus 2002. Deklarasi itu menyatakan bahwa kedua belah pihak akan membangun suatu kerangka kerja sama “to prevent, disrupt and combat” terorisme internasional melalui pertukaran informasi, intelijen dan pembangunan kemampuan, khususnya memperbaiki intelijen dan penyebaran informasi tentang pembiayaan terorisme, dan “sharing on counter-terrorism measures, including the development of more effective counter-terrorism policies and legal, regulatory and administrative counter-terrorism regimes,” meningkatkan usaha pembangunan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan, konsultasi antarpejabat, analisis dan operator lapangan. Tetapi kerja sama ini harus sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, dan resolusi atau deklarasi PBB lainnya

tentang terorisme internasional, dan bukan pembangunan aliansi ASEAN-AS untuk memerangi terorisme internasional.

Dengan meningkatnya ketegangan agama, pemerintah negara-negara ASEAN harus mempertimbangkan bagaimana penganut agama Islam bereaksi terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan juga di Malaysia, Filipina, Singapura dan bahkan Thailand dengan penduduk Muslim yang hanya berjumlah 5 persen dari total penduduk.¹⁷

Di Asia Tenggara sendiri, ada perbedaan pandangan tentang jangkauan bahaya terorisme bagi wilayah ini. Pandangan Singapura sebagian besar sama dengan pandangan AS tentang hal ini: keduanya memandang terorisme yang bercirikan Islam sebagai bahaya utama bagi keamanan nasional dan regional. Tony Tan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator untuk Keamanan dan Pertahanan Singapura, menggambarkan terorisme sebagai “immediate security threat” yang dihadapi wilayah ini dan bahwa terorisme baru ini merupakan suatu “networked, multinational enterprise with a global reach which aims to inflict death and destruction on a catastrophic scale.”¹⁸ Singapura melihat ancaman terorisme di dalam negeri dan di sekitarnya sebagai akibat dari kerjasama kelompok radikal Islam lokal dengan jaringan teroris global Al Qaeda. Eddie Teo, seorang pejabat di Kantor Perdana Menteri Singapura di *Brookings Institution*, AS, menyatakan bahwa

It may not be politically correct to focus on the relationship between Islam and terrorism. However, the common thread that seemed to united JI members was their desire for spiritual revival...What they were...taught was that to be a good, genuine Muslim, you would

¹⁷ C.P.F. Luhulima, Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara, *Analisis*, Tahun XXXII, No. 1/2003

¹⁸ *Agence France Press* 2002

have to hate the West, bring down secular, pro-Western governments in the region and pave the way for an Islamic regional government.¹⁹

Penutup

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang hegemonis yang dicanangkan Presiden George W. Bush untuk kepentingan nasional Amerika *by default* dianggap baik bagi dunia internasional. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa semakin sedikit pusat-pusat kekuatan di dunia, semakin stabil sistem internasional yang dikembangkan, karena semakin sedikit kekuatan-kekuatan yang bersaing, semakin sederhana peraihan keseimbangan dalam percaturan global.

Sasaran pemerintah Bush dengan pengecilan lingkaran pusat kekuatan ini menuju hegemonisme hendak diraih dengan mentransformasi angkatan bersenjata Amerika dengan memanfaatkan revolusi dalam teknologi sistem persenjataan, memperkecil jumlah negara yang memiliki senjata nuklir, menyegarkan kembali persekutuan-persekutuan yang ada, menciptakan “partnerships” dengan negara-negara melalui berbagai “coalitions of the willing”, dan memperluas orde ekonomi pasar melalui usaha-usaha integrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya pembangunan hegemoni Amerika ini mendapat dorongan yang luar biasa dengan serangan terhadap WTC pada bulan September 2001. Pembangunan hegemoni itu kini diarahkan pada memerangi teroris secara global, khususnya gerakan Al Qaeda. Strategi pemerangan terorisme yang dikembangkan ialah *defeating, denying, diminishing, defending* – strategi 4 D, yang segera diterapkan di Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Asia Tengah sampai ke Eropa.

¹⁹ Dikutip Amitav Acharya, *Terrorism and Security in Asia: Redefining Regional Order?*, Asia Research Centre, Murdoch University, Working Paper No. 113, October 2004, hlm. 2-3.

Karena lawan yang dihadapi sangat berbeda dari musuh-musuh konvensional, maka kebijakan baru ini memerlukan pemanfaatan menyeluruh dari semua kegiatan suatu pemerintah, yaitu diplomasi, ekonomi, militer, keuangan, penegakan hukum dan intelijen. Seluruh upaya harus ditujukan untuk menurunkan derajat ancaman teroris menjadi ancaman kriminal. Operasi strategi anti-terorisme dilakukan dengan memperkecil jangkauan gerak dan kemampuannya (memporakporandakan gerakannya, melokalisasi gerakan itu ke dalam ruangan yang sekecil mungkin dan membasmi sponsor-sponsornya) sepanjang garis eskalasinya (garis lengkung), memusnahkannya sehingga gerakan terorisme itu kemudian lebih merupakan suatu kejahatan lintas batas biasa seperti perdagangan manusia, perempuan dan anak, narkoba, dan sebagainya. (*Desired Endstate*)

Sejajar dengan strategi anti-terorisme Presiden Bush, Amerika Serikat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan demokrasi dan lembaga-lembaganya dengan sasaran akhir untuk memerangi terorisme dan tirani di dunia. Dan kedua strategi ini diperjuangkan dengan sangat bersemangat oleh menteri luar negeri Condoleeza Rice. Memajukan dan menyebarkan demokrasi, disertai memajukan nilai-nilai Amerika adalah suatu tema yang senantiasa dikumandangkannya dalam setiap konferensi pers, wawancara dan ceramah yang ia berikan, di Sophia University di Tokyo, di Gumilyov Eurasian National University di Astana, Kazakhstan.

Tetapi pertanyaan yang mendasar ialah bagaimana menteri luar negeri AS mendorong demokrasi di negara-negara di mana Amerika lebih mementingkan stabilitas politik, perdamaian dengan Israel, dan jaminan arus suplai minyak dari Timur Tengah dengan harga yang memadai?

Hasrat untuk membangun dan mengembangkan demokrasi juga diperjuangkan di Asia Tenggara. Sesudah 11 September 2001, Asia Tenggara pun muncul dalam perang melawan terorisme. Hal ini tampak, pertama, dalam penggelaran pasukan AS di Filipina Selatan di bulan Januari 2002 dalam rangka *counterinsurgency operations*. AS menyebut wilayah ini sebagai front kedua dalam perang melawan

terorisme. Dua sebab mendasari sebutan ini: eksistensi *Jemaah Islamyiah* dan kaitan yang dianggap ada antara JI dan *Al Qaeda* dan pemberontakan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* di Filipina Selatan.

Gejala 11 September 2001 itu menyadarkan negara-negara ASEAN bahwa terorisme juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Dampak terorisme internasional mendesak keamanan manusia ke belakang dan mengembalikan keamanan negara dalam *mindset* keamanan pemimpin-pemimpin ASEAN, meskipun faktor “kemanusiaan” masih muncul dalam reaksi pertama mereka terhadap serangan 11 September 2001 itu. Tetapi pernyataan mereka itu tidak menegaskan bahwa dalam memberantas terorisme, faktor keamanan manusia harus dijunjung tinggi, seperti halnya di Amerika Serikat. Ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002 merupakan peristiwa yang mengejutkan negara-negara ASEAN, bahwa ancaman terorisme berada di dalam rumah mereka.

ASEAN dan Amerika Serikat menandatangani *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* pada Sidang Menteri Luar Negeri dan *Post Ministerial Meeting* di Bandar Seri Begawan pada 1 Agustus 2002. Deklarasi itu menyatakan bahwa kedua belah pihak akan membangun suatu kerangka kerja sama “to prevent, disrupt and combat” terorisme internasional melalui pertukaran informasi, intelijen dan pembangunan kemampuan, khususnya memperbaiki intelijen dan penyebaran informasi tentang pembiayaan terorisme, dan “sharing on counter-terrorism measures, including the development of more effective counter-terrorism policies and legal, regulatory and administrative counter-terrorism regimes,” meningkatkan usaha pembangunan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan, konsultasi antarpejabat, analisis dan operator lapangan.

Bab 3

RESPON MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP DOKTRIN “ANTI-TERRORISME” AS

Riza Sihbudi

Tragedi 9/11 benar-benar sangat memilukan. Sulit dipastikan, berapa nyawa yang sebenarnya menjadi korban dalam tragedi ini. Tepat sekali jika ini disebut sebagai Tragedi Nasional bagi Amerika Serikat. Tragedi 9/11 memunculkan perubahan paradigma tentang “keamanan dan ancaman nasional,” khususnya bagi AS dan negara-negara sekutunya, di mana kelompok *Hawkish* kemudian berhasil memaksa Presiden George W. Bush untuk merealisasikan doktrin “pre-emptive strike”, sebuah doktrin yang membenarkan AS untuk menghancurkan pihak mana pun yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan nasional mereka. Artinya, siapa pun atau negara mana pun yang oleh AS dianggap “mengancam” harus dihancurkan terlebih dulu sebelum ancaman itu menjelma menjadi kenyataan.

Salah satu pernyataan Bush yang sangat menonjol setelah tragedi 9/11 adalah “either you’re with us or with the terrorist.” Bersama doktrin “pre-emptive strike”, pernyataan Bush ini menjadi salah satu inti doktrin “anti-terorisme” AS yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi. Sebab, Bush seakan-akan telah menempatkan bangsa-bangsa di dunia hanya dalam satu pilihan, yaitu menjadi kawan atau lawan bagi AS. Negara atau bangsa mana pun yang tidak mau mendukung doktrin “anti-terorisme”, dengan sendirinya akan ditempatkan dalam posisi sebagai musuh AS. Sudah tentu pandangan “hitam-putih” ini disikapi secara kritis oleh sejumlah kalangan, termasuk masyarakat Indonesia.

Pada bab ini dibahas lima hal yang mendapat respon dari sejumlah kalangan masyarakat Indonesia (di Solo dan Denpasar) terkait dengan doktrin “anti-terorisme” yang dikembangkan pemerintahan AS di bawah GW Bush serta implikasinya bagi

Indonesia. Kelima hal tersebut adalah, (1) silang pendapat tentang isu Jamaah Islamiyah; (2) perdebatan tentang apa itu terorisme; (3) kecenderungan untuk menyamakan fundamentalisme dengan terorisme; (4) adanya kampanye disinformasi yang mendapat sorotan tajam (terutama dari kalangan muslim yang merasa disudutkan dengan isu terorisme); serta (5) adanya dugaan konspirasi terhadap Islam dalam doktrin “anti-terorisme” AS.

Respon Masyarakat tentang Jamaah Islamiyah

Jika nama kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden mendadak begitu populer di seantero dunia setelah tragedi 9/11, maka nama kelompok Jamaah Islamiyah (JI atau KJI) menjadi populer setelah Tragedi 12 Oktober 2002 di Legian, Bali.¹ Al-Qaeda dan Bin Laden, oleh Pemerintah AS dituding sebagai "dalang utama" serangan terhadap simbol-simbol kedigdayaan negara superpower itu, dan karena itu sejak tragedi 9/11 dianggap sebagai musuh utama AS. Namun, seorang narasumber di Solo (10 Mei 2005) mempertanyakan validitas tudingan ke arah Al-Qaeda dan Osama bin Laden itu, lantaran tidak adanya pengadilan internasional (sekalipun *in absentia*) yang adil dan terbuka. Sedangkan JI dituduh oleh Pemerintah Australia—yang warganya menjadi korban terbanyak di Bali—sebagai "dalang utama" pengeboman di kawasan Legian. Oleh

¹ Menurut Irfan S. Awwas (Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin), “Padahal JI, seperti diceritakan Ustadz Iqbal Abdurrahman alias Abu Jibril yang dideportasi pemerintah Malaysia ke Indonesia, 14 Mei 2004, adalah istilah yang dibuat polisi Malaysia. Ketika sejumlah pemuda Islam Malaysia ditahan, 2001, di bawah UU Keamanan Dalam Negeri (ISA) dalam interograsi polisi menanyakan: "Siapa guru kalian?" "Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Ustadz Iqbal," jawab mereka. "Apa nama kumpulan kalian?" "Kami hanya jamaah pengajian biasa, tidak ada namanya." "Kalau begitu kalian disebut Jamaah Islamiyah saja." Kemudian, persis seperti yang dilakukan Ali Moertopo dengan menciptakan istilah Komji (Komando Jihad) di masa Orde Baru, yang kemudian dijadikan alasan menangkap eksponen DI/TII dengan tuduhan subversi.” Lihat, Irfan S. Awwas, “Sidney Jones dan Terorisme,” *Republika* (11 Juni 2004).

berbagai media massa, JI dianggap sebagai "cabang" Al-Qaeda di Asia Tenggara, khususnya Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Hanya sehari setelah terjadi Tragedi 12 Oktober, Australia sudah dapat memastikan bahwa pelaku utamanya adalah kelompok JI. Padahal, waktu itu aparat keamanan Indonesia yang bekerja keras di lapangan masih belum menemukan bukti-bukti otentik. Ironisnya, hal serupa dinyatakan pula oleh Menhan RI (waktu itu) Matori Abdul Djilil, yang dalam tiga kesempatan terpisah mengaku sangat yakin bahwa pelaku pengeboman Legian adalah jaringan Al-Qaeda. Padahal, Menko Polkam (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali menegaskan belum menemukan bukti keterlibatan Al-Qaeda dan JI dalam Tragedi 12 Oktober.

Dalam sidangnya pada 26 Oktober 2002, Dewan Keamanan PBB secara resmi memasukkan JI sebagai kelompok teroris yang ke-88. Sebab itu, PBB memerintahkan kepada semua anggotanya untuk:

- (1) membekukan seluruh aset JI;
- (2) tidak memberikan fasilitas apa pun kepada JI; dan
- (3) mencegah JI melakukan transaksi persembajanaan.

Resolusi DK PBB No. 1267 itu didukung sepenuhnya oleh semua negara anggotanya. Departemen Luar Negeri RI pun termasuk yang mengusulkan kepada PBB agar JI dimasukkan ke dalam daftar kelompok-kelompok teroris internasional, kendati Menko Polkam membantahnya. "Indonesia tidak melakukan langkah inisiatif untuk mendorong negara-negara atau pihak-pihak lain untuk mendeklarasikan JI sebagai teroris internasional," kata Yudhoyono, 24 Oktober 2002.

Silang pendapat soal JI sebenarnya juga tidak hanya muncul di kalangan pemerintahan, tetapi juga di kalangan masyarakat (termasuk ormas, pers, dan para pengamat). Sejumlah tokoh Islam, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa JI sama sekali tidak dikenal di kalangan *mainstream* gerakan-gerakan Islam "radikal" di Indonesia. Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, nama JI tidak ada dalam daftar organisasi/kelompok

Islam yang diakui keberadaannya di republik ini. Namun, sebagian media massa dan para pengamat meyakini adanya jaringan JI di Indonesia. Menurut mereka, Abubakar Ba'asyir adalah bagian dari jaringan JI.² Padahal, Resolusi 1267 DK PBB itu hanya memunculkan nama Abdullah Sungkar (alm) sebagai pimpinan JI, sedangkan nama Ba'asyir sama sekali tidak disebut-sebut.

Selama pelaku sesungguhnya dari Tragedi Bali 2002 belum ditemukan, maka kontroversi soal JI terus berlanjut. "Skenario" AS-Australia-Singapura sudah jelas terbaca. Bagi mereka, pelaku peledakan Legian adalah orang/kelompok Muslim, JI atau Al-Qaeda. Skenario ini didukung sepenuhnya oleh sejumlah media massa dan para pengamat, yang secara langsung atau tidak langsung berorientasi atau berafiliasi pada kekuatan-kekuatan politik sekuler dan pro-AS. Tujuan mereka pun jelas, yaitu menghambat atau kalau bisa melemahkan posisi gerakan-gerakan Islam Indonesia yang belakangan makin vokal dalam menyuarakan sikap mereka, baik dalam konteks penerapan ajaran Islam maupun penentangan mereka terhadap konspirasi AS-Israel di tingkat global dan konspirasi AS-Australia-Singapura di tingkat regional (kawasan Asia). Mereka sama sekali menafikan kemungkinan adanya pelaku/aktor lain dalam kasus pengeboman Legian.³

² Lihat, misalnya, wawancara Sidney Jones di majalah *Tempo* (edisi 28 Oktober 2002) dan dikutip lagi oleh majalah yang sama pada edisi 10 November 2002. Anehnya, ketika kemudian proses pengadilan tidak mampu membuktikan keterlibatan Ba'asyir dalam kasus JI dan terorisme, Sidney Jones mengatakan adanya kelompok lain di luar JI yang lebih radikal, dan melarang keberadaan JI hanya "akan lebih bersifat simbolis daripada dampak yang betul-betul praktis." Lihat, "Di Tengah Persaingan Teroris, Bermanfaatkah Melarang Jamaah Islamiyah" dalam <http://www.rnw.nl/in/berita/gemawarta.html> (9 Oktober 2005), dan "Azahari dan Noordin Bentuk Kelompok Baru," dalam *Kompas* (4 Oktober 2005).

³ Seorang wartawan majalah *Time* menceritakan pengalamannya yang menarik. Ketika dia menemukan indikasi keterlibatan aktor lain dalam kasus Bali, atasannya tidak mau menerima, karena sang bos hanya mau

Memang, ada perkembangan yang sangat tidak sehat dari arus informasi pasca 9/11, yaitu muncul kecenderungan kuat untuk menjadikan opini sebagai barang "bukti material". Artinya, seorang Abubakar Ba'asyir (Amir Majelis Mujahidin Indonesia) yang belum tentu bersalah, bisa dijadikan sebagai terdakwa hanya karena gencarnya informasi dan opini yang sistematis dan terus-menerus yang menyudutkannya.⁴ Seorang narasumber kami di Denpasar (10 Juli 2005) bahkan mengatakan bahwa sejak awal aparat keamanan memang sangat menghendaki dikaitkannya Ba'asyir dengan kasus terorisme, padahal ada seorang "ustaz" lain yang patut dicurigai (bernama Zulkarnaen) justru tidak ditangkap.

Padaahal, Tragedi 12 Oktober sesungguhnya menyimpan banyak kemungkinan. Keterlibatan jaringan intelijen asing yang profesional (CIA, Mossad, M16), misalnya, seharusnya tidak diabaikan begitu saja. Dalam pandangan seorang narasumber:⁵

"...Maka muncullah, mungkin yang dituduhkan kepada Indonesia dengan peristiwa bom Bali, yang kita juga tidak tahu apakah memang seperti itu kejadiannya. Atau di situ memang ada *black intelligent*...,"

Begitu pula kemungkinan terlibatnya elemen-elemen ("oknum") tertentu di tubuh aparat intelijen, kepolisian, dan militer, serta jaringan sisa-sisa Orde Baru yang masih kuat.⁶ Atau bisa juga, seperti disinyalir beberapa kalangan, pelaku/aktor utama peledakan

orang/kelompok muslimlah yang harus dijadikan sebagai tertuduh utama. Sebab itu, opini harus diarahkan ke kelompok muslim.

⁴ Penangkapan atas Abubakar Ba'asyir sudah bisa diperkirakan bahkan kurang dari satu bulan sejak terjadi kasus bom Bali 12 Oktober 2002. Lihat misalnya, "Stigmatisasi Terorisme Pada Islam Kian Diperluas," *Antara Online* (10 November 2002).

⁵ Pandangan seorang narasumber dalam FGD (*Focused Group Discussion*) tim P2P-LIPI di Solo (10 Mei 2005).

⁶ Dalam salah satu kesempatan, sebagaimana diberitakan *Metro TV* (30 Oktober 2002), cendekiawan muslim Dr. Nurcholish Madjid, mengatakan ada tiga kemungkinan siapa pelaku bom Bali: (1) konspirasi kekuatan asing; (2) terorisme internasional; (3) konspirasi domestik.

bom Bali adalah mereka yang bergelut di dunia hitam, seperti para mafia narkoba.⁷

Menjadikan Jamaah Islamiyah (yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai "umat Islam") sebagai satu-satunya tertuduh dalam kasus Bali 2002, pada hakikatnya sama saja dengan stigmatisasi terhadap kaum muslim di Indonesia.⁸ Atau, jang-jangan Indonesia memang sedang didorong untuk kembali ke era 1980-an, ketika rezim Soeharto yang militeristis itu melakukan penindasan terhadap gerakan-gerakan Islam (ingat kasus-kasus Tanjungpriok, Talangsari, Haor Koneng, Komando Jihad dan sebagainya), dan (kemudian) juga terhadap siapa pun yang memperjuangkan demokrasi serta HAM. Menurut seorang narasumber,

“...yang namanya Komando Jihad, sampai saat ini tidak ada orang yang tahu siapa komandannya, dianggap sudah hilang ditelan angin begitu...”⁹

Problem Definisi

Serangan teroris 9/11 menimbulkan kemarahan dari warga masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat di Indonesia. Saat itu sejumlah warga Indonesia ikut memberikan simpati pada para korban serangan 9/11, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk peletakan karangan bunga di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, seraya melakukan demonstrasi yang mengutuk para teroris. Siapa pun

⁷ Sinyalemen ini pernah dilontarkan seorang pejabat tinggi kepolisian di Bali tidak lama setelah terjadi tragedi 12 Oktober 2002.

⁸ “Kata kuncinya dengan memakai kasus peledakan Bali, maka cap terorisme pada Islam itu menjadi wilayah konflik terbuka, tidak lagi atas tekanan global, di dalam negeri sendiri kondisinya adalah pertentangan antara pemerintah dan simbol ke-Islaman,” kata Drs Denny Hernawan, MA, lulusan Universitas Wisconsin (AS) yang juga dosen di Unida Bogor itu. Lihat, “Stigmatisasi Terorisme Pada Islam Kian Diperluas,” *Antara Online* (10 November 2002).

⁹ Pendapat seorang narasumber dalam FGD tim P2P-LIPI di Solo (10 Mei 2005).

pelaku di balik aksi serangan 9/11 memang layak mendapat kutukan yang sekeras-kerasnya. Namun, mengutuk saja tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi AS memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap pihak-pihak yang dicurigai, tanpa adanya bukti akurat. Osama bin Laden sudah dituding sebagai berada di belakang tragedi 9/11.¹⁰ Sebenarnya bukan hal baru kalau Osama didakwa berada di balik kasus-kasus terorisme internasional. AS pun sudah melancarkan serangan besar-besaran ke Afghanistan dan Irak, yang dituding bekerjasama dengan Osama.

Banyak negara yang sudah menyatakan dukungannya pada AS. Namun, ada juga yang bersikap kritis terhadap kebijakan AS. Salah satunya, sekutu AS sendiri di Dunia Islam, yaitu Mesir. Presiden Housni Mubarak dengan tegas menolak untuk bergabung dengan "koalisi anti-terorisme internasional" yang disponsori AS. Mubarak lebih suka jika terlebih dulu PBB mengadakan sebuah konferensi guna menyamakan persepsi masyarakat dunia tentang "terorisme internasional." Memang, hingga saat ini masih muncul kontroversi soal apa yang sebenarnya disebut sebagai "terorisme internasional."

Sejak 1980an terorisme bahkan menjadi salah satu istilah yang populer. Terorisme, bersama istilah-istilah lain seperti, "fundamentalisme", "radikalisme", dan "militanisme", umumnya dipopulerkan oleh para pakar sosial-politik Barat,¹¹ yang kemudian disebar-luaskan oleh media massa tanpa berusaha mencari makna sebenarnya dari istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut

¹⁰ Sekalipun validitas tuduhan pemerintah Bush terhadap Osama dan Al-Qaeda sebagai pelaku utama serangan 9/11 semakin banyak dipertanyakan sejumlah kalangan di negara-negara Barat, termasuk di AS sendiri. Lihat misalnya, Thierry Meyssan, *Bohong Besar Amerika: Menjungkirbalikkan Seluruh Versi Resmi Serangan 11 September 2001*, terjemahan (Bandung: Penerbit Jalan Lurus, 2003). Lihat juga, film dokumenter karya jurnalis AS, Dave vonKleist, *911 In Plane Site*.

¹¹ Sudah tentu nama-nama seperti Edward Said, Paul Findley, Roger Garaudy, dan Noam Chomsky, harus dikecualikan, karena selama ini pandangan mereka yang lebih obyektif dalam masalah terorisme.

umumnya dikaitkan dengan tingkah laku politik sebagian besar komunitas Islam yang berkonotasi negatif,¹² dalam arti tidak disukai pihak Barat. Dengan kata lain, setiap tindakan—yang sebenarnya bersifat reaktif—yang dilancarkan warga Muslim yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan Barat, maka ia disebut terorisme. Akibatnya, setiap mendengar istilah terorisme maka yang langsung terbayang adalah Osama bin Laden, Mullah Umar, Yasser Arafat, Abubakar Ba'asyir, Jamaah Islamiyah, Hamas, Hizbullah, dan Jihad Islam.

Shireen T. Hunter,¹³ misalnya, secara terang-terangan menuduh bahwa, “There are many similarities in the Iranian, Syrian, and Libyan uses of the terrorism as an instrument of policy”. Pandangan ini jelas mencerminkan stereotipe Barat terhadap komunitas Islam yang tidak mereka sukai. Di sisi lain, tindakan Israel yang merugikan pihak Muslim, tidak pernah sekalipun disebut terorisme. Sehingga, pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Muslim Palestina yang tak berdosa atau aksi pemboman dan embargo AS yang telah mengakibatkan ribuan warga sipil (termasuk bayi-bayi) Afghanistan dan Irak tewas atau cacat seumur hidup, tidak disebut sebagai terorisme melainkan “aksi pembalasan”, “respons”, atau “pencegahan”.¹⁴

Tapi, apa sebetulnya definisi terorisme? Di kalangan pakar sosial-politik Barat sendiri sebenarnya belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. “Terrorism has been defined in various ways by different scholars”, tulis Kent Layne Oots.¹⁵ Roberta Goren juga mengakui adanya “definitional problems” untuk istilah

¹² Daniel Pipes, misalnya, pernah menulis bahwa “*the Middle East has special importance for terrorism*”. Pipes dikenal sebagai pemikir dan sekaligus politisi kelompok *Hawkish* atau Neokonservatif.

¹³ Shireen T. Hunter, “Terrorism: A Balance Sheet,” dalam *The Washington Quarterly* (Summer 1989).

¹⁴ Noam Chomsky, *Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?* (Bandung: Mizan, 2001).

¹⁵ Kent Layne Oots, *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism* (1986)

terorisme. J. Bowyer Bell dalam bukunya, *Transnational Terror*, mengatakan bahwa terorisme adalah senjata kaum lemah, tapi ia merupakan senjata yang sangat ampuh. David Fromkin¹⁶ membedakan antara terorisme dan aksi militer. Katanya, "military action is aimed at physical destruction while terrorism aims at psychological consequences." Brian Michael Jenkins memandang terorisme sebagai "a new form of warfare". Dan, Antal Deutsch melihat terorisme sebagai "a low-cost type of warfare between major powers." Sementara itu Jeffrey Ian Ross dan Ted Robert Gurr,¹⁷ mendefinisikan terorisme internasional sebagai, "terrorism carried out by autonomous nonstate actors and affecting nationals of at least two states". Lalu, di tengah "kebingungannya" mencari definisi terorisme yang tepat, Oots mencoba merumuskan seperangkat definisi istilah tersebut yaitu,

"Terrorism may be: (1) a psychological or military act designed to create fear, or cause material or economic destruction; (2) a method of constraining the behavior of others, this is often done through attacks on victims other than the real target to act; (3) a crime committed for publicity; (4) a crime with a political purpose; (5) as purposive violence. (6) a criminal act committed for political or economic gain".

Akan tetapi yang paling tepat tampaknya apa yang dikemukakan Fathi Osman. Dalam salah satu kolomnya di majalah *Arabia*,¹⁸ Osman antara lain mengatakan bahwa suatu kesulitan besar dalam membahas terorisme adalah masalah definisinya. Jika terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, maka semua aksi militer pun menggunakan kekerasan. Jika kita menganggap terorisme sebagai tindakan menyakiti atau melukai orang tak berdosa, maka penggunaan senjata berat dalam

¹⁶ *Contemporary Terrorism* (editor: John D. Elliot & Leslie K. Gibson)

¹⁷ Jeffrey Ian Ross dan Ted Robert Gurr, "Why Terrorism Subsides," dalam *Comparative Politics* (Juli 1989).

¹⁸ *Arabia* (Agustus 1985).

peperangan pun jelas merupakan tindakan yang menyakiti atau melukai ribuan atau jutaan orang tak berdosa.

Menurut Noam Chomsky, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah (penguasa) yang ditujukan untuk menjamin ketaatan rakyat. Dengan kata lain, istilah itu digunakan untuk merujuk pada kekuatan koersif (pemaksa/penekan)—sebagai lawan kekuatan persuasif (pembujuk)—suatu rezim yang berkuasa. Dengan demikian, menurut Chomsky, arti aslinya terlupakan, dan istilah terorisme lalu diterapkan terutama untuk “terorisme pembalasan” oleh individu atau kelompok.¹⁹

Jadi, tuduhan yang dilancarkan AS terhadap Afghanistan dan Irak (belakangan juga Iran) sebagai pendukung aksi terorisme internasional yang menghancurkan WTC dan Pentagon, pada hakekatnya bersifat sangat subyektif, stereotipe, dan cenderung semena-mena. Jika para “teroris muslim” harus dihukum, maka para teroris yang berada di balik topeng “aksi pembalasan,” “respons” atau “pencegahan,” seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama. Apa yang dilakukan para aktor non-negara terhadap berbagai kepentingan publik jelas merupakan tindak kekerasan yang dapat digolongkan sebagai terorisme. Namun, aksi kekerasan negara-negara tertentu yang menimbulkan korban di kalangan warga sipil,

¹⁹ Sangat menarik apa yang diungkapkan St. Augustine—sebagaimana dikutip Chomsky—yang menuturkan cerita tentang seorang bajak laut (perompak) yang tertangkap oleh Kaisar Alexander the Great. Alkisah, terjadilah dialog antara sang Kaisar dan sang perompak. “Mengapa kamu berani mengacau lautan?”, tanya Alexander. “Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia? Karena aku melakukannya hanya dengan sebuah perahu kecil, aku disebut maling; kalian, karena melakukannya dengan kapal besar, disebut Kaisar”, jawab sang perompak. Ilustrasi itu menggambarkan secara sangat tepat tentang hubungan antara “terorisme” negara yang dilakukan si kuat terhadap si lemah di satu sisi, dan di sisi lain, aksi-aksi “terorisme” yang dilakukan Hamas terhadap Israel, atau yang dilakukan kelompok Osama terhadap kepentingan AS. Hal ini menjelaskan arti sebenarnya dari istilah terorisme internasional. Lihat, Chomsky, *Maling Teriak Maling*.

seperti di Palestina, Afghanistan, dan Irak pun juga jelas merupakan aksi terorisme. Oleh sebab itu, memandang masalah terorisme haruslah secara adil dan tidak menggunakan standar ganda.

Fundamentalis = Teroris ?

Sekalipun serangan teroris 9/11 secara umum dikecam oleh masyarakat Indonesia, namun dalam menyikapi doktrin anti-terorisme versi AS, respon masyarakat Indonesia bisa dikatakan "terbelah" antara yang pro dan kontra. Mereka yang pro umumnya berasal dari kalangan sekuler, sementara yang kontra umumnya berasal dari para tokoh muslim. Penolakan dari kalangan tokoh muslim umumnya lantaran mereka melihat doktrin Bush itu sebagai bagian dari sikap permusuhan AS terhadap Islam. Namun, sebagian kalangan aktivis pembela hak-hak asasi manusia juga menolak doktrin Bush itu, karena doktrin ini dilihat sebagai bagian dari pengurangan hak-hak sipil warga negara. Peristiwa 9/11 memang tidak hanya memunculkan perubahan paradigma tentang "keamanan dan ancaman nasional," khususnya bagi AS dan negara-negara sekutunya, tapi peristiwa 9/11 juga setidaknya-tidaknya telah memunculkan dua fenomena yang sangat mewarnai percaturan politik internasional sejak tahun 2001.

Pertama, makin meningkatnya ketegangan hubungan antara AS dan Dunia Islam, di mana "perang melawan terorisme" yang dideklarasikan AS pasca 9/11 semakin—tidak terkendali dan—mengarah ke perang melawan kaum Islam "fundamentalis." Ketegangan ini disulut oleh realitas bahwa dua negara (Afghanistan dan Irak) yang menjadi korban pembalasan aksi 9/11 adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.²⁰ Selain itu, AS cenderung menyamaratakan semua kelompok Muslim "fundamentalis" dengan "teroris". AS tidak segan-segan menekan para penguasa yang dianggap sebagai sekutunya untuk "membasmi" gerakan atau

²⁰ Kendati Irak di bawah Saddam tidak bisa disebut sebagai sebuah "negara Islam," karena ideologi Ba'athisme yang dianut rezim yang berkuasa saat itu berlandaskan pada paham sosialisme sekuler.

kelompok “fundamentalis” Muslim di negara-negara mereka. Akibatnya, di sejumlah negara terjadi ketegangan antara penguasa yang sekuler dengan para aktivis Islam, seperti yang dialami Indonesia dan Pakistan.

Apalagi AS cenderung tidak berhenti sampai di Afghanistan atau Irak saja. Setelah invasi ke Irak, negara-negara Muslim lainnya seperti Iran atau Suriah menjadi target AS berikutnya sebagai konsekuensi dari doktrin “perang melawan terorisme” yang dianut dan dijalankan Bush. Bagi Bush dan kaum *Hawkish* pendukungnya, dalih untuk itu pun sudah cukup “kuat” yaitu, program senjata nuklir Iran dan Suriah serta “keterkaitan” Teheran dan Damaskus dengan jaringan Al-Qaeda.²¹ Dua alasan yang pada awal 2003 juga dipakai AS untuk menyerang dan menduduki Irak.

Kendati setelah kegagalan AS (juga Inggris) dalam membuktikan kebenaran tuduhan mereka terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) Irak serta keterkaitan Saddam Hussein dengan jaringan Al-Qaeda, membuat Bush tampak lebih berhati-hati, namun dengan berbagai macam cara serangan ke Iran atau Suriah jelas bukan suatu pilihan yang diabaikan. Apalagi AS dianggap gagal total dalam operasinya di Irak, sehingga mereka membutuhkan “kambing hitam” baru, yaitu Iran atau Suriah.

Kedua, kecenderungan uniteralisme AS yang makin kuat—sebagaimana terlihat dari kasus serangan dan kemudian pendudukan AS atas Irak—yang pada gilirannya makin melemahkan kredibilitas PBB di mata masyarakat internasional. Memang sungguh ironis, PBB yang pembentukannya antara lain disponsori oleh AS sendiri guna menciptakan perdamaian dunia, sejak terjadinya invasi AS ke Irak praktis justru menjadi lembaga internasional yang seperti tidak ada artinya di mata AS.

²¹ Sebuah undang-undang “anti-Suriah” sudah disahkan di AS. Artinya, tinggal selangkah lagi Suriah mengalami nasib seperti Irak atau Afghanistan. Iran pun terus ditekan dalam kaitannya dengan program nuklir negeri kaum mullah ini. Bandingkan, misalnya, sikap AS terhadap program nuklir Israel. Lihat misalnya, tulisan Rakaryan Sukarjaputra, “Skenario Irak untuk Iran Mulai Jalan?,” *Kompas* (2 Oktober 2005).

Unilateralisme AS juga menjadi sumber utama merenggangnya hubungan Washington dengan para sekutu utamanya di Uni Eropa, khususnya Perancis dan Jerman, yang sejak awal dengan gigih menolak invasi ke Irak, kendati penolakan itu tidak lepas dari pertimbangan ekonomi-politik kedua negara tersebut, seperti masalah kontrak sejumlah perusahaan minyak Perancis dan Jerman di Irak. Jadi, tentangan terhadap unilateralisme AS tidak saja lantaran berkaitan dengan operasi militer atau aspek hukum internasional, melainkan juga karena kepentingan ekonomi-politik negara-negara sekutu AS sendiri yang ikut dirugikan.

Di sisi lain, unilateralisme AS juga menjadi ancaman besar bagi negara-negara lemah. Ini karena AS dalam memburu kaum "teroris" tidak lagi mempedulikan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi—yang selama ini mereka junjung tinggi—serta keadilan, hukum internasional dan etika pergaulan antarbangsa. Terbukti, Israel—sekutu utama AS—justru dibiarkan terus mempraktekkan "terorisme negara" atas warga sipil Palestina. Di sinilah tampak jelas, AS semakin transparan dalam sikap standar gandanya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu terorisme, HAM, dan demokrasi.

Setelah dua negara lemah, Afghanistan dan Irak, dihancurkan burukkan atas nama "perang melawan terorisme" maka Iran, Suriah, atau negara-negara lemah yang lain pun dapat mengalami nasib yang sama. Di kemudian hari bukan tidak mungkin Indonesia juga dapat mengalami hal serupa. Terutama jika AS menilai Indonesia tidak serius mendukung "perang melawan terorisme," yang—ironisnya—harus dibaca sebagai "perang melawan kaum muslim fundamentalis." Dalam konteks inilah, mesti dicermati "bantuan" dari pemerintah AS bagi sejumlah pesantren di Indonesia, yang diputuskan setelah kunjungan kontroversial Bush ke Bali (Oktober 2003). Di mana pun, "bantuan" tidak mungkin bisa lepas dari "imbalan".

Artinya, pada tahap ini AS sebenarnya sudah melakukan tekanan halus terhadap Indonesia (juga negara-negara lemah lainnya yang berpenduduk mayoritas Muslim) untuk memerangi kaum "fundamentalis" Muslim. Jika pada tahap ini gagal, bukan tidak

mungkin tekanan diperkeras, bisa dalam bentuk berbagai macam sanksi atau yang lain. Pada ujungnya bisa diperlakukan seperti Irak atau Afghanistan. Dalam kondisi demikian, mengharapkan “perlindungan” dari PBB menjadi suatu yang sia-sia, karena badan dunia ini sudah terbukti tidak mampu mencegah sepak terjang AS.

Begitu pula dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang selama masih didominasi negara-negara monarki Arab pro-AS, tidak lebih dari sekedar “macan kertas” belaka. Barangkali benar jika ada yang menganggap ini merupakan kemenangan besar kaum realis yang memandang sistem internasional adalah “anarki”, *power* merupakan tujuan dan cara, hubungan antarbangsa dan antarnegara adalah *balance of power*, serta organisasi internasional (seperti PBB dan OKI) tidak lain hanya instrumen dari negara-negara kuat.²²

Kampanye Disinformasi

Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam Indonesia di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, 24 September 2002, Duta Besar AS (waktu itu) Ralph L. Boyce, antara lain menegaskan bahwa (1) Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat dan toleran; (2) pemerintah AS tidak menuduh Indonesia sebagai sarang teroris; (3) adanya jaringan kelompok Al-Qaeda di Indonesia barulah merupakan indikasi; serta (4) MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Laskar Jihad, dan FPI (Front Pembela Islam) bukan merupakan kelompok teroris.²³

Yang menjadi pertanyaan: mengapa ada perbedaan yang begitu tajam, antara apa yang sering dilontarkan Dubes AS tentang Islam di Indonesia yang terkesan begitu teduh, dengan apa yang sering diekspos secara besar-besaran oleh berbagai jaringan media massa AS bahwa “Indonesia menjadi sarang kaum teroris Islam”? Apakah pernyataan Dubes AS selama ini sekedar *lips service* untuk mengeliminir aksi-aksi kelompok Islam Indonesia terhadap Kedubes

²² Evi Fitriani, “Invasi AS ke Irak: Isu Demokrasi dan Masa Depan Sistem Internasional,” makalah diskusi di Universitas Paramadina (Jakarta, 8 April 2003).

²³ *Kompas dan Republika* (25 September 2002).

dan kepentingan AS lainnya di sini ? Atau, advisnya selama ini memang tidak pernah didengar dan diperhatikan oleh pimpinannya di Gedung Putih ? Atau, memang ada agenda besar terselubung yang tengah dijalankan pemerintahan Bush ?

Dalam pertemuan dengan para tokoh Islam Indonesia tersebut, Dubes AS mengatakan bahwa apa yang diberitakan secara luas oleh media massa di negaranya perihal terorisme di Indonesia, "bukan merupakan sikap resmi pemerintah AS." Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa pemerintahnya tidak menuduh Ba'asyir sebagai bagian dari jaringan Al-Qaeda. Padahal dalam pemberitaan yang dimuat media terkemuka terbitan AS,²⁴ Ba'asyir dan organisasinya secara gamblang dikaitkan dengan kelompok yang dipimpin Osama Bin Laden itu. Bahkan menurut *International Herald Tribune (IHT)*, "The Bush administration is weighing whether to add him (Ba'asyir - pen.) to its terrorist list for what intelligence officials say is his leadership of militant Islamic network linked to Al Qaeda."

Apa yang ditulis koran *IHT* itu jelas bertolak-belakang dengan apa yang dikatakan Dubes Boyce. Jika kita lebih mempercayai pernyataan Boyce, berarti ada kampanye disinformasi yang sistematis yang dilakukan CIA untuk memojokkan posisi umat Islam di Indonesia. Apalagi bila kita memperhatikan secara cermat kasus pembeberan isi dokumen CIA oleh majalah *Time* mengenai pengakuan orang yang bernama Umar al-Faruq. Konon, al-Faruq dikirim oleh Al-Qaeda untuk melancarkan serangan terhadap sejumlah kepentingan AS di Asia Tenggara dan, untuk melancarkan aksinya di Indonesia, ia menjalin kontak dengan Abubakar Ba'asyir.

Ada keganjilan di balik bocornya dokumen CIA itu. Bila dokumen itu sungguh-sungguh otentik dan akurat (otentik belum tentu akurat, dan sebaliknya), tentunya tidak akan begitu saja mudah bocor ke tangan pers. Dokumen resmi CIA yang memuat keterlibatan dinas intelijen AS itu dalam peristiwa penggulingan Presiden Soekarno, misalnya, setelah 25 tahun baru bisa dibebarkan kepada

²⁴ Seperti koran *International Herald Tribune* (24 September 2002) dan majalah *Time* (edisi 23 September 2002).

publik. Dalam kasus al-Faruq, sulit diterima akal sehat, sebuah dokumen penting dari dinas intelijen sekelas CIA dapat dengan mudah bocor ke media massa. Artinya, bisa jadi dokumen itu otentik—karena tidak mungkin sebuah majalah dengan reputasi dunia seperti *Time* mau memuat sebuah dokumen yang diragukan keotentikannya—tapi tidak akurat.

Dalam kasus isu terorisme di Indonesia, tujuan kampanye disinformasi CIA tampaknya untuk mendukung doktrin anti-terorisme Bush pasca 9/11, yang sudah menjurus ke arah kebijakan yang anti-Islam dengan mengabaikan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Bush memang berada di bawah kendali kelompok garis keras (yang sangat pro-militerisme dan pro-Israel) di lingkaran pemerintahannya. Sementara suara kelompok yang lebih moderat seperti (mantan) Menlu Colin Powell (yang menolak rencana invasi AS ke Irak) kurang didengar Bush.

Kemungkinan lain, kampanye disinformasi itu ditujukan untuk memecah belah bangsa Indonesia, terutama antara Muslim dan non-Muslim, antara kaum Muslim moderat (liberal?) dan fundamentalis, serta antara kelompok Islam dan militer. Itulah yang tampaknya terjadi, di mana pemerintahan sipil makin melemah, dan Bush pun mendukung kembalinya (mantan) militer ke panggung kekuasaan di Indonesia. Karena Bush, seperti kata Carter, tidak pernah mepedulikan HAM dan demokrasi demi mendukung doktrin anti-terorismenya. Apalagi, seperti dituduhkan kalangan Partai Demokrat AS, Bush pun dengan berbagai cara berupaya keras untuk menutupi ketidak-mampuannya dalam mengatasi berbagai persoalan politik di dalam negerinya sendiri. Padahal, sebagaimana dikatakan seorang narasumber, "... kalau Amerika dan kawan-kawannya, yang menurut pengakuannya adalah sebagai pionir demokrasi, tentu tidak akan memaksakan kehendak."²⁵

Selain pertimbangan ideologis, ada kepentingan ekonomi di balik kampanye anti-terorisme yang dijalankan Bush. Ketika

²⁵ Pendapat seorang narasumber dalam FGD tim P2P-LIPI di Solo (10 Mei 2005).

menyerbu Afghanistan dan sukses mendirikan rezim boneka di sana, Bush ingin menjadikan Afghanistan sebagai batu loncatan untuk menguasai minyak Asia Tengah. Atau, seperti dikatakan seorang narasumber kami, "invasi Bush dan sekutunya ke Afghanistan dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan mereka atas diterapkannya hukum Islam oleh penguasa Taliban di Afghanistan."²⁶ Lalu, Irak yang merupakan penghasil minyak terbesar kedua—setelah Arab Saudi—di kawasan Teluk, sudah diduduki. Dengan dalih "tidak mematuhi resolusi PBB, menumpuk senjata pemusnah massal, dan terkait dengan jaringan terorisme internasional,"²⁷ Saddam disingkirkan, dan digantikan dengan rezim baru yang bisa diatur oleh Washington, terutama dalam hal pengelolaan sumber minyak.

Konspirasi Anti-Islam ?

Bagi sementara kalangan, "teori konspirasi" dianggap sudah usang dan harus dibuang jauh-jauh. Namun, bagi kalangan lain, teori konspirasi tetap dipandang relevan. Tentu keduanya memiliki dalih dan argumennya masing-masing. Siapa pun yang masih memiliki hati nurani dan akal sehat, jelas mengutuk sekeras-kerasnya tindakan biadab di Bali pada 12 Oktober 2002, yang memakan korban ratusan warga sipil itu.²⁸ Bagi mereka yang anti-teori konspirasi, persoalan tragedi bom Bali barangkali sudah ditemukan jawabannya bahkan sebelum tragedi itu terjadi. Bagi mereka, pelakunya sudah jelas, yaitu kaum teroris. Dalam hal ini barangkali semua bisa sepakat. Terutama jika terorisme didefinisikan—secara sederhana—sebagai aksi kekerasan bermotif politis yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran utamanya.

Setelah 9/11 pemahaman tentang teroris dan terorisme cenderung direduksi sedemikian rupa, sehingga setiap kali menyebut

²⁶ Pandangan seorang narasumber dalam FGD tim P2P-LIPI di Solo (10 Mei 2005).

²⁷ Semua "dosa" itu sebenarnya juga ada pada Israel.

²⁸ Istilah warga sipil rasanya lebih pas ketimbang "orang tak berdosa," karena soal dosa/tak berdosa bukan urusan manusia.

kata teroris dan terorisme, maka yang ada di benak sebagian besar masyarakat adalah Al-Qaeda dan kaum teroris Islam lainnya. Kemudian berkembang stigma yang menyamakan kaum fundamentalis sebagai teroris. Lalu yang paling ironis, stigma yang menyamakan atau minimal mengidentikkan Muslim dengan teroris atau Islam dengan terorisme. Fenomena ini begitu mudah dilihat di sejumlah *website* di internet yang mengkhususkan kajian pada persoalan terorisme. Dalam pandangan seorang narasumber kami, “GW Bush dan kawan-kawannya tidak hanya tengah memerangi kaum Muslim, melainkan juga memerangi hak-hak asasi manusia secara umum.”²⁹

Setelah peristiwa 9/11 banyak warga Muslim di AS—dan barangkali juga di negara-negara Barat lainnya—mengalami tekanan psikologis yang luar biasa.³⁰ Padahal teroris dan terorisme jelas tidak hanya monopoli kalangan Islam. Stigma Islam identik dengan terorisme tampaknya cukup sukses dikembangkan melalui berbagai kampanye disinformasi jaringan intelijen yang didukung media massa kelas dunia. Dampak inilah yang tampaknya tidak disadari oleh mereka yang anti-teori konspirasi. Ketika mereka menyebut kata teroris, maka persepsi yang berkembang secara otomatis adalah bukan sekedar Al-Qaeda atau Osama atau Ba’asyir melainkan juga Islam secara keseluruhan. Ketika pada 2002 seorang Menhan bilang “jaringan Al-Qaeda berada di belakang kasus Bali,” maka masyarakat di bawah menangkapnya sebagai “orang Islamlah yang melakukan pengeboman.” Efek dominonya, “semua orang Islam harus diwaspadai.” Dalam kondisi hubungan sosial kemasyarakatan di republik yang masih rentan ini, pernyataan semacam itu jelas mengandung resiko yang tidak kecil. Apa yang terjadi di Maluku dan Poso, bukan tidak mungkin dapat pula terjadi di Bali.

Bagi para “penganut” teori konspirasi, kasus bom Bali merupakan bagian dari skenario besar perang melawan terorisme—

²⁹ Hal ini juga dikemukakan beberapa narasumber lain dalam FGD tim P2P-LIPI di Solo (10 Mei 2005).

³⁰ Hal serupa konon—mudah-mudahan ini tidak benar—dialami pula oleh sebagian warga muslim di kawasan Legian dan sekitarnya.

yang dalam realitasnya semakin mengarah ke kebijakan anti-Islam— yang tengah dijalankan Bush. Dalam pandangan ini, pelaku teror bom Bali adalah CIA yang berkolaborasi dengan dinas intelijen Mossad, yang bisa jadi juga melibatkan elemen-elemen tertentu di dalam negeri RI. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Membenarkan asumsi yang sudah cukup lama dikembangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu sarang terorisme Islam. Secara sistematis kampanye disinformasi mengenai hal ini bahkan sudah dikembangkan jauh sebelum terjadi tragedi WTC.
2. Menekan pemerintah RI agar segera membungkam gerakan-gerakan Islam di Indonesia yang belakangan makin marak dan makin galak, terutama terhadap konspirasi AS-Israel. Ba'asyir adalah target utamanya. Tapi jelas ia bukan satu-satunya.
3. Memecah belah NKRI menjadi negara-negara kecil agar mudah dikuasai dan dikendalikan AS, terutama mengingat kekayaan sumber alam yang ada di bumi Indonesia ini.
4. Menekan pemerintah RI agar mendukung invasi militer AS ke Irak, yang dilakukan mengingat besarnya ambisi perang Bush. Ini juga berkaitan dengan makin meluasnya aksi-aksi yang menentang invasi militer AS ke Irak. Namun, dengan terjadinya bom Bali justru semakin memperkuat legitimasi bagi Bush untuk menyerang Irak, di mana Bush berulang kali menyebut Saddam sebagai pendukung utama Al-Qaeda. Dengan kata lain, jika sebelum tragedi Bali, banyak warga dunia yang menolak rencana perang Bush, maka keadaannya berbalik setelah bom Bali.³¹

Tidak terlalu aneh, jika dalam hitungan jam, pemerintah Australia sudah bisa memastikan bahwa yang berada di belakang bom Bali 2002 adalah kelompok Jamaah Islamiyah yang merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda. Ketika AS sudah menyebut Al-

³¹ Pada 8 November 2002, misalnya, Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui sebuah resolusi yang memberikan peluang bagi AS untuk menyerang Irak.

Qaeda, dan Australia menyebut Jamaah Islamiyah, maka cepat atau lambat yang lain akan mengikuti mereka.

Di bawah Bush, sikap anti-Islam yang dikembangkan memang semakin menjadi-jadi dan cenderung melampaui batas-batas hubungan antar-manusia dan antar-bangsa. Seorang mantan menteri Jerman bahkan mengatakan, apa yang dilakukan Bush dengan kampanye anti-terorismenya (termasuk dengan terus menduduki Afghanistan, Irak serta mengintimidasi Iran dan negara-negara Muslim lainnya), sudah mendekati apa yang pernah dilakukan pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler pada masa lalu.³² Tudingan ke arah Bush, juga muncul dari dalam negaranya sendiri, ketika mantan Presiden AS Jimmy Carter menuduh Bush sebagai telah menjalankan kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan HAM dan demokrasi. Menurut Carter, Bush telah menyalahgunakan perang melawan terorisme, dan karenanya reputasi AS sebagai yang terbaik dalam soal HAM dan demokrasi pun terancam pudar.³³

Berulang-kali Bush mengatakan bahwa perangnya melawan terorisme bukan merupakan perang melawan Islam. Lalu, ia pun mengunjungi sejumlah *Islamic Center* di negaranya dan dengan semangat membujuk sambil mengancam negara-negara Arab/Muslim—juga negara-negara non-Muslim serta PBB—supaya mendukung nafsu perangnya melawan Saddam Hussein yang gagal digulingkan oleh Bush senior. Pandangan seorang narasumber kami,³⁴

“ada tiga alasan di balik invasi Bush dan sekutunya ke Irak: *pertama*, karena dendam Bush terhadap Saddam; *kedua*, karena alasan ekonomi (yaitu minyak); dan *ketiga*, karena Irak merupakan sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim.”

Berbagai penolakan Saddam pun disebar-luaskan, dari soal menolak mematuhi Resolusi PBB, menumpuk senjata pemusnah

³² *BBC* (20 September 2002).

³³ *Kompas* (6 September 2002).

³⁴ Pandangan seorang narasumber dalam FGD tim P2P-LIPI di Solo (10 Mei 2005).

massal, hingga keterkaitannya dengan Al-Qaeda. Arab Saudi yang sebelumnya menentang invasi ke Irak—karena sadar bakal diminta ikut menanggung beban biaya operasi militer AS seperti yang terjadi dalam Perang Teluk 1991—kemudian terpaksa ikut mendukung, lantaran takut dimasukkan dalam kategori “negara paling berbahaya” bagi AS.

Yang menjadi pertanyaan, benarkah Bush “hanya” tengah memerangi terorisme internasional, dan tidak memerangi Islam ? Jika benar, pertanyaan berikutnya adalah: *pertama*, mengapa jika hanya untuk memburu seorang Osama dan Mullah Umar atau Saddam Hussein, Bush rela membantai ribuan warga sipil Muslim Afghanistan dan Irak ? Jika Bush konsisten memerangi terorisme, mengapa hanya para “teroris Islam” saja yang diperangi? Padahal kaum teroris ada di hampir semua agama, bangsa dan negara.

Kedua, Irak diserang dengan dakwaan tidak mematuhi Resolusi PBB, menumpuk senjata pemusnah massal, dan mendukung terorisme internasional. Bukankah hal yang sama juga dilakukan Israel, yang tidak pernah mau mematuhi Resolusi PBB (khususnya Resolusi DK-PBB 242 dan 338), memiliki nuklir, dan bahkan secara terbuka menjalankan *state terrorism* terhadap warga sipil Palestina ? Apakah hanya lantaran Irak dihuni mayoritas Muslim sehingga harus dihukum, sementara Israel yang Yahudi justru dibela mati-matian oleh Bush? Bush pasti menyadari, siapa yang akan menjadi korban terlebih dulu dari operasi militernya, bukan Saddam, melainkan warga sipil Irak yang juga sudah menderita akibat embargo PBB. Setelah membantai ribuan warga Muslim Afghanistan dan Irak, dan membiarkan terbunuhnya ribuan warga Muslim Palestina, tampaknya Bush belum juga puas. Ia pun hendak membantai warga Muslim Iran atau Suriah.

Bisa jadi Indonesia yang juga berpenduduk mayoritas Muslim, akan menjadi target berikutnya. Kampanye disinformasi yang sistematis sudah dilakukan oleh CIA: dari kasus Agus Budiman sampai Umar Al-Faruq.³⁵ Sejak awal arahnya jelas terbaca. Yaitu,

³⁵ *Time* (23 September 2002).

menekan Jakarta supaya menangkap tokoh-tokoh seperti Abubakar Ba'asyir dan kaum muslim fundamentalis anti-AS lainnya. Indonesia di bawah Megawati dinilai tidak mampu mengendalikan maraknya gerakan Islam politik yang makin marak di era reformasi ini. Jelas ini dianggap sebagai ancaman oleh Bush, maka perlu dikampanyekan bahwa "fundamentalis adalah teroris." Bush berharap, pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998 mencontoh Soeharto era 1970-an dan 1980-an, yang dengan mesin politik dan militernya mampu menggilas gerakan-gerakan Islam. Bush—atas nama kepentingan nasional AS—pada hakekatnya tidak hanya menjalankan kebijakan politik yang anti-Islam, melainkan juga anti-demokrasi dan anti-HAM. Lalu, jika demikian, apa bedanya tingkah laku politik Bush dengan Hitler?

Tragedi bom di Bali, dan sejumlah peristiwa yang terjadi sesudahnya, seperti dimunculkannya isu soal kelompok Jamaah Islamiyah dan "jaringan Ngruki"; penangkapan secara paksa atas Abubakar Ba'asyir; serta tertangkapnya Amrozi dan kawan-kawan, yang oleh pihak aparat keamanan RI dijadikan sebagai tersangka utama kasus bom Bali, semakin memperkuat stigma yang mengidentikkan Islam dengan terorisme. Menurut seorang narasumber kami di Denpasar:³⁶

"dikaitkannya pesantren Ngruki dengan JI apalagi kasus terorisme, menimbulkan banyak tanda tanya. Sebab, di Ngruki tidak diajarkan untuk melawan pemerintah, atau perang bahkan terorisme....Fikihnya juga sama, kitab-kitab yang diajarkan hampir sama dengan pondok-pondok yang lainnya, yaitu masalah ibadah, aqidah. Latihan untuk perang itu tidak ada, malah lebih terbuka Ngruki daripada pondok yang lain di Indonesia, misalnya al-Zaitun. Al-Zaitun masih tertutup, kalau Ngruki lebih terbuka. Oleh karena

³⁶ Yang antara lain disebarluaskan oleh Sidney Jones dalam *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the "Ngruki Network" in Indonesia* (ICG, 2002). Pendapat seorang narasumber di Denpasar (10 Juli 2005) Memang, seperti diakui seorang pejabat tinggi pemerintahan SBY, ada tekanan kuat dari AS, Australia dan Singapura untuk menutup pesantren Al-Mukmin Ngruki.

itu, darimana alasan orang untuk mencurigai secara berlebihan kepada Ngruki”

Hampir setiap hari masyarakat disuguhi opini yang mengarahkan bahwa pelaku bom Bali 2002 (juga bom Marriot 2003, bom Kuningan 2004, dan bom Bali 2005) adalah umat Islam. Padahal, semua ini jelas merupakan suatu konspirasi yang dirancang secara sistematis, antara lain melalui kampanye disinformasi, dengan tujuan utama mendukung kebijakan anti-Islam—atau lebih tepat disebut sebagai perang melawan Islam (*war on Islam*)—yang dimotori George W. Bush.

Ironisnya, ada sementara kalangan di dalam negeri Indonesia yang mengatakan bahwa “teori konspirasi” dan tuduhan ke arah CIA sebagai pelaku peledakan Bom Bali merupakan tipikal kaum komunis (PKI).³⁷ Di era Perang Dingin barangkali benar, karena pada waktu itu ada konflik antara dua kekuatan besar: blok kapitalisme (Barat atau AS dan sekutunya) *versus* blok komunisme (Uni Soviet dan sekutunya). Dalam beberapa kasus—untuk tidak menyebut semuanya—tuduhan kaum komunis itu pun ternyata terbukti. Salah satu contohnya adalah keterlibatan CIA dalam penggulingan pemerintahan Soekarno.

Setelah usainya Perang Dingin, ada kecenderungan kuat terjadinya konflik—“*clash of civilization*” meminjam Huntington—antara Barat dan Islam. Selain Huntington, banyak pakar hubungan internasional lain yang memandang Islam sebagai “lawan” Barat berikutnya, setelah komunisme mulai surut. Bagaimana menjelaskan fenomena digagalkannya—oleh pihak militer yang didukung sepenuhnya oleh negara-negara Barat—hasil pemilihan umum di Aljazair (1992) yang waktu itu dimenangkan oleh partai Front Penyelamatan Islam (FIS) ? Apakah itu bukan merupakan bagian dari “teori konspirasi” ? Begitu pula dalam kasus penggulingan—secara konstitusional—pemerintahan Turki di bawah PM Necmettin

³⁷ Lihat, misalnya, Juwono Sudarsono, “Indonesia dan Terorisme Internasional,” *Kompas* (17 Oktober 2002).

Erbakan dari Partai Islam *Refah* (1995), oleh kekuatan militer Turki yang—lagi-lagi—direstui Barat?

Bandingkan, misalnya, sikap Barat terhadap kasus pembatalan pemilu oleh kaum militer di Myanmar dan kasus serupa di Aljazair dan Turki. Barat menjadikan kaum oposisi Myanmar (yang non-Muslim) sebagai pahlawan dan dibela mati-matian, sementara di Aljazair dan Turki (yang Muslim) yang terjadi justru sebaliknya. Contoh lainnya, mengapa kaum oposisi yang pro-demokrasi di negara-negara Eropa Timur mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Barat, sementara kaum oposisi yang pro-demokrasi di negara-negara Arab (yang rezimnya bersekutu dengan Barat) justru cenderung dimusuhi Barat? Jawabannya sederhana, kaum oposisi (non-Muslim) di Eropa Timur umumnya sangat pro-Barat, sementara kaum oposisi (Muslim) di sejumlah negara Arab justru cenderung anti-Barat.

Mengenai terorisme internasional, tampaknya ada kesepakatan bahwa terorisme dalam segala bentuknya merupakan musuh utama kemanusiaan. Tapi, sebagaimana sudah dibahas, sebenarnya tidak mudah untuk mendefinisikan secara tepat, apa yang disebut sebagai “terorisme”. Seorang Osama bin Laden, oleh pihak Barat dan mereka yang pro-Barat, disebut sebagai teroris atau bahkan “gembong teroris.” Namun, bagi para pengikut, pendukung, dan pengagumnya, jelas ia bukan teroris melainkan pahlawan atau pejuang. Sama halnya ketika pada masa perang kemerdekaan RI dulu, di mana Belanda menyebut Pangeran Diponegoro sebagai seorang “teroris.” Tapi, bagi bangsa Indonesia, Diponegoro jelas seorang pahlawan dan bukan teroris.

Terorisme seakan-akan identik dengan Islam. Padahal banyak teroris yang bukan Islam, seperti Aum Shinrikyo di Jepang, kelompok Basque di Spanyol, IRA di Irlandia/Inggris, Macan Tamil di Srilangka, Kahane Chai di Israel, kelompok November 17 di Yunani, Tupac Amaru di Peru, FARC di Kolombia, dan kelompok “*American Militant Extremists*” di AS sendiri. Menjadi pertanyaan, mengapa yang diperangi hanya kaum “teroris Muslim” saja? Mengapa dalam waktu hanya sehari Menlu Australia sudah tahu

persis bahwa pelaku kasus bom Bali (juga bom Kuningan) adalah jaringan Al-Qaeda yang bernama "Jamaah Islamiyah" ("umat Islam") ? Padahal, nama kelompok ini sangat asing di mata kaum Muslim Indonesia. Berbeda misalnya, dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) atau Laskar Jihad (LJ) atau Front Pembela Islam (FPI). Mengapa pula tiba-tiba Presiden Bush menyebut Saddam Hussein sebagai pendukung utama Al-Qaeda yang terlibat dalam kasus Bali? Apakah ini hanya suatu "kebetulan"? Atau haruskah dipercaya bahwa politik yang dikembangkan AS adalah politik yang "suci dan bersih," tanpa maksud lain sedikit pun ?

Dalam kasus Bali, ada pula sementara kalangan di Indonesia yang menganggap bahwa tentara, polisi, intelijen, dan sisa-sisa Orde Baru tidak layak disalahkan.³⁸ Sebaliknya kaum "Islam pinggiran" (MMI, LJ dan FPI) lah yang selalu bikin onar. Jelas bahwa milisi-milisi sipil sudah seharusnya ditinggalkan, bahkan dibubarkan. Tapi, keberadaan milisi-milisi sipil sebenarnya juga bukan hanya monopoli kaum "Islam pinggiran" melainkan juga ada di partai-partai politik besar seperti Satgas PDI-P. Dan, jika mencermati latar belakang menjamurnya milisi-milisi sipil di kalangan "Islam pinggiran," maka ini tidak lepas dari terseok-seoknya penegakan hukum di Indonesia.

Menganggap tentara, polisi, intelijen, dan sisa-sisa Orde Baru "bersih dari dosa" juga menimbulkan pertanyaan lain, yaitu mengapa berbagai kasus bom dan kerusuhan berdimensi SARA di berbagai daerah, tidak mampu diungkap secara tuntas oleh pemerintah maupun aparat keamanan Indonesia? Selama belum ditemukan bukti-bukti yang otentik dan akurat (otentik belum tentu akurat), berbagai spekulasi di balik tragedi Bali, Marriot dan Kuningan, masih tetap terbuka. Termasuk, soal "teori konspirasi" itu.

Dengan dikeluarkannya UU Antiterorisme dan ditangkapnya Ba'asyir, kemungkinan besar pemerintah RI pasca reformasi hanya akan mengikuti jejak Soeharto yang menerapkan kebijakan keras terhadap kaum Muslim fundamentalis (seperti kasus Priok,

³⁸ *Ibid.*

Talangsari, Komando Jihad, dan lain-lain). Dan, bantuan luar negeri pun akan segera membanjir dan RI akan dianggap sebagai teman sejati Bush yang paling sukses membasmi terorisme. HAM dan demokrasi tidak akan dipedulikan. Bush pun sudah tak menghiraukannya lagi. Begitu tragis, apa boleh buat, kedaulatan yang hakiki tampaknya sudah tidak ada lagi. Menurut Raja Pamecutan (yang beragama Hindu),³⁹

“Soeharto dinaikkan oleh Amerika dan diturunkan oleh Amerika juga. Apapun juga di Indonesia ini dari Soekarno sampai sekarang Amerika berperan. Tanpa Amerika, mereka tidak mungkin bisa menjadi presiden. Amerika sangat berperan dalam menaikkan dan menurunkan presiden di Indonesia, juga dalam pembangunan ekonomi. Saya memang melihatnya cenderung ke Amerika, tetapi saya bicara realita. Tetapi saya juga tidak ingin Indonesia ikut gendrangnya Amerika. Kita dapat meminta bantuan ke mana saja, tetapi kita jangan sampai menuruti keinginan-keinginan Bush.”

Penutup

Kendati menimbulkan pro dan kontra, doktrin anti-terorisme versi Bush umumnya direspon secara kritis oleh sebagian besar narasumber kami. Doktrin perang melawan terorisme yang dikembangkan pemerintahan Amerika Serikat di bawah rezim George W. Bush pasca 11 September 2001, dalam kenyataannya justru semakin membuat tata dunia internasional menjadi lebih didominasi ketegangan dan konflik. Bush dan kelompok neokonservatif yang praktis mengendalikan politik AS sejak naiknya Bush pada tahun 2000, sangat berambisi menguasai dunia, baik secara politik, militer, maupun (dan terutama) secara ekonomi. Melalui sebuah *think tank* yang disebut PNAC (*the Project for New American Century*) mereka berupaya mewujudkan terciptanya sebuah “*Pax-Americana*”, semacam “pemerintahan dunia” yang berada di bawah kepemimpinan AS.

³⁹ Wawancara tim peneliti P2P-LIPI dengan Raja Pamecutan di Denpasar (26 Juli 2005).

Guna mewujudkan ambisi itu, mereka—dengan menghalalkan segala cara, termasuk menyebar-luaskan informasi yang belum tentu benar (melalui berbagai kampanye disinformasi)—berupaya menguasai sumber-sumber minyak di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Invasi AS ke Afghanistan (Oktober 2001) dan Irak (Maret 2003) harus dilihat dalam konteks ini. Pada saat bersamaan mereka membutuhkan “ikon” yang bisa dijadikan sebagai musuh bersama guna mendapatkan dukungan luas baik dari publik domestik maupun internasional. Islam, setelah surutnya komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur, menjadi pilihan yang tepat untuk dimunculkan sebagai musuh bersama, seperti sudah “disodorkan” oleh Samuel P. Huntington (salah seorang pakar politik yang dikenal sangat berpengaruh di kalangan kaum neokonservatif AS) dalam “clash of civilizations.”

Secara “kebetulan” dua kawasan kaya minyak tersebut (Timur Tengah dan Asia Tengah) juga berada di wilayah “kekuasaan kaum Muslim.” Oleh sebab itu, ibarat kata pepatah “sekali mendayung dua pulau terlampaui” maka dengan mengobarkan perang (baik secara fisik maupun nonfisik) terhadap Islam, akan dapat diraih dua tujuan sekaligus: minyak dan musuh bersama. Namun, untuk melancarkan perang terhadap Dunia Islam tentu diperlukan justifikasi dan alasan yang “masuk akal”. Lalu, dimunculkanlah isu terorisme, dengan mana Bush dan kawan-kawan dapat secara leluasa mengobrak-abrik dan memporak-porandakan negara-negara Muslim. Diawali dengan skenario serangan 11 September 2001 yang menjadikan Tanzim Al-Qaeda dan Osama bin Laden sebagai tertuduh utama, kemudian diikuti oleh invasi dan pendudukan atas Afghanistan dan Irak.

Bersama Al-Qaeda, dimunculkan pula “Jamaah Islamiyah” (JI) sebagai “jaringan teroris muslim” yang paling dahsyat di kawasan Asia Tenggara. Jika serangan 11 September 2001 dijadikan sebagai “karya monumental” Al-Qaeda, maka Bom Bali I (2002)—yang kemudian diikuti dengan Bom Marriot (2003), Bom Kuningan (2004), dan Bom Bali II (2005)—dengan cepat melambungkan nama JI. Jika oleh Bush dan kawan-kawan, Osama bin Laden berhasil ditampilkan sebagai “imam” Al-Qaeda, maka Ustad Abubakar

Ba'asyir pun dinobatkan—terutama oleh John Howard dan Lee Kuan Yew—sebagai “imam” JI.

Memang bukan suatu kebetulan jika setiap tahun Indonesia dilanda berbagai aksi serangan terorisme. Selain karena melemahnya kekuatan aparat negara (khususnya TNI dan intelijen) pascareformasi 1998, juga lantaran makin berkembangnya kelompok-kelompok “Islam fundamentalis” yang lantang memperjuangkan penegakan hukum Islam dan mereka pada umumnya bersikap sangat kritis terhadap kebijakan AS di bawah GW Bush. Hal inilah yang justru dianggap dapat merintangangi ambisi Bush dan kaum neokonservatif untuk mewujudkan sebuah “*Pax-Americana*”.



Bab 4

RESPON PEMERINTAH INDONESIA ATAS SIKAP “PERANG TERHADAP TERORISME” AMERIKA SERIKAT

Awani Irewati

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam tingkatan apapun tetap merupakan hubungan yang amat penting. Kepentingan dan ketergantungan Indonesia pada peran dan kekuatan adidaya Amerika Serikat secara riil tidak bisa dinafikan. Sebagai contoh, tingkat ketergantungan ekonomi dan finansial Indonesia pada peran IMF (*International Monetary Fund*), di mana peran AS amat dominan, begitu tinggi. Demikian juga bentuk kerjasama militer, yang sudah beberapa tahun dihentikan lewat IMET (*International Military Education and Training*) menjadi kepentingan strategis Indonesia terhadap Amerika Serikat. Demikian sebaliknya, AS melihat peran Indonesia secara geopolitik dan geostrategi di Asia Pasifik amat penting. Kekayaan alam dan penduduknya yang berjumlah 225 juta serta letaknya di jalur persimpangan dunia menjadikan Indonesia amat penting dalam kalkulasi politik luar negeri AS.

Namun sejak peristiwa 9/11 yang diikuti serangkaian peristiwa bom di Indonesia seakan mengubah “harmonisasi” hubungan antar keduanya. Persepsi AS terhadap pelaku terorisme yang diyakini bersemai pada negara-negara dengan mayoritas penduduknya yang Muslim, seperti Indonesia, jelas sangat tidak menguntungkan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan AS.

Dalam konteks hubungan internasional, situasi dan perkembangan isu-isu yang ada akan menentukan diplomasi suatu negara. Ragamnya isu-isu yang berkembang mendorong suatu negara

harus menentukan skala prioritas dalam politik luar negerinya. Bagi Indonesia, prioritas politik luar negeri Indonesia tentu memiliki tingkatan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tingkat multilateral, regional dan bilateral. Dalam penulisan ini, konteks hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat penting untuk diikuti perkembangannya mengingat Amerika Serikat adalah satu negara adidaya dengan kekuatan ekonomi, politik maupun militer yang amat menentukan di mandala dunia. Bagian pertama menyangkut landasan hukum bagi kebijakan anti-terorisme di Indonesia, yang kini tengah dilakukan revisinya. Bagian kedua tentang kebijakan Indonesia atas terorisme di tingkat regional ASEAN. Bagian ketiga tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungannya dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Di bagian ini juga diulas mengenai sikap ataupun respon pemerintah atas politik luar negeri Amerika yang dikenal dengan *war against terrorism*. Bagian keempat melihat kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang masih berusia satu tahun. Terakhir adalah bagian penutup.

Landasan Hukum bagi Kebijakan Anti-Terrorisme

Peristiwa 9/11 dan bom Bali Oktober 2002 menunjukkan tingginya tekanan asing, khususnya AS dan Australia kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi dan menahan tersangka pelaku teroris di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia berulang kali menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak memungkinkan penahanan seseorang tanpa bukti yang memadai. Tidak seperti negara-negara lain, misalnya AS, Australia, Malaysia, atau Singapura, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan penahanan preventif, penyadapan atau investigasi tanpa surat perintah. Namun, akibat tekanan asing yang cukup kuat, khususnya dari pemerintah

AS, akhirnya Kementerian Hukum dan HAM Indonesia mengajukan RUU anti-teroris ke DPR RI tiga bulan sebelum bom Bali meledak.¹

RUU tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan yang khawatir bahwa UU tersebut akan digunakan untuk menahan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Kelompok-kelompok Muslim juga menentang RUU tersebut karena khawatir akan digunakan untuk menahan aktivis-aktivis Muslim meski tidak terlibat aksi teroris. Beberapa kalangan juga mengkhawatirkan pemerintah akan menyalahgunakan UU tersebut, seperti yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru di masa Soeharto di bawah UU anti subversif. Peristiwa bom Bali, kemudian, mempercepat disahkannya RUU anti-teroris tersebut. Pada 6 Maret 2003, DPR mengesahkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Namun, perdebatan seputar pemberlakuan Perpu Anti-Teroris yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati saat itu terus berlangsung di DPR. Setidaknya, dua fraksi di DPR, yakni Fraksi Reformasi dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melakukan aksi *walkout* ketika DPR melakukan pengambilan suara untuk mensahkan Perpu tersebut.² Fraksi Reformasi di DPR yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Daulah Ummah (PDU) menolak pasal 28 Perpu no.1/2002 karena pasal tersebut memberi otoritas kepada investigator untuk menahan tersangka teroris selama 7 hari yang dapat diperpanjang hingga 6 bulan untuk proses interogasi dan dakwaan. Pasal lain dalam Perpu Anti Teroris yang menjadi perhatian publik adalah Pasal 26 Perpu No.1/2002 yang membolehkan penggunaan "laporan intelijen"

¹ Lihat, Leonard C. Sebastian, "The Indonesian Dilemma: How to Participate in the War on Terror Without Becoming a National Security State", dalam Kumar Ramakhrisna, *Op.cit.* hlm. 361.

² *Ibid.*, hlm. 367.

sebagai dasar untuk menangkap tersangka teroris. Pasal 26 dan 28 Perpu No. 1/2002 itulah yang masih menjadi kontroversi di kalangan komunitas Muslim dan aktivis prodemokrasi.

Mereka mempertanyakan apakah Perpu tersebut akan dijadikan pembenaran bagi pemerintah untuk mengambil tindakan apapun atas nama keamanan? Kelompok-kelompok LSM juga mengekspresikan kekhawatirannya bahwa militer akan "mengambil keuntungan" atas berlakunya peraturan antiterorisme yang menurut mereka merupakan pesanan Amerika. Yakni, sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan militer dengan AS, atau lebih buruk, sebagai kesempatan untuk meningkatkan peran politik militer di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa kalangan menilai bahwa dikeluarkannya Perpu Anti Teroris tersebut menunjukkan keberanian politik Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengatasi terorisme di Indonesia.⁵

Selain itu, dalam tulisannya, Donny Gahral Adian menjelaskan beberapa kritikan dari dalam negeri tentang interpretasi isi Perpu yang sepihak bisa mematikan gerakan demokrasi dan HAM yang ada. Interpretasi kepentingan sepihak terlihat dalam definisi Perpu No. 01/2002 perihal terorisme "setiap tindak kekerasan yang menciptakan teror dan rasa tidak aman dalam masyarakat, melanggar kebebasan publik, menghilangkan nyawa orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital dan strategis" (pasal 6 dan 7). Dijelaskan pendefinisian itu belum menyangkut pengertian atas terorisme yang dilakukan negara. Itu masih menjelaskan definisi terorisme yang dilakukan pihak sipil. Lebih jauh, Adian menjelaskan tentang peran badan intelijen yang seringkali memberikan data-data yang sebenarnya tidak bisa dijadikan rujukan legal bagi aparat dan penguasa. Dan ini melemahkan Perpu Anti-Terrorisme itu. Sebaiknya Perpu Intelijen juga dikeluarkan guna mengatur dan memberi koridor bagi peran intelijen.

Di luar perdebatan sengit tentang Perpu itu, pada akhirnya, Indonesia memiliki landasan hukum untuk menolak terorisme lewat

⁵ *Ibid.* hlm. 368.

pemberlakuan Undang-Undang No. 15 tahun 2003. Adapun isi dari UU ini sebagai berikut:⁴

“Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”

Namun ketika UU Anti-Terrorisme telah terwujud, dan beberapa kelompok yang semula menentangnya telah dapat “menerima“ UU tersebut, muncul tuntutan dari pihak lain agar UU yang ada itu direvisi. Tuntutan ini tidak lain karena dipicu dengan semakin maraknya peristiwa peledakan bom yang terjadi di Indonesia. Tentu saja usulan revisi ini menimbulkan sikap pro dan kontra. Mereka yang mendukung revisi adalah sebagian besar dari TNI dan purnawirawan yang meyakini upaya revisi itu sebagai alat hukum melawan terorisme yang kini sudah menjadi *common enemy* secara global. Sementara kelompok yang menentang adalah masyarakat yang melihat upaya revisi ini sebagai cara yang tidak benar. Mereka mempertanyakan lebih jauh apakah UU Anti-Terrorisme yang ada itu memang benar-benar tidak “bergigi” untuk menghadapi ancaman terorisme, sebagaimana diyakini oleh kelompok yang mendukung. Apakah UU tersebut tidak cukup bagi

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/14/prn.20040414-05.id.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2005, pk. 11.30 Wib.

aparatus keamanan untuk memiliki otoritas dalam melakukan aksi-aksi preventif? Bagi mereka, UU Anti-terorisme yang ada sebenarnya sudah cukup digunakan untuk memberantas aksi-aksi terorisme. Jadi upaya revisi terhadapnya sebenarnya tidak diperlukan, selain hanya untuk memberi keleluasaan bagi aparat keamanan dalam memburu teroris, yang mungkin tidak mengindahkan nilai-nilai HAM. Hingga saat di bawah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (atau setidaknya hingga penulisan penelitian ini berakhir) draf revisi UU Anti-Terrorisme belum sempurna benar dan masih melalui proses pembahasan di Departemen Hukum dan HAM.⁵

Langkah lain yang diambil pemerintah Megawati adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 pada 22 Oktober 2002, berisi pembentukan Desk Antiteror di bawah koordinasi Menko Polhukam, yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal Ansaat Mbai diangkat menjadi Kepala Desk Antiteror dan diberi dua mandat, yakni: 1) memformulasikan kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi terorisme; 2) melakukan koordinasi tahapan-tahapan operasional yang diperlukan. Menurut Jend. Ansaat, fokus Desk Antiteror adalah "harmonisasi", yakni memberikan pemahaman kepada polisi, jaksa dan hakim tentang bagaimana Perpu Anti Teroris yang baru diaplikasikan.⁶ Merujuk pada kasus Abubakar Ba'asyir, di mana hakim Indonesia tidak menerima kesaksian Faiz Abu Bakar Bafana yang disiarkan melalui *videoconference* dari Malaysia dengan alasan, hukum di Indonesia tidak bisa menerima kesaksian dengan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Perpu Anti Teroris memungkinkan seseorang memberi kesaksian melalui teknologi seperti *videoconference*.

Sementara itu, pasca pengeboman Hotel J.W. Marriott pada Agustus 2003, Desk Antiteror mengeluarkan draf "Strategi Nasional Kontra Terorisme" dan "Pedoman Operasi Kontra Terorisme Terintegrasi". Oleh karena itu, dapat dikatakan keluarnya draf

⁵ *Kompas*, 20 Oktober 2005.

⁶ Lihat, William Wise, *Indonesia's War on Terror*, United States-Indonesia Society, Agustus 2005, hlm. 38.

pedoman tersebut menunjukkan peran utama Polri - bukan TNI - dalam langkah kontra terorisme di Indonesia. Namun, Desk Antiteror tidak akan mampu berbuat banyak tanpa kerja sama dari institusi pemerintah lainnya seperti, intelijen, polisi, militer, imigrasi, pabean, dan sebagainya. Namun, koordinasi antar institusi pemerintah dengan Desk Antiteror belum berjalan dengan baik. Karena muncul kekhawatiran bahwa dengan diperluasnya otoritas Desk Antiteror akan mengurangi bahkan menghapus otoritas departemen atau lembaga-lembaga tersebut, bahkan akan mengganggu akses mereka kepada sumber keuangan dan bantuan asing. Oleh karena itu, Jend. Ansyad mengusulkan untuk meningkatkan status Desk Antiteror menjadi lembaga independen dalam bentuk Lembaga Koordinasi Kontra Terorisme dengan otoritas riil untuk mengkoordinasikan beberapa elemen dalam pemerintahan Indonesia yang terlibat dalam langkah mengatasi teroris.⁷

Sebenarnya upaya pencegahan terhadap potensi ancaman terorisme telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia meski masih di tingkat lokal. Namun Indonesia tidak melepas perhatiannya pada ancaman terorisme di tingkat regional. Karena maraknya terorisme di dalam negeri mungkin tidak terlepas dari ikatan sel-sel terorisme di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Di tingkat regional, Indonesia memberi perhatian serius tentang masalah ini. Karena, terorisme ini menjadi satu bentuk kejahatan lintas negara yang telah menjadi agenda penting dalam pertemuan ASEAN.

Kebijakan Indonesia di tingkat Regional

Dalam upaya pencegahan terorisme, Indonesia menyambut positif upaya kerjasama di tingkat ASEAN. Jauh sebelum peristiwa 9/11 dan bom Bali, ASEAN termasuk Indonesia telah memberi perhatian pada kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk kejahatan lintas negara. Perhatian lebih besar diberikan mulai tahun 1990an ketika kejahatan lintas negara ini dirasakan sebagai satu kejahatan yang harus ditangani secara bersama dan serius. Saat itu gelombang

⁷ *Ibid.*, hlm. 46-47.

penyelundupan manusia lintas negara mulai menunjukkan tingkat volume yang meningkat. Ini diyakini bisa menimbulkan kejahatan lainnya apabila tidak segera ditanggulangi dan diantisipasi. Pelaksanaan konferensi tentang Kejahatan Lintas Negara (*ASEAN Conference on Transnational Crime*) yang diadakan di Manila pada 18-20 Desember 1997 menjadi ajang pertemuan ASEAN untuk memperhatikan isu ini secara serius. Namun perhatian secara spesifik terhadap ancaman terorisme belum diangkat sebagai isu mendesak di tingkat ASEAN.

Setelah peristiwa 9/11 terjadi, dan atas desakan negara Amerika Serikat, ancaman terorisme kemudian menjadi sesuatu hal yang penting untuk dicegah. Indonesia di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri melihat pentingnya menjalin kerjasama yang erat antar aparat keamanan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini diutarakan ketika ia mengunjungi negara-negara ASEAN pada September 2001. Keseriusan Indonesia dalam mengatasi kejahatan lintas negara, terutama terorisme di tingkat ASEAN, diwujudkan dalam langkah menyepakati Konvensi PBB perihal Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*). Konvensi PBB yang bersifat mengikat (*legally binding*) ini ditandatangani di Palermo, Italia bulan Desember 2000. Indonesia beserta 4 (empat) negara lain Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam telah menandatangani konvensi ini.⁸

Pemerintah sangat *concern* pada kejahatan ini terutama pada bentuk kejahatan terorisme. Kaitan kegiatan terorisme sebenarnya tidak bisa lepas dari aktivitas ilegal berupa penyelundupan senjata. Sebagai contoh, peristiwa peledakan bom di hotel Atrium-Senen, Jakarta ternyata melibatkan pelaku asal Malaysia yang diduga menjadi anggota Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM). Contoh

⁸ Makalah disampaikan oleh Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, "Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara: Tantangan Baru Bagi Kerjasama ASEAN" pada Lokakarya Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001.

lain, pasok senjata gelap ke kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dilakukan oleh dua orang oknum Angkatan Darat Thailand yang berhasil ditangkap oleh aparat keamanan Thailand. Demikian pula aparat keamanan Indonesia juga berhasil menangkap pelaku penyelundupan senjata oleh kelompok separatisme di Filipina pimpinan Abu Sayyaf kepada salah satu kelompok yang berkonflik di Maluku. Dan masih banyak lagi aktivitas ilegal dalam hal penyelundupan ataupun perdagangan gelap senjata antar negara anggota ASEAN.

Problematika perdagangan senjata gelap atau *small arms and light weapons* (SALW) di tingkat ASEAN, khususnya di tiga negara Thailand, Filipina dan Indonesia pada skala tertentu sudah sangat mencemaskan. Ini tidak lain dipicu dari masih adanya konflik internal ataupun gerakan separatisme di Filipina, Indonesia, Thailand, Myanmar.⁹ Karena itu pemerintah tidak bisa menafikan kaitan antara upaya penangkalan terorisme dan peredaran senjata yang nyata-nyata memiliki pasar tersendiri. Upaya peningkatan kemampuan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam hal penekanan atas peredaran senjata ini terus dilakukan. Ini ditujukan pula untuk memangkas rantai dukungan atas berlangsungnya aksi-aksi terorisme. Apalagi dengan terbentuknya *ASEAN Centre on Transnational Crime* (ACTC) memberikan stimulasi bagi keseriusan ini.

Keseriusan itu diperkuat dengan adanya desakan internasional yang melihat bahwa beberapa konflik internal maupun gerakan separatisme yang terjadi di Asia Tenggara memberi akses mudah bagi maraknya ancaman terorisme. Untuk itu, ASEAN sepakat melaksanakan *Work Programme on Terrorism to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yang telah

⁹ Mengenai ini bisa lihat lebih detail pada Philips Jusario Vermonte, "Problematika Peredaran *Small Arms* di Kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina dan Indonesia", *Analisis CSIS*, Vol. XXXII, No. 1, tahun 2003, hlm. 57-69.

ditetapkan pada 17 Mei 2002.¹⁰ Beberapa waktu kemudian ASEAN sepakat ancaman terorisme tidak dapat lepas dari bagian kejahatan lintas negara. Pengaitan itu dicantumkan dalam Komunike *Special ASEAN Ministerial Meeting on Terrorism* yang berlangsung di Malaysia, 21 Mei 2002.

Indonesia semakin berkepentingan didalamnya setelah terjadi peristiwa peledakan bom Bali. Peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 ini menjadi momentum penentu bahwa ancaman terorisme sudah tidak bisa ditolerir lagi. Diperlukan satu tindakan bersama, yang bukan lagi hanya pada level pembuatan kesepakatan bersama melainkan lebih pada aksi bersama di lapangan. Upaya penyusunan aksi bersama itu dihasilkan dalam serangkaian pertemuan, seperti *International Conference on Anti-Terrorism and Tourism Recovery* di Manila; *Regional Conference on Combating Money-Laundering and Terrorist Financing* di Bali (Desember 2002); *Intersessional Meeting on Terrorism of the ARF* di Sabah-Malaysia hingga pembentukan *Regional Counter-Terrorism Center* di Kuala Lumpur. Keikutsertaan Indonesia di dalam serangkaian pertemuan itu cukup menentukan dan memiliki kepentingan besar didalamnya. Demikian pula dengan Filipina maupun Malaysia mendukung adanya kerjasama positif di dalam memblokir ancaman terorisme.

Namun sangat disadari bahwa untuk mengefektifkan dan mengaktifkan gugus kerja yang terkoordinir secara rapi diperlukan kesiapan fasilitas dan infrastruktur memadai dari masing-masing negara. Ini penting karena sangat menentukan kapabilitas upaya pencegahan terorisme seperti pertukaran data intelijen, pertukaran informasi, pembentukan mekanisme bantuan dan jawaban segera atas kondisi mendesak, sistem pengawasan bersama pada perbatasan, serta sistem pendukung lainnya yang intinya berada di bawah satu sistem kerja terpadu dan cepat. Dalam konteks kepentingan ASEAN, pada kenyataannya tidak semua negara memiliki kesamaan persepsi ataupun tingkat prioritas kepentingan dalam menghadapi ancaman

¹⁰ CPF. Luhulima, "Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara", *Analisis CSIS*, Vol. XXXII, No. 1, tahun 2003, hlm. 40-41.

terorisme. Di dalam ASEAN sendiri, penghormatan atas kedaulatan suatu negara tampaknya masih sangat tinggi, sehingga terapan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud di atas belum sepenuhnya dapat diterima. Guna membentuk satu kerjasama menghadapi ancaman terorisme di lingkungan ASEAN, tak pelak diperlukan kesamaan persepsi di dalam membaca ancaman tersebut.

Di dalam wadah kerjasama ASEAN tampaknya masih sulit dihasilkan satu aksi bersama yang solid dan segera dalam menanggulangi ancaman terorisme dan aktivitas pendukungnya. Faktor-faktor seperti, belum adanya kesamaan persepsi; belum adanya instrumen terpadu; serta orientasi kepentingan nasional yang berbeda atas ancaman terorisme membutuhkan penangan dan akomodasi dalam jangka waktu yang tidak singkat. Selama konflik-konflik internal maupun gerakan-gerakan separatisme masih hidup di negara-negara anggota, selama itu pula mobilitas teroris masih bisa menyusup didalamnya. Dengan kata lain, upaya dan harapan Indonesia memblokir teroris di dalam kerjasama regional ini tampak tidak secepat jalinan kerjasama bilateral yang dikembangkan Indonesia. Di luar ASEAN, kerjasama bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat relatif lebih mudah dalam melakukan koordinasi dan membuat kesepakatan.

Kebijakan Indonesia dimasa Megawati Soekarnoputri

Secara resmi dukungan Amerika Serikat terhadap kelangsungan keutuhan wilayah Indonesia memiliki makna tersendiri. Dukungan itu berarti bahwa Amerika tidak menyetujui semua bentuk gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), konflik Maluku dan sebagainya yang intinya ingin memisahkan diri dari Indonesia.¹¹ Mengapa? Karena keutuhan wilayah (*national unity*) Indonesia sangat dibutuhkan

¹¹ Dukungan itu diakui oleh Departemen Luar Negeri dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri RI, *Refleksi Tahun 2003 dan Proyeksi Tahun 2003*, Jakarta, 8 Januari 2003.

bagi kelangsungan peran dan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.¹²

Jauh sebelum kasus Bali 2002 terjadi, Amerika Serikat bersama Singapura melihat bahwa terorisme Islam sebagai bahaya utama bagi keamanan nasional maupun regional.¹³ Pandangan ini mengalir seiring dengan serangan teroris pada gedung WTC dan Pentagon, di mana serangan itu diyakini sebagai serangan Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Indonesia jelas tidak sependapat, bahkan bersama Malaysia menentang pandangan tentang terorisme versi Singapura, Amerika Serikat dan Australia yang menyamakan istilah terorisme dengan Islam. Bagi Indonesia, terorisme menyangkut masalah politik yang erat kaitannya dengan dinamika politik domestik.

Meski terjadi perbedaan perspektif dalam melihat sumber terorisme yang ada, antara Indonesia dengan Amerika Serikat tetap terjalin satu hubungan yang saling menghormati. Hanya saja sejak Amerika di bawah kepemimpinan George W. Bush, kebijakan luar negerinya lebih banyak diinterpretasikan untuk kepentingan nasional (jika bukan untuk kepentingan kelompok Bush sendiri). Dalam bab dua telah disinggung sebelumnya bahwa perumusan kebijakan luar negeri Amerika atas dasar “strategi 4 D” (*defeat, deny, diminish, defend*) dalam memerangi terorisme global diterapkan dalam semua bidang kerjasamanya. Dari makna “4 D” tersebut tersirat satu kecemasan luar biasa sehingga menyebabkan negara sekuat dan sebesar Amerika harus menggeser fokus politik luar negerinya dari tantangan geopolitik global ke arah perang atas terorisme. Konsekuensinya politik luar negeri Amerika terlihat lebih agresif,

¹² Untuk mengetahui lebih jauh tentang Peran Amerika di Asia, termasuk Indonesia dari perspektif Amerika bisa lihat lebih jauh pada *America's Role in Asia: American Views*, a Report of the Asia Foundation Commissioned Task Force, California: The Asia Foundation, 2001.

¹³ Amitav Acharya, *Terrorism and Security in Asia: Redefining Regional Order?*, Working Paper No. 113, Australia: Murdoch University, Oktober 2004.

intrusive dan kaku ("rigid") dalam implementasinya.¹⁴ Untuk itu Amerika Serikat menyatakan Afghanistan sebagai "an incubator of Islamic terrorists". Dari pemahaman seperti ini bisa terbentuk satu opini internasional bahwa negara berpenduduk mayoritas Muslim merupakan turunan dari citra Afghanistan yang demikian itu. Opini ini bisa memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi citra Indonesia.

a. Reaksi Pemerintah sesudah 9/11

Indonesia di bawah pemerintah Megawati Soekarnoputri sebenarnya mengalami kesulitan di dalam merumuskan sikap resmi pemerintah atas politik luar negeri Amerika Serikat itu. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, yakni permintaan pemerintah Amerika Serikat pada Indonesia untuk mendukung penuh kebijakan perang melawan terorisme, dan atau tuntutan kelompok-kelompok Islam radikal agar pemerintah menentang kebijakan Amerika itu. Tak lama setelah serangan 9/11, Presiden Megawati berkunjung ke Amerika sebagai ungkapan rasa duka atas peristiwa 9/11. Pada kesempatan itu dalam pidato resminya Presiden Megawati secara langsung mengatakan:

"We mourn with America, that we share your grief and outrage, and that we strongly condemn terrorism in all of its forms and manifestations. ... Indonesia is ready to cooperate with the US and other civilized nations on counter-terrorism., ... in combating terrorism."¹⁵

¹⁴ Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat, <http://www.deplu.go.id/hub.bilateralind-AS.htm>

¹⁵ President Megawati Soekarnoputri dalam acara santap malam di Washington D.C. yang diadakan oleh United States-Indonesia Society, 19 September 2001, dan Joint Statement between the United States of America and the Republic of Indonesia, 19 September 2001, dalam *The Jakarta Post*, 21 September 2001. Lihat juga Rizal Sukma, "Indonesia and the September 11 Attacks: Domestic Reactions and Implications", *The Indonesia Quarterly*, Vol. Xxx, No. 3 Third Quarter, 2002

Tak lama setelah kunjungan Megawati itu terjadi perkembangan baru dalam hal janji Amerika pada Indonesia untuk membuka kembali kerjasama keamanan.

Pada 25 April 2002, janji Amerika Serikat pada Indonesia dalam hal kerjasama keamanan itu diwujudkan dalam bentuk pertemuan pertama Dialog Keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (*Indonesia-United States Security Dialogue I*). Bagi Amerika dialog semacam ini sangat penting guna mengikuti kemungkinan perkembangan atas penyebaran benih-benih terorisme serta upaya pencegahannya pada jangka panjang. Bagi Indonesia dialog ini akan membantunya dalam hal penguatan wawasan dan informasi tentang masalah keamanan bilateral, regional maupun internasional. Dialog yang dilakukan perwakilan masing-masing, Dirjen Strategi Pertahanan (Mayjen Sudrajat) dan Sekretaris Asisten Deputi Pertahanan bagi Urusan Asia dan Pasifik (Peter T.R. Brookes) mencakup masalah-masalah situasi keamanan regional; kebijakan keamanan nasional; perompak; reformasi militer; kebijakan *counter-terrorism*; perencanaan anggaran.¹⁶

Washington kemudian juga menjanjikan bantuan bagi Indonesia untuk membangun kembali ekonominya, dan berjanji pula untuk mendukung transisi Indonesia ke sistem demokrasi. Pemerintah Bush juga menjanjikan pembaruan hubungan militer antar kedua negara yang dibekukan sejak September 1999. Secara keseluruhan pemerintah AS menjanjikan bantuan keuangan sebesar 657,7 juta dollar AS ke Indonesia.¹⁷

Peristiwa agresi Amerika ke Afghanistan sebagai “konsekuensi” dari peristiwa 9/11 disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan lamban. Tidak adanya ketegasan pemerintah untuk menyatakan apakah mendukung agresi militer Amerika itu ataukah menentang keras secara resmi, memunculkan kerancuan sikap

¹⁶ U.S. Embassy Press Release, Joint Press Statement, “Indonesia-United States Security Dialogue I”, Jakarta, Indonesia, 25 April 2002, http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/joint_press.html, 29 Desember 2004.

¹⁷ *The Jakarta Post*, 22 September 2001

pemerintah. Sementara itu, begitu besar respon dan tingkat emosional masyarakat Indonesia atas agresi itu sehingga situasi saat itu menggiring masyarakat Indonesia pada posisi "melawan" tindakan agresi militer Amerika Serikat ke Afghanistan. Posisi ini dimunculkan bersamaan dengan semakin menonjolnya gerakan-gerakan kelompok radikal yang terlihat lebih "leluasa" di era reformasi. Namun tak lama, pada akhirnya, pemerintah menyatakan sikapnya secara terbuka dengan mengecam agresi itu. Demikian pula dengan serangan ke Irak. Ketegasan ini, dilihat oleh beberapa pengamat, hanya sebagai alasan politis saja demi kepentingan Megawati menjaring simpati dari masyarakat menjelang pemilu 2004.

Sebagaimana telah disinggung bahwa pandangan Indonesia (di bawah pemerintah Megawati Soekarnoputri) terhadap terorisme berbeda dengan pandangan Singapura dan Amerika Serikat. Baik Indonesia maupun Malaysia tidak melihat terorisme sebagai suatu ancaman besar seperti halnya Singapura, Amerika Serikat dan Australia. Ancaman ataupun aksi terorisme merupakan suatu masalah politik yang erat kaitannya dengan dinamika politik internal. Serangan teroris di AS bukan tidak mungkin menjadi satu paket dengan teori konspirasi dari pihak-pihak tertentu. Sejauh ini *counter-terrorism* dan politik di Indonesia memang sulit dipersatukan. Artinya, sasaran terorisme selama ini begitu jelas diarahkan kepada pusat-pusat kapitalis Amerika di Indonesia. Dr. Mahathir tidak dapat menerima laporan-laporan yang mengaitkan organisasi politik dan agama dengan jaringan global Al-Qaeda. Sementara Wakil Presiden, Hamzah Haz, memperlihatkan ketidaksenangannya dengan usaha Amerika untuk mendiskreditkan dunia Islam. Ia tidak hanya marah terhadap tuduhan AS atas Al-Qaeda dan Osama bin Laden sebagai induk terorisme, melainkan juga mengatakan bahwa serangan atas WTC mudah-mudahan akan membersihkan AS dari dosa-dosanya.¹⁸

b. Reaksi Pemerintah sesudah Bom Bali 2002

¹⁸ *Pikiran Rakyat*, 17 September 2001

Peledakan bom di Legian, Bali 2002, yang hanya selisih satu tahun setelah peristiwa WTC di New York, menjadi momentum semakin terfokusnya Indonesia dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Kedua peristiwa itu mengguncang dunia serta menegaskan bahwa teroris dapat bergerak dan menghancurkan negara sekuat Amerika serta mengguncang negara berkembang seperti Indonesia.

Kebijakan *counter-terrorism* yang dirupakan dalam strategi “4 D” tak terkecuali berlaku bagi Indonesia. Sebagai contoh, peristiwa wajib lapor diri WNI (Warga Negara Indonesia) yang bermukim di Amerika yang diterapkan dalam rangka *National Security Entry Exit Registration System* (NSEERS) merefleksikan satu citra bahwa penyusupan teroris bisa saja melekat pada diri WNI tersebut. Akibatnya, banyak WNI yang pulang ke Indonesia untuk sementara waktu, tidak bisa kembali ke Amerika. Situasi itu semakin diperparah dengan terjadinya penembakan dua warga AS di Timika (Papua); lalu serangkaian peledakan bom di Jakarta dengan sasaran ledak tempat-tempat kapitalis AS.

Dalam merespon hubungan yang cenderung menegang di tingkat masyarakat itu diperlukan satu penanganan yang tepat dan konstruktif lewat konsultasi yang erat antar kedua negara. Selama 2003, frekuensi pertemuan Indonesia di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Amerika di bawah Presiden George W. Bush begitu tinggi, antara lain pada pertemuan keduanya di jeda Sidang Umum PBB di New York (September) dan di Bali atas undangan Indonesia (22 Oktober). Pada pertemuan di Bali, Presiden Bush melakukan dialog dengan para pimpinan agama terkemuka, seperti KH. Hasyim Muzadi (Ketua NU); Ahmad Syafii Maarif (Ketua Muhammadiyah); Azumardi Azra (Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta); Pendeta Natan Setiabudi (Ketua Umum Gereja-gereja Indonesia) dan Ida Pedanda Gde Made Gunung (tokoh agama Hindu). Dialog itu menjadi dipertanyakan efektivitasnya karena tidak melibatkan para tokoh pesantren, yang menjadi terpojok dengan stereotype Amerika sebagai “benih terorisme”.

Namun di luar masalah itu, kunjungan Bush menghasilkan satu *Joint Statement* antara Indonesia dengan Amerika Serikat.¹⁹ Pokok-pokok *joint statement* itu berisikan penegasan kembali pemerintahan Bush atas kesatuan wilayah Indonesia; dukungan penuh atas transformasi dan demokrasi pada Indonesia; dukungan pada penyelesaian kasus Aceh dan Papua secara rekonsiliasi; mempererat kerjasama bilateral dalam hal perang melawan terorisme; serta pemulihan ekonomi dan sebagainya.

Hasil lain dari pertemuan frekuensi tinggi antara Presiden George W. Bush dengan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa terbentuknya *Congressional Indonesia Caucus* pada 9 Februari 2004. *Congressional Indonesia Caucus* yang dipimpin oleh Congressman Dan Burton bertujuan untuk menciptakan satu pengertian dan pemahaman yang tinggi dari para anggota Kongress Amerika Serikat terhadap setiap perkembangan politik terutama yang ada di Indonesia. Ini penting dan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk "mengcounter" segala isu yang terjadi, terutama berkaitan dengan citra Indonesia sebagai tempat penyemaian terorisme di mata Amerika. Terlepas dari kritikan bahwa pembentukan *caucus* semacam itu hanya akan mempermudah Amerika untuk mendikte kemauannya pada Indonesia, sebaliknya, ini bisa menjadi ajang dan "corong" bagi Indonesia untuk meluruskan semua hal yang mencitrakan negatif pada dirinya. Secara formal pemerintah Indonesia menghargai pembentukan caucus itu melalui Perwakilan Menlu RI dan Ketua DPR RI saat itu.

Pemerintah Indonesia menyambut baik pada terlaksananya *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* (BRMMCT) pada 4-5 Februari 2004. Pihak Amerika mendukung penuh atas pelaksanaan pertemuan itu. Demikian juga ketika saat itu diumumkan berdirinya *Jakarta Center for Law Enforcement* (JCLEC) yang berada di bawah koordinasi Polri dibantu oleh

¹⁹ Joint Statement Between The United States of America and The Republic of Indonesia, pada 22 Oktober 2003, <http://www.deplu.go.id/joinstatement.htm>

Australian Federal Police (AFP).²⁰ JCLEC ini kemudian diresmikan Presiden Megawati pada Juli 2004. Pihak Amerika mendukung penuh JCLEC ini mengingat keterlibatan Australia juga menjadi perpanjangan kepentingan Amerika didalamnya.

Salah satu faktor pendukung terbentuknya kerjasama ini ialah adanya keberhasilan kinerja Polri di dalam mengungkap pelaku peledakan bom Bali dalam waktu relative singkat. Ini menunjukkan komitmen tinggi Indonesia untuk mengungkap pelaku terorisme. Meski tidak sedikit bantuan kerjasama negara-negara lain (Australia, Jepang, Inggris dan AS) ke Indonesia, semua itu di bawah koordinasi Indonesia. Sebagaimana dituturkan oleh Ketua Tim Investigasi Bom Bali saat itu bahwa semua bantuan dan kerjasama mereka itu berada di bawah koordinasi ketat Indonesia guna menjaga batas-batas yuridiksi, dan tidak ada satupun dari mereka yang diperbolehkan melakukan investigasi di luar kontrol tim Indonesia.²¹ Dalam wawancara dengan tim peneliti, Ketua Tim menuturkan:

“Mereka orang-orang asing itukan ahli di bidang forensik saja. Ada ahli forensik dan ahli identifikasi. Kita harus bangga karena korban bom Bali itu 100% teridentifikasi, sementara peristiwa di Amerika (red. WTC) dan di Inggris hingga sekarang belum teridentifikasi.”²²

Namun Ketua Tim Investigasi ini meluruskan bahwa pihaknya selaku penyidik bekerja mengungkap semua ini berdasarkan *scientific crime investigation*, yaitu satu penelitian ataupun penyidikan berasaskan ilmiah yang menuju kepada fakta. Hal ini berbeda dengan kerja para intelijen yang bekerja berdasar cara deduktif. Di luar itu, yang terpenting, respon Indonesia atas “tekanan

²⁰ JCLEC ini mencakup 3 misi utama yaitu pendidikan dan pelatihan; petunjuk operasional dan bidang penelitian. Bentuk pelatihan bisa menjangkau pemberantasan narkoba, dan pencucian uang, laboratorium forensik, *financial investigation* dan *post-blast investigation*, *ibid*.

²¹ Wawancara dengan Ketua Tim Investigasi Peledakan Bom Bali, yang kini menjabat sebagai Kapolda Bali, di Denpasar-Bali, 26 Juli 2005, Pk. 10-11.30 Wita.

²² *Ibid*.

dan sorotan Internasional” akibat dari bom Bali itu ditunjukkan dengan berhasilnya Indonesia (di bawah Tim Investigasi tersebut tentunya) mengungkap dan mengidentifikasi pelaku dalam waktu yang relative singkat. Keberhasilan tim ini tidak menyimpulkan bahwa pelaku peledakan bom Bali adalah teroris dari kelompok Islam radikal. Kesimpulan yang demikian adalah wewenang dari Pengadilan Tinggi.

Sebagai kelanjutan Dialog Keamanan ke-satu yang berlangsung tahun 2003, Indonesia menyambut juga pelaksanaan dialog yang ke-dua, yakni *Indonesia-United States Security Dialogue II* di Washington DS, AS pada 22-23 April 2004. Ada pun pokok-pokok hasil pertemuan dialog itu sebagaimana dikutip dari “Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat” sebagai berikut:²³

- Dibentuk *Bilateral Defense Dialogue* antara *US Pacific Command*, militer Indonesia serta pejabat lain yang relevan.
- AS memberi klarifikasi atas kebijaksanaannya di wilayah Selat Malaka serta menghormati kedaulatan RI atas wilayah itu.
- Kedua Negara menganggap penting dan mendesak atas penghormatan dan perlindungan HAM dalam rangka penerapan kebijakan *counter-terrorism* yang memiliki perspektif berbeda di masing-masing pihak.

Khusus untuk pengamanan Selat Malaka, Amerika telah menawarkan kerjasama di bidang pengamanan perairan ini di bawah kerangka Inisiatif Keamanan Maritim Regional (*Regional Maritime Security Initiative/RMSI*). Pengamanan itu meliputi upaya deteksi, identifikasi dan monitor arus lalu lintas perairan Selat Malaka, yang bertujuan pada pembentukan database, daftar kemampuan dan peningkatan kapabilitas. Dalam kaitan itu, secara riil kemampuan Indonesia dalam monitoring maupun pengamanan Selat Malaka dirasa masih lemah, apabila dibandingkan dengan kemampuan Singapura dan Malaysia. Selat Malaka menjadi wilayah pengawasan

²³ Dokumen *Joint Statement Indonesia-United States Security Dialogue II*, Washington DC, AS, 22-23 April 2004.

di bawah tiga negara ini. Namun dalam hal kecepatan memperoleh informasi mengenai Selat Malaka (termasuk juga Selat Singapura), kemampuan Indonesia masih berada di bawah kemampuan kedua negara ini. Bahkan Indonesia baru bisa mengetahui informasi perkembangan selat setelah Singapura dan Malaysia memberitahu lebih dulu ke Indonesia.²⁴

Dalam masalah ini tampaknya pihak Amerika ingin mengambil peluang untuk turut dalam masalah pengamanan Selat Malaka. Dengan dalih sangat besar kemungkinan menyusupnya kekuatan terorisme di wilayah ini sehingga penting bagi Amerika untuk menempatkan pasukan militernya di wilayah ini, ternyata mendapat penolakan dari ketiga negara ini. Sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini cukup tegas dengan menyatakan:²⁵

“Selat Malaka bukan laut bebas, melainkan milik tiga Negara pantai, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Jadi, kejahatan terhadap kapal di Selat Malaka hanya digolongkan sebagai *arm robbery against ship*.”

Pernyataan itu mengkonter pandangan Amerika atas kemungkinan serangan terorisme di Selat Malaka. Demikian juga dengan pandangan dari Malaysia dan Singapura terhadap keinginan Amerika itu. Sikap demikian membuktikan bahwa kebijakan perang terhadap terorisme milik Amerika telah melewati batas-batas yuridiksi Indonesia. Karenanya, sampai di sini sikap pemerintah Indonesia harus tegas dalam membedakan antara “bantuan” yang sepadan danimbang tanpa memasuki area kedaulatan dengan “bantuan” yang menumpang pada isu tertentu yang secara tak langsung telah memasuki batas yuridiksi kita.

²⁴ Budi Suwarna, “Rentannya Posisi Indonesia di Selat Malaka”, *Kompas*, 18 Agustus 2005.

²⁵ *Ibid.*

Kebijakan Indonesia dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diawali dengan semangat dan harapan baru. Karena ini kali pertama Indonesia memilih presiden secara langsung di mana skala perubahan positif yang begitu tinggi sangat diharap oleh masyarakat. Lalu bagaimana kelangsungan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah Presiden baru ini ?

Masih berkaitan dengan kelangsungan dialog keamanan, Indonesia di bawah pemerintahan baru memanfaatkan forum dialog ini sebagai langkah menuju pendekatan hubungan yang lebih rasional. Pertemuan Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat di Washington pada 25 Mei 2005 menyetujui dibukanya kembali hubungan militer lewat IMET (*International Military Education and Training*). Untuk itu, kedua negara melihat pentingnya Dialog Keamanan RI-US serta Diskusi Pertahanan Bilateral antar kedua negara. Kedua akses ini ditujukan sebagai persiapan dibukanya kembali kerjasama militer itu. Sebenarnya program IMET telah dibuka ketika Menlu AS Condoleeza Rice menandatangani sertifikasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dalam investigasi kasus Timika, Papua. Namun itu belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Dialog keamanan Indonesia dengan Amerika Serikat yang ketiga berlangsung di Washington DC pada 25 Mei 2005 dengan isi pokok dialog sebagai berikut:²⁶

- Perhatian pada situasi keamanan global dan regional
- Perhatian penuh pada situasi keamanan nasional
- Manajemen peran militer dalam penanganan bencana
- Counter terrorism

²⁶ "Joint Statement: Indonesia-United States Security Dialogue III", <http://www.deplu.go.id/2005/detail.php?doc>

- Masalah hubungan militer RI-US

Pemerintahan Yudhoyono ini tampaknya ingin menegaskan kembali sikap dari Indonesia terhadap ancaman terorisme. Kepentingan Amerika pada Indonesia semakin ditunjukkan ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh. Tidak sedikit bantuan kemanusiaan Amerika Serikat yang diberikan ke Indonesia. Karenanya poin penanganan bencana juga dimasukkan ke dalam dialog keamanan yang ke 3 ini. Peristiwa Bom Bali Oktober 2005 seakan menghempaskan kembali jaminan keamanan Indonesia khususnya di Bali bebas dari ancaman teroris. Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, image Indonesia sebagai *terrorist breeding ground* kembali melekat dan bisa mengguncang keseimbangan Indonesia di dalam mempertaruhkan kepentingan nasional di tengah kepentingan internasional. Yang harus dicermati ialah jangan sampai dalam posisi demikian, Indonesia tidak memiliki pilihan lain, dan mendukung sepenuhnya kebijakan *war against terrorism*.

Meski kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono masih terbilang singkat, babak baru pemerintahannya tetap menghadapi tantangan lama, yakni menggempur terorisme. Ia dalam diplomasinya menegaskan bahwa gerakan terorisme yang bersemayam di Indonesia bukan lantaran mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Terorisme bukan milik agama tertentu. Terorisme sudah menjadi semacam *public enemy* yang harus disikapi dan dihadapi secara bersama. Guna memangkas ketidakpahaman AS yang mengaitkan terorisme dengan Islam menurut pandangan AS, Presiden dalam kunjungannya ke Amerika menawarkan satu hal berupa dibukanya kesempatan berdialog antara tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini dimaksudkan untuk menjembatani ketidakpahaman pemikiran Islam di Indonesia oleh Amerika.

Indonesia di bawah Yudhoyono juga menegaskan kembali lima pilar politik luar negerinya, yang kini tidak lagi berpijak pada diplomasi “mendayung antara dua karang” melainkan pada

“mengarungi samudra yang penuh guncangan”.²⁷ Realisasi dari diplomasi itu didasarkan pada pilar-pilar politik luar negeri bebas aktif, yakni tidak menjadi anggota pakta militer manapun; tidak mengizinkan adanya pangkalan militer asing di wilayah Indonesia; mengutamakan kebebasan berpikir dan kemandirian bertindak berdasar sikap konstruktif; identitas internasional; konektifitas; dan pentingnya bebas aktif berlandas pada corak nasionalisme Indonesia.²⁸ Prinsip demikian sudah seharusnya dipahami oleh Amerika Serikat. Babak baru kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono memang banyak menghadapi rintangan sekaligus ujian dari dalam negeri sendiri.

Menyusul terjadinya bom Bali II pada 1 Oktober 2005, usulan peningkatan status Desk Antiteror kembali mencuat. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam, Widodo AS yang mengakui bahwa Desk Antiteror memiliki keterbatasan, sehingga lembaga ini perlu ditingkatkan menjadi badan atau lainnya, yang penting efektif. Menurut Widodo, struktur dan tanggung jawab lembaga itu juga bisa dikembangkan, yakni bisa di bawah presiden atau tetap di bawah Menko Polhukam.²⁹ Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutanto mengungkapkan pentingnya Indonesia memperkuat lembaga dan instrumen hukum. Misalnya dengan memiliki UU semacam *Internal Security Act* yang dimiliki Singapura dan Malaysia, atau *Patriot Act* yang dimiliki AS. Sutanto menegaskan bahwa dengan adanya payung hukum tersebut seseorang bisa ditangkap dengan bukti informasi intelijen setelah diajukan ke pengadilan negeri lebih dulu.³⁰

Usulan lainnya adalah peningkatan peran militer dalam langkah kontra terorisme. Bahkan muncul usulan untuk mengaktifkan kembali Komando Teritorial (Koter) yang justru menimbulkan perdebatan. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berpendapat bahwa Koter adalah kemampuan TNI yang dapat

²⁷ *Men's Obsession*, edisi khusus bulan Agustus 2005.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat, “Menhan: TNI Bisa Bertindak Setiap Saat”, dalam *Kompas*, 15 Oktober 2005.

³⁰ *Ibid.*

disumbangkan kepada kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan pertahanan seperti terorisme. Jika diperlukan, TNI bisa sewaktu-waktu bertindak langsung di lapangan, mencegah, dan menangkal terorisme. Menurut Juwono, pelibatan TNI sudah diatur UU No. 34/2004 tentang TNI dan UUD 1945, khususnya pasal 30 tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Namun, di kalangan masyarakat muncul kekhawatiran bahkan tidak menyetujui keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai operasi militer selain perang, termasuk pengoperasian Koter. Hal ini diungkapkan oleh Letjen (Purn) Agus Widjojo, mantan Kepala Staf Teritorial yang menyatakan bahwa kunci untuk mengatasi aksi terorisme adalah dengan mengefektifkan intelijen dan kemampuan aparat penegak hukum menangkap pelaku terorisme. Bukan dengan menggunakan koter, karena koter itu bukan intelijen. Agus juga mempertanyakan sejauhmana batasan kewenangan koter, jika tugasnya adalah mengawasi masyarakat.³¹

Upaya *counter-terrorism* sebagaimana telah diniatkan dalam isi Dialog Keamanan Indonesia-Amerika Serikat ke-3 menjadi tantangan ke depan yang berat bagi Indonesia. Menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, khususnya dalam mengakomodir kepentingan Amerika berkaitan dengan *war against terrorism* bukanlah hal mudah. Sesuai dengan komitmen awal Indonesia tentang kepentingan nasional yang lebih diutamakan, upaya memberantas terorisme di dalam negeri tidak dilakukan dalam konteks kepentingan pihak AS. Bahwa terorisme sudah menjadi *public enemy* yang melanda wilayah Indonesia itulah yang tengah diburu untuk diberantas oleh Indonesia. Dengan tertangkapnya gembong teroris di Indonesia, Azhari (yang warga Malaysia) dan kelompoknya, bisa menjadi bukti kegigihan Indonesia dengan aparat keamanannya dalam memburu terorisme. Bagaimanapun ini mencerminkan satu prestasi tersendiri bagi citra Indonesia di mata internasional.

³¹ *Ibid.*

Penutup

Respon Indonesia terhadap kebijakan Amerika Serikat atas *war against terrorism* tidak didasarkan pada kepentingan AS semata, melainkan pada kepentingan nasional Indonesia. Sikap penolakan tegas (meski terbilang terlambat) pemerintahan Megawati Soekarnoputri terhadap serangan AS ke Afghanistan maupun ke Irak di satu sisi membuktikan arah yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Terlepas dari kritisi publik atas sikap Megawati itu yang bernuansa komoditas politik domestik, setidaknya ini bisa menjadi indikasi bahwa Indonesia lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan negara adidaya ini.

Hubungan AS dengan Indonesia adalah menjadi bagian peta kekuatan AS di Asia Tenggara yang sangat penting. Peristiwa 9/11 (2001) disertai dengan peledakan bom Bali (2002) yang mengguncang dunia "mempertemukan" dua kepentingan Amerika dan Indonesia untuk menghadapi dan mencegah terorisme. Berbagai bantuan dan kerjasama antar mereka mengalami peningkatan. Namun bagi Indonesia, semua bentuk kerjasama itu tidak semata mencerminkan Indonesia mengikuti dan masuk dalam lingkaran peta politik luar negeri AS yang menyatakan perang melawan terorisme global. Ada kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangkan yaitu pengusutan serta upaya minimalisasi ancaman teroris di dalam negeri sendiri. Semua itu ditujukan untuk memberi dan menjaga kelangsungan perbaikan dan peningkatan ekonomi dalam negeri. Jika aktivitas sentra-sentra ekonomi terganggu karena ulah teroris akan runyamlah stabilitas nasional kita.

Pemerintah menyadari bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler. Untuk meredam setiap gejolak masyarakat terhadap sikap AS yang kontroversial, diperlukan sikap kehati-hatian pemerintah di dalam mengakomodir gejolak itu. Untuk itu diperlukan satu sikap ataupun respon yang tegas dari pemerintah di dalam menyikapi semuanya dengan tujuan terjadi keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasionalnya. Dalam kasus menghadapi ancaman terorisme, kebetulan kepentingan Indonesia "sejalan" dengan kepentingan AS. Namun ancaman

terorisme menurut perspektif Indonesia adalah ancaman terorisme yang berada di dalam wilayah Indonesia, bukan ancaman terorisme global menurut perspektif AS.



Bab 5

UPAYA PENINGKATAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – AS PASCA 9/11

Indriana Kartini & Rosita Dewi

Sejak peristiwa 11 September 2001 pemerintah Bush berusaha meyakinkan dunia bahwa ancaman terbesar dalam politik dunia kontemporer adalah terorisme global yang diarahkan ke kelompok militan Islam Al Qaeda. Selanjutnya, AS menggalang komunitas internasional untuk sejalan dengan AS dalam memerangi terorisme, tak terkecuali Indonesia. Amerika sangat berkepentingan untuk memperoleh dukungan dari Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Apalagi secara geopolitik, Indonesia berada di jalur perairan Selat Malaka, yang strategis di kawasan Asia Tenggara.

Jika di masa Perang Dingin, Indonesia menjadi partner penting AS dalam membendung komunisme, maka dalam politik dunia saat ini pemerintah AS menginginkan dukungan yang sama dari Indonesia dalam konteks perang melawan terorisme. Apalagi, sejak peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 terjadi, terorisme kemudian menjadi persoalan bersama yang “mempererat” hubungan Indonesia – AS. Peristiwa bom Bali kemudian menjadi semacam “wake-up call” bagi Indonesia atas munculnya ancaman terorisme seperti halnya peristiwa 11 September bagi AS.

Meskipun pemerintah Indonesia di masa Megawati Soekarnoputri memberikan dukungan terhadap AS dalam upaya memerangi terorisme, namun pemerintah Megawati bersikap kritis terhadap kebijakan AS dalam hal aksi militer terhadap Afghanistan dan Irak. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Menko Polkam saat itu mengeluarkan kritik tajam bahwa

invasi AS ke Irak merupakan awal dari *world disorder* dan akan menjadi preseden buruk bagi dunia bahwa sebuah negara akan melakukan apa saja terhadap negara lain dan tidak selalu tunduk pada Dewan Keamanan PBB.¹ Sementara itu, publik Indonesia juga menyuarakan penentangannya terhadap kebijakan AS. Persepsi negatif Indonesia atas kebijakan AS tersebut tentunya menimbulkan ketegangan dalam hubungan Indonesia – AS.

Sebenarnya, apabila kita mencermati hubungan Indonesia – AS dalam satu dekade terakhir, terdapat fluktuasi yang cukup serius dalam beberapa aspek. Misalnya, hubungan militer kedua negara belum mencapai kondisi normal. Sejak pecahnya kerusuhan Santa Cruz tahun 1991, pemerintah AS memutuskan hubungan militer dengan Indonesia lewat penghentian program *International Military Education and Training* (IMET). Menyusul terjadinya kerusuhan di Dili, Timor Timur pada tahun 1999, pemerintah AS kemudian mengeluarkan embargo militer atas pembelian senjata dan suku oleh Indonesia. Sanksi militer tersebut diambil pemerintah AS karena mereka meyakini akan keterlibatan militer Indonesia atas dua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum lepasnya Timor Timur dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, upaya pemulihan hubungan militer kedua negara telah diupayakan oleh kedua negara. Apalagi, dalam kampanye perang global melawan terorisme, AS membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia yang mustahil diperoleh tanpa dukungan militer Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan Amerika sama-sama menyadari pentingnya mempererat hubungan keduanya. Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan kehadiran AS karena tidak dapat dipungkiri bahwa AS merupakan pendonor bantuan bagi Indonesia. Pemerintah AS sendiri juga membutuhkan kehadiran Indonesia dalam rangka mengimplementasikan kebijakan barunya yang berupa *war against terrorism*. Posisi geopolitik Indonesia yang sangat strategis dan potensi jumlah penduduk yang sangat besar berkaitan erat dengan

¹ Lihat, “RI-Iran Sepakat Cegah Perang AS Melawan Irak”, dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3422>, 18 Maret 2003.

kepentingan AS, maka AS berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Hubungan keduanya semakin erat pasca tragedi 9/11. Pemerintah AS dengan kebijakan *war against terrorism* (perang terhadap terorisme) tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan negara-negara lain. Untuk itu perlu bagi AS untuk membentuk suatu aliansi baru guna mendukung kebijakannya. Perang terhadap terorisme telah mendominasi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dari sudut pandang Washington. *Pertama*, AS meneriakkan agar Indonesia mendukung kebijakan global AS untuk memerangi terorisme. *Kedua*, faktor yang berkaitan dengan tuduhan AS tentang ancaman teroris yang bersarang di Indonesia.²

Indonesia memang termasuk negara yang mendapat bujukan ekonomi dalam rangka “*war against terrorism*.” Pasca 9/11 pemerintah AS menggunakan beberapa cara dalam rangka mensukseskan kebijakannya ini, antara lain dengan cara diplomasi melalui organisasi-organisasi internasional, penjatuhan sanksi ekonomi, penguatan hukum, penggunaan kekuatan militer dan juga dengan bujukan berupa bantuan ekonomi.³ Tulisan ini menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan AS dalam meningkatkan hubungan kedua negara baik di bidang keamanan, sosial politik, dan ekonomi dalam kerangka menghadapi persoalan terorisme global. Cakupan dari penjelasan di bagian ini lebih ditekankan pada dinamika hubungan pada masa sesudah tragedi 9/11.

Indonesia dan Perang Melawan Terorisme

Bagi publik Indonesia, tragedi 9/11 di Amerika Serikat merupakan peristiwa yang mengejutkan sekaligus menakutkan. Meski demikian,

² Anthony L. Smith, “Reluctant Partner: Indonesia’s Response to U.S. Security Policies”, Asia-Pacific Center for Security Studies, Maret 2003, dalam <http://www.apcss.org>.

³ <http://www.usembassyjakarta.org>, “Issue Brief for Congress : Terrorism, the Future and US Foreign Policy”, 11 April 2003.

publik Indonesia sangat berhati-hati dalam memberikan dukungan kepada AS dalam level internasional. Banyak kalangan yang meragukan keterlibatan Osama bin Laden dalam peristiwa ini. Lebih jauh lagi, banyak kalangan Muslim yang meyakini bahwa AS akan menggunakan kampanye “perang melawan terorisme” sebagai dalih untuk menyerang dunia Muslim. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa CIA berada dibalik peristiwa 9/11 dan bom Bali 12 Oktober 2002. Berdasarkan survei Pew pada Juni 2003, sekitar 83 % masyarakat Muslim Indonesia memiliki impresi negatif terhadap AS.⁴ Sementara itu, menyusul terjadi bom Marriott pada Agustus 2003, beberapa kalangan Muslim di Indonesia juga meyakini bahwa CIA terlibat dalam peledakan tersebut dan sengaja mengeksploitasi isu Jamaah Islamiyah (JI) yang mereka anggap sebagai organisasi “hantu” untuk menutupi tujuan utama AS dalam mendiskreditkan Islam, mendestabilkan Indonesia sekaligus menguasai Indonesia.⁵

Sementara itu, pemerintah Indonesia di masa Presiden Megawati juga bersikap hati-hati dalam memberikan dukungan penuh terhadap kampanye “perang melawan terorisme” yang dikumandangkan AS. Menyusul tragedi 11 September, Presiden Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Bush. Kunjungan tersebut menghasilkan *Joint Statement* untuk memperkuat kerja sama bilateral bidang Kontra Terorisme yang tertuang dalam komitmen pemerintah AS untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Pemberian bantuan sebesar 130 juta dollar untuk tahun fiskal 2002, khususnya untuk reformasi hukum dan peradilan di Indonesia.

⁴ Kumar Ramakrishna, “US Strategy in Southeast Asia: Counter-Terrorist or Counter-Terrorism?”, dalam Kumar Ramakrishna, *After Bali: The Threat of Terrorism Southeast Asia*, (Singapore : World Scientific Printers Pte. Ltd, 2003)

⁵ Lihat, Derwin Pereira, “Indonesian Terrorist Bombings : Fact and Fiction”, *The Straits Times*, 15 Agustus 2003, dalam *Ibid*, hlm. 323.

2. Tambahan bantuan sebesar 10 juta dollar bagi para pengungsi di daerah konflik, khususnya di Ambon.
3. Bantuan sebesar 5 juta dollar untuk mendukung upaya rekonsiliasi, pembangunan sekolah dan infrastruktur lainnya, serta pembangunan ekonomi di wilayah Aceh.
4. Bantuan sebesar 10 juta dollar bagi pelatihan perwira polisi Indonesia dalam konteks membangun *capacity building* penegak hukum.

Namun, pemerintah Indonesia menunjukkan sikap hati-hati dalam memberikan dukungan terhadap “Perang melawan terorisme” yang dicanangkan Bush. Pemerintah Megawati masih menganggap bahwa terorisme bukan ancaman nyata bagi Indonesia. Washington pun menangkap sinyal negatif dari pemerintah Indonesia dan menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam menangani terorisme. Hal ini berbeda dengan negara tetangga Indonesia, yakni Singapura dan Malaysia yang dianggap cepat dalam menanggapi ancaman terorisme.

Akan tetapi, peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 kemudian mengubah sikap pemerintah dan sebagian publik Indonesia dan memandang terorisme sebagai ancaman nyata. Sejak saat itu Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi terorisme yang diwujudkan dengan keberhasilan Indonesia menangkap 20 tersangka pemboman Bali dan menemukan mata rantai peledakan bom Bali dengan peledakan bom sebelumnya yang terjadi di Indonesia. Sejak peristiwa bom Bali, Indonesia dan AS berbagi kepentingan yang sama, yakni memerangi terorisme. Dan dapat diungkapkan bahwa Indonesia pada akhirnya bergabung dengan aliansi dunia yang dibangun AS dalam “perang melawan terorisme”.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam memandang persoalan terorisme, namun kedua pemimpin negara menyadari perlunya konsultasi yang erat antar kedua negara, khususnya dalam upaya *counter terrorism*. Hal ini dapat dicermati dalam frekuensi pertemuan kedua pemimpin negara. Misalnya, pada tahun 2003, Presiden Megawati telah bertemu dua kali dengan Presiden Bush,

yakni di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September di New York dan ketika kunjungan Presiden Bush ke Bali atas undangan Presiden Megawati pada 22 Oktober 2003.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Megawati memfasilitasi pertemuan Presiden Bush dengan pimpinan agama terkemuka di Indonesia yakni KH. Hasyim Muzadi (Ketua Nahdlatul Ulama), Prof.Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif (Ketua Muhammadiyah), Prof.Dr. Azyumardi Azra (Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta), Pendeta Natan Setiabudi (Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja Indonesia) dan Ida Pedanda Gde Made Gunung (tokoh agama Hindu). Dalam *Joint Statement* yang dihasilkan pada pertemuan tersebut, Presiden Bush menyambut baik implementasi dari *Joint Statement* yang dihasilkan pada 19 September 2001. Beberapa poin penting yang di garis bawahi dalam pertemuan tersebut antara lain ⁶ :

1. Presiden Bush menghargai keberhasilan pemerintah Indonesia dalam perang melawan terorisme, termasuk penangkapan dan pengadilan para pelaku yang bertanggung jawab atas pemboman di Bali, serta upaya yang terfokus dalam mengungkap jaringan teroris.
2. Kedua presiden sepakat bahwa terorisme merupakan ancaman berkelanjutan terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta bertekad untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam perang melawan terorisme, termasuk melalui pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan pertukaran informasi.
3. Kedua Presiden menolak pengkaitan antara terorisme dengan agama dan setuju bahwa serangan teroris terhadap warga sipil yang tidak berdosa tidak mungkin dapat dibenarkan. Mereka menekankan bahwa terorisme merupakan pelanggaran terhadap kebenaran ajaran semua agama dan sepakat untuk bekerja sama guna meningkatkan dialog antar agama di negara mereka dan di luar negeri.

⁶[Http://www.indonesian_embassy.or.jp/menui/information/state/bali_bak](http://www.indonesian_embassy.or.jp/menui/information/state/bali_bak)

4. Presiden Bush menegaskan bahwa perang melawan terorisme bukanlah perang melawan Islam dan menyampaikan kekaguman dan penghargaan yang besar atas sejarah panjang toleransi beragama dan paham Islam yang moderat di Indonesia.
5. Kedua Presiden beranggapan bahwa hubungan bilateral Indonesia – AS yang dibangun atas dasar saling menghormati dan kemitraan yang sejajar merupakan kepentingan nasional kedua negara. Mereka bertekad untuk memperdalam serta memperkuat hubungan yang penting ini dan bekerja sama guna mewujudkan perdamaian serta kemakmuran dunia.

Bantuan AS dalam Perang Melawan Terorisme

Pemerintah AS sangat mengharap partisipasi aktif dari pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam memerangi terorisme, pemerintah AS memberikan bantuan melalui program bantuan anti-terorisme (*Anti-Terrorism Assistance /ATA*). Program bantuan dari Kongres AS ini dikelola oleh Departemen Luar Negeri AS, khususnya bidang Keamanan Diplomatik. Program ATA di Indonesia bermula pada tahun 2001 tatkala Departemen Luar Negeri AS melakukan penilaian terhadap kapabilitas Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam memerangi terorisme. Hasil dari penilaian tersebut berupa rencana untuk melatih 100 investigator, 150 personil SWAT (*special weapons and tactics*) dan 50 teknisi penjinak bom (*bomb disposal*) dan investigator pasca ledakan untuk periode tiga tahun.⁷

⁷ Program bantuan ini berakhir pada 30 September 2005. Namun, pihak AS dan Indonesia berencana untuk melanjutkannya hingga tiga tahun mendatang. Lihat, William Wise, *Indonesia's War on Terror*, United States-Indonesia Society, Agustus 2005, hlm. 68.

a. Penguatan Aparat Keamanan

Program ATA di Indonesia dimulai pada 2003. Pada Juli 2003 program tersebut menghasilkan 30 investigator kontra terorisme yang dikirim ke bagian *Counter-Narcotics Task Force* yang dikepalai Jenderal Gorys Mere. Pada Oktober 2003 program ATA menghasilkan *Crisis Response Teams* (CRT) dan teknisi penjinak bom yang akan menjadi bagian utama dari pasukan Detasemen 88. Pada Maret 2004 Detasemen 88 secara resmi berdiri. Pada tahun fiskal (1 Oktober 2004 – 30 September 2005), program ATA berencana melatih dua tim CRT dan menyelenggarakan kursus Instruktur CRT. Tim ini akan diturunkan di daerah Jawa Tengah dan Sulawesi. Pemerintah AS mengeluarkan \$20 juta untuk program ATA dengan tambahan dana yang direncanakan sebesar \$14 juta untuk dua tahun mendatang.⁸

Tabel 1.

Program Bantuan Anti-Terrorisme (ATA) AS untuk Indonesia (dalam dollar AS)	
Tahun Fiskal 2003	\$ 8,0 juta
Tahun Fiskal 2004	\$ 5,8 juta
Tahun Fiskal 2005 (perkiraan)	\$ 5,1 juta
Tahun Fiskal 2006 (perencanaan)	\$ 8.0 juta
Tahun Fiskal 2007 (pengajuan)	\$ 6,0 juta
Total	\$ 32,9 juta

Sumber : William Wise, *Indonesia's War on Terror*, United States-Indonesia Society, Agustus 2005.

Sebagai wujud dukungan terhadap Indonesia, pemerintah AS menyediakan dana sebesar 50 juta dollar untuk program keamanan jangka panjang dan kontra terorisme. Dari jumlah tersebut, sekitar 47 juta dollar akan digunakan untuk membangun *capacity building* Kepolisian RI dan sekitar 4 juta dollar diperuntukkan bagi pelatihan

⁸ *Ibid.*

militer. Program kontra terorisme yang diajukan AS untuk pemerintah Indonesia antara lain⁹ :

1. Pelatihan dan bantuan bagi Kepolisian RI sebesar 31 juta dollar (2001-2004) ;
2. Bantuan tambahan bagi Kepolisian RI, termasuk pembentukan unit khusus *counterterrorism* sebesar 16 juta dollar (2002) ;
3. Bantuan teknis untuk memutuskan jaringan finansial teroris dan membangun rezim anti *money-laundering* Indonesia;
4. Bantuan *Terrorist Interdiction Program*, yang menyediakan bantuan teknis dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan;
5. *Regional Counterterrorism fellowship* untuk pelatihan *counterterrorism* bagi militer Indonesia sebesar 4 juta dollar (2002-2003) ;
6. *International Military Education Training* (IMET) untuk militer Indonesia sebesar 400.000 dollar jika disetujui Kongres (2003).

Sementara itu, sebagai tambahan program ATA, pemerintah AS menyediakan bantuan untuk meningkatkan kapabilitas polisi dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Program ini dimaksudkan berjalan seiring dengan kebijakan Presiden Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah AS meyakini bahwa dengan menciptakan sistem peradilan kriminal yang lebih profesional, tidak korup – yang melibatkan polisi, jaksa dan hakim – akan menyukkseskan penangkapan, penuntutan, dan pemberian hukuman bagi teroris internasional. Oleh karena itu, Departemen Kehakiman AS mengeluarkan bantuan *The International Criminal Investigative Training Assistance Program* (ICITAP) untuk meningkatkan *capacity building* Polri. Program ini juga dapat digunakan untuk investigasi kontra terorisme dalam bentuk kegiatan seminar bagi pejabat polisi senior dan mendiskusikan isu keuangan teroris dalam proyek investigasi *cyber crimes*. ICITAP juga

⁹ *Fact Sheet: US, Indonesia Start Long-Term Counter-terrorism Program*, 2 Agustus 2002.

mendanai program forensik di Surabaya yang meliputi respons terhadap insiden teroris.¹⁰

b. Pemulihan Hubungan Militer Indonesia – AS

Selain di atas, pemerintah AS mulai mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia di bidang militer. Karena itu, isu hubungan militer dengan Indonesia menjadi agenda utama dalam pemerintah Bush. Laporan dari Dewan Hubungan Luar Negeri AS (*Council on Foreign Relations*) dan *Rand Corporation* pada tahun 2001, yang dipublikasikan beberapa saat sebelum tragedi 9/11, menganjurkan supaya pemerintah Bush memperkuat kerja sama dengan Indonesia secara umum dan militer Indonesia secara khusus. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memerangi peningkatan pengaruh kelompok radikal Islam, sekaligus mempersiapkan pembangunan basis pertahanan yang kuat untuk menghadapi Republik Rakyat China di wilayah Asia Tenggara. Laporan dari Dewan Hubungan Luar Negeri AS yang bertajuk “The United States and the Southeast Asia: A Policy Agenda for the New Administration” ini patut diperhatikan karena dirancang oleh Dov Zakheim, perancang Pentagon di masa pemerintahan Reagan, yang sekarang bekerja di Pentagon.¹¹

Hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat mengalami problematika sejak peristiwa kekerasan di Dili tahun 1991. Dalam peristiwa tersebut lebih dari 200 demonstran tertembak yang melibatkan militer Indonesia. Pemerintah AS kemudian memutus bantuan dan kerjasama militer kepada Indonesia sebagai protes atas aksi pelanggaran HAM yang melibatkan militer Indonesia. Hubungan militer Indonesia kembali mengalami ketegangan tatkala terjadi peristiwa kekerasan di Timor Lorosae

¹⁰ Lihat, Wise, *Indonesia's War ...*, United States-Indonesia Society, Agustus 2005, hlm.72-73.

¹¹ Lihat, John Gershman, “Fighting Terrorism, Undermining Democracy in Indonesia”, dalam *Foreign Policy in Focus*, <http://www.fpiif.org>, September 2001 hlm. 2.

segera setelah pelaksanaan referendum untuk kemerdekaan pada 1999. Sebagai respons atas peristiwa tersebut, Kongres AS mempertegas pembatasan dalam hubungan militer dengan Indonesia. Kongres AS kemudian mengeluarkan UU baru yang membatasi penjualan senjata dan pelatihan militer sampai sejumlah kriteria tertentu dipenuhi, antara lain¹²:

1. Resolusi damai dalam menghadapi situasi di Timor Lorosae, termasuk mengadili pejabat-pejabat militer Indonesia yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan tahun 1999;
2. Mengadili elemen milisi yang bertanggung jawab atas tewasnya tiga orang staf PBB di Atambua pada tahun 2000;
3. Berupaya keras menghargai HAM di propinsi lain, khususnya di wilayah Aceh.

Pemerintahan Bush kemudian mengakui bahwa militer Indonesia masih harus memenuhi kriteria tersebut, dan dalam beberapa hal bagi pemerintah AS, situasi di Indonesia justru memburuk. AS menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang belum mengadili beberapa perwira yang memegang posisi pemberi komando di Timor Lorosae tahun 1999. Bahkan beberapa perwira tersebut justru mendapat promosi kenaikan pangkat. Selain itu, pemerintah AS juga meragukan transparansi anggaran militer Indonesia. Sejumlah ahli memperkirakan hanya 25-30% anggaran militer diperoleh dari dana pemerintah, sedangkan sisanya diperoleh melalui pembiayaan “informal”. Pemerintah AS juga memandang bahwa militer Indonesia masih melakukan pelanggaran HAM di Aceh dan Papua Barat.¹³

Sebelum 9/11, usulan untuk memperkuat kembali hubungan militer Indonesia – AS ditentang oleh beberapa tokoh kunci di

¹² Lihat, Anthony L. Smith, “Reluctant Partner: Indonesia’s Response to U.S. Security Policies”, Asia-Pacific Center for Security Studies, Maret 2003, dalam <http://www.apcss.org>

¹³ Lihat, Gershman, “Fighting Terrorism...”, dalam Foreign Policy in Focus, <http://www.fpiif.org>, September 2001, hlm. 2.

Kongres AS dan kelompok-kelompok HAM karena terus berlangsungnya pelanggaran HAM oleh militer Indonesia dan bertahannya kekebalan hukum di kalangan pejabat tinggi militer Indonesia yang diduga bersepakat dengan pelanggaran HAM di Timor Lorosae dan di berbagai daerah di Indonesia.

Namun demikian, menyusul tragedi 9/11, pemerintah Bush kemudian memberikan keringanan dalam pembatasan terhadap hubungan militer antara Indonesia dan AS. Kendati pemerintah Bush belum meminta Kongres AS untuk mencabut embargo terhadap penjualan senjata dan pelatihan militer bagi Indonesia, namun pemerintah Bush telah mengambil kebijakan terpisah di bagian lain. Oleh karena itu dalam *Joint Statement* yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Megawati dan Presiden Bush pada 19 September 2001, tertuang beberapa kesepakatan antara lain :

1. Memperluas hubungan sederhana dan memulihkan pertemuan teratur antara militer Indonesia dan AS untuk mendukung upaya Indonesia melaksanakan reformasi dan profesionalisasi militer. Aktivitas-aktivitas yang terlibat di dalamnya antara lain berupa partisipasi Indonesia dalam berbagai konferensi, latihan multilateral, pertukaran pendapat dalam soal-soal seperti reformasi militer, hukum militer, investigasi, pembiayaan dan transparansi anggaran, termasuk operasi gabungan untuk penanggulangan masalah kemanusiaan dan pemberian bantuan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan Dialog Keamanan secara bilateral di bawah pengawasan menteri pertahanan non-militer dari kedua negara untuk mendorong “peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam hal pertahanan dan keamanan di Indonesia.
3. Meminta Kongres AS menganggarkan 400.000 dollar AS untuk mendidik masyarakat sipil di Indonesia tentang masalah-masalah pertahanan melalui program *International Military Education and Training* (IMET) yang diperluas.
4. Mencabut embargo terhadap penjualan komersial barang-barang pertahanan yang tak mematikan ke Indonesia, dengan syarat

setiap permintaan individual harus dipelajari kasus demi kasus, sesuai dengan praktek standar yang diberlakukan di Amerika Serikat.

Sementara itu, untuk tahun fiskal 2005, Presiden Bush mengajukan bantuan bagi Indonesia kepada Kongres sebesar 600.000 dollar AS untuk pelatihan militer, lebih besar dari anggaran yang dibekukan pada tahun 2004 sebesar 459.000 dollar AS. Meskipun pemerintah Bush berupaya meyakinkan Kongres, namun tekanan dari aktivis HAM tetap membuat Kongres AS bersikap kritis. Pada Oktober 2004, 45 anggota *House of Representative* menyampaikan pernyataan tertulis kepada Menlu Colin Powell yang isinya menentang perbaikan hubungan militer dengan Indonesia dan menegaskan “grave concerns over the prospects of real military reforms” in a “massively corrupt” institution riddled with “impunity.” Mereka juga memandang bahwa langkah pemerintah AS bersifat “premature, unwarranted, and unwise.”¹⁴ Pada konteks ini terlihat bahwa Bush sebenarnya berupaya ingin meningkatkan hubungan militer kembali dengan Indonesia. Baginya ini dianggap penting mengingat normalisasi hubungan militer AS dengan Indonesia sebenarnya telah diagendakan sebagai strategi bagi penguatan kemampuan Indonesia mencegah dan mengantisipasi ancaman terorisme. Tidak hanya itu, AS juga sebenarnya secara perlahan memasukkan Indonesia ke dalam bagian strategi militernya yang berupa tindak *counter-terrorism*.

Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Megawati dengan Presiden Bush pada 19 September 2001, maka kedua negara sepakat untuk melaksanakan Dialog Keamanan Indonesia – AS ke-1 (*Indonesia – U.S. Security Dialogue/ IUSSD*) di Jakarta pada 24-25

¹⁴ Lihat, Frida Berrigan, “Balancing Security and Democracy : Lessons from Indonesia”, 25 Oktober 2004.

April 2002. Adapun pokok-pokok *Joint Press Statement* pertemuan ke-1 IUSSD, antara lain¹⁵:

1. Pemerintah AS menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia guna memperkuat demokrasi dan implementasi reformasi di Indonesia.
2. Kedua negara sepakat bahwa peristiwa 11 Setember telah memperkuat kebutuhan untuk memfokuskan pada upaya bersama guna melawan terorisme internasional dan ancaman trans-nasional lainnya.
3. Kedua negara sepakat untuk mengeksplorasi kerja sama bilateral dan regional di masa datang untuk memberantas perompakan.
4. Kedua negara sepakat bahwa proses reformasi TNI yang sedang dilakukan harus mendapatkan dukungan dan pemahaman dari komunitas internasional.
5. Kedua negara sepakat bahwa upaya *counter-terrorism* setiap negara berbeda-beda tergantung pada situasi dalam negeri masing-masing.
6. Kedua negara sepakat bahwa Dialog Keamanan merupakan pilar penting dalam hubungan antara Indonesia dan AS.
7. Kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan kedua IUSSD pada tahun 2004.

Sementara itu, IUSSD II dilaksanakan di Washington, D.C. pada 22-23 April 2004. Terlaksananya pertemuan ke-2 IUSSD dan kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan ke-3 di Indonesia tahun 2005 serta pertemuan interim *Bilateral Defense Dialogue* pada kuartal ke-3 atau ke-4 tahun 2004, mengindikasikan bahwa proses *Security Dialogue* telah melembaga sebagai salah satu komponen permanen dalam hubungan bilateral Indonesia-AS.

¹⁵ Lihat, "Joint Press Statement Indonesia-United States Security Dialogue I", U.S. Embassy Press Release, 5 April 2002, dalam http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/joint_press.html.29.

Adapun pokok-pokok *Joint Press Statement* pertemuan ke-2 IUSSD, antara lain¹⁶:

1. Dibentuknya *Bilateral Defense Dialogue* antara *US Pacific Command* (USPACOM) dengan militer Indonesia (TNI) dan pejabat lain yang relevan.
2. Penghargaan AS atas reformasi TNI, komitmen dan netralitas TNI dalam pemilu Indonesia tahun 2004.
3. AS memberikan klarifikasi atas kebijakannya di wilayah Selat Malaka dan menjamin untuk menghormati kedaulatan Indonesia terhadap perairan RI.
4. Kedua delegasi sepakat menyepakati perlunya promosi dan perlindungan HAM dalam pelaksanaan upaya-upaya dalam hal *counter-terrorism*. Kedua delegasi sepakat bahwa penerapan kebijakan berbeda-beda di tiap negara.
5. Kedua delegasi sepakat untuk memperluas pertukaran dan konsultasi dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya antar kedua pemerintah atas isu keamanan.
6. Kedua delegasi menegaskan kembali komitmen “era baru hubungan bilateral” yang dicanangkan oleh Presiden Megawati dan Presiden Bush dalam pertemuan 19 September 2001 dan melanjutkan upaya peningkatan hubungan berdasarkan pada sikap saling menghormati dan kesetaraan.
7. Ditetapkannya penyelenggaraan pertemuan ke-3 IUSSD pada tahun 2005.

Sementara itu, pada tanggal 25 Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Presiden George W. Bush di Washington, D.C. dan bersepakat bahwa normalisasi hubungan militer kedua negara menjadi kepentingan bersama. Dalam pertemuan tersebut kedua presiden menyambut baik dibukanya kembali program IMET bagi Indonesia sekaligus sebagai

¹⁶ Lihat, “Joint Statement Indonesia-U.S. Security Dialogue II”, 23 April 2004, dalam <http://www.embassyofindonesia.org>

tahap penting bagi normalisasi hubungan militer Indonesia-AS, kedua presiden menyampaikan penghargaan atas kerjasama kemanusiaan antara militer AS dan Indonesia dalam menolong korban Tsunami di Aceh dan Nias. Presiden Yudhoyono juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi militer Indonesia, kontrol sipil dan akuntabilitas.

Kemudian, IUSSD III diselenggarakan di Jakarta pada 2-3 Agustus 2005. Adapun pokok-pokok *Joint Press Statement* pertemuan ke-3 IUSSD, antara lain¹⁷:

1. Kedua delegasi sepakat bahwa Dialog Keamanan memiliki peran kunci dalam membangun rasa saling percaya, meningkatkan hubungan sipil-militer, memperkuat kedamaian dan stabilitas regional, dan meningkatkan hubungan bilateral pertahanan/militer.
2. Kedua delegasi menekankan pentingnya melanjutkan kerja sama melawan terorisme dan ancaman trans-nasional lainnya. Kedua delegasi menegaskan pentingnya kerja sama dan dialog regional.
3. Delegasi AS memberi penghargaan atas kerja sama militer AS dan Indonesia melalui operasi kemanusiaan di Aceh. Delegasi AS menegaskan bahwa AS akan melanjutkan kerja sama dalam rangka meningkatkan kapabilitas militer Indonesia dalam menangani bencana.
4. Penghargaan AS atas komitmen TNI dalam menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pemilu di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah langsung. Apresiasi AS atas kerja sama pemerintah Indonesia dalam investigasi pembunuhan warga AS di Timika.
5. Delegasi AS memberi penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Aceh melalui perundingan di Helsinki, Finlandia dan menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung implementasi perjanjian damai tersebut.

¹⁷ Lihat, "Joint Statement Indonesia-United States Security Dialogue III", 3 Agustus 2005, dalam <http://www.deplu.go.id/2005/detail.php?doc>

6. Delegasi Indonesia menyampaikan rasa terima kasih pemerintah dan rakyat Indonesia atas kehadiran dan kontribusi AS di wilayah-wilayah yang terkena bencana Tsunami di Indonesia.
7. Penghargaan AS terhadap Indonesia sebagai partner utama AS dalam perang melawan terorisme dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengusut aksi teror di Indonesia.
8. Kedua delegasi sepakat bahwa aplikasi kebijakan *counter-terrorism* berbeda-beda di tiap negara.
9. Kedua delegasi menyambut baik suksesnya penyelenggaraan *United States – Indonesia Bilateral Defense Discussion (USIBDD)* pada tanggal 20-22 Juni 2005 di Honolulu, Hawaii.
10. Kedua delegasi menegaskan pentingnya IUSDD dan USIBDD dalam meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral.
11. Kedua delegasi sepakat untuk memperluas dan memperdalam kerja sama berdasarkan kemitraan dan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme kedua negara.
12. Delegasi AS menegaskan dukungan AS atas kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia dan tidak mendukung setiap upaya pemisahan dari NKRI.
13. Kedua delegasi sepakat untuk menyelenggarakan Dialog keempat di AS pada tahun 2006.

Apabila kita cermati, tampaknya *Security Dialogue* merupakan langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia dan AS dalam rangka normalisasi hubungan militer kedua negara. Indikasi akan pulihnya hubungan militer tersebut mulai terlihat setelah diselenggarakannya pertemuan pertama IUSDD. Pada bulan Oktober 2002, pihak Kongres AS kemungkinan besar akan mengeluarkan persetujuan mengenai pembukaan kembali kerja sama militer dengan TNI. Hal ini ditegaskan pula oleh Dubes Indonesia untuk Washington, D.C. Soemadi Brotodiningrat bahwa pembicaraan tentang pembukaan kembali kerja sama pendidikan militer sudah mencapai tingkat pleno. Soemadi kemudian menolak anggapan bahwa hubungan itu akan menjadi seperti hubungan militer yang

sangat erat seperti halnya hubungan militer AS dan Filipina karena perbedaan budaya, kondisi dan latar belakang sejarah antara Indonesia dan Filipina. Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjabat Menko Polkam pernah menyampaikan hal serupa bahwa pemulihan hubungan militer itu tidak akan menjadikan Indonesia sebagai alat AS, terutama sebagai kompensasi atas tekanan-tekanan AS agar Indonesia serius menangani masalah terorisme. Lebih lanjut Menko Polkam menegaskan bahwa Washington tidak akan pernah bisa mendikte Jakarta dengan membuka kembali hubungan militer itu.¹⁸

Namun, pembukaan kembali kerja sama pendidikan militer (IMET) akhirnya tertunda. Hal ini disebabkan terjadinya insiden penyerangan rombongan guru Sekolah Internasional Tembapapura pada 31 Agustus 2002 di Timika, yang menyebabkan 2 warga AS dan seorang warga Indonesia tewas. Para senator AS menilai pemerintah Indonesia lamban dalam mengungkap kasus tersebut. Pihak AS juga menuding militer Indonesia terlibat dalam insiden tersebut. Pada bulan Mei 2003, sekitar 17 senator dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengirim surat kepada Presiden Megawati. Bahkan, senator dari Partai Demokrat, Patrick Leahy mendesak pemotongan dana di bawah program IMET. Leahy mengungkapkan bahwa "TNI telah bertindak lebih kriminal daripada militer yang profesional. IMET bisa dilanjutkan lagi, namun sampai TNI bekerja sama dalam menyelidiki pembunuhan warga AS dan warga sipil lainnya dan mereka yang bertanggungjawab dihukum."¹⁹ Hal ini tentu saja mencerminkan ketidakpercayaan Senat AS terhadap pemerintah Indonesia, khususnya kepada militer Indonesia.

Menanggapi isu dibatalkannya pemberian bantuan pelatihan dan pendidikan militer (IMET) oleh AS, pada bulan Juli 2003 Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa TNI AD tidak akan tergantung pada bantuan AS,

¹⁸ "Kongres AS Finalkan Pemulihan Hubungan Militer AS-RI", dalam <http://www.satunet.com>, 18 oktober 2002.

¹⁹ "Dana Bantuan untuk TNI dari AS Terancam Tertunda", dalam <http://www.detik.com>, 8 Mei 2003.

dan tidak perlu mengemis. Ryamizard menegaskan bahwa “Indonesia adalah bangsa yang besar sehingga tidak perlu mengemis-ngemis pada negara lain termasuk Amerika Serikat.”²⁰ Jelas di sini ada semacam ketegangan emosional dari kalangan militer dan sikap ini sebenarnya lumrah ketika ada semacam kecenderungan AS untuk mendikte kemauannya kapan saja kepada Indonesia. Ketegasan sikap Indonesia tampaknya diperlukan tidak hanya ketika kita membutuhkan bantuan AS, tetapi juga ketika AS membutuhkan Indonesia.

Untuk menghindari ketegangan hubungan lebih lanjut, pihak Kedubes AS di Jakarta yang diwakili oleh Wakil Atase Pers Kedubes AS di Jakarta, Tim Girherdson, menegaskan bahwa penghentian program bantuan IMET yang diputuskan Kongres AS, tidak akan mengganggu hubungan kedua negara dan berjanji akan mengatasi kesalahpahaman ini dengan baik.²¹

Namun, setelah IUSSD ke-2 dan ke-3 diselenggarakan, pemerintah AS kembali memberikan sinyal positif dalam normalisasi hubungan militer Indonesia – AS. Hal ini dapat dilihat dalam operasi bantuan darurat militer AS untuk korban Tsunami, serta mulai dibukanya kembali program pendidikan dan pelatihan militer internasional (IMET) untuk para perwira Indonesia di AS. Apalagi, di tahun 2005 ini, pemerintah Indonesia telah dua kali melakukan pertemuan dengan pemerintah AS. Pada 16 Maret 2005, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berkunjung ke AS, disusul dengan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Presiden Bush pada 25 Mei 2005. Dalam kunjungan tersebut, Menhan Juwono Sudarsono bertemu dengan para anggota Senat dan Kongres AS, termasuk mereka yang bersikap antimiliter Indonesia, untuk menjelaskan berbagai perkembangan di Indonesia, termasuk beberapa kesulitan yang dialami Indonesia akibat embargo peralatan militer AS.

²⁰ “KSAD: TNI AD tidak tergantung Bantuan Amerika Serikat”, Kantor Berita *ANTARA*, 21 Juli 2003.

²¹ “Penghentian IMET Tidak Ganggu Hubungan AS-RI”, dalam Suara Pembaruan Daily, diakses dari <http://www.indonesia-house.org/focusa/papua>, 22 Juli 2003.

Upaya diplomasi militer yang dilakukan oleh Menhan Juwono Sudarsono merupakan langkah maju. Karena sejak dikenakan embargo militer, Indonesia kurang mengefektifkan diplomasi militer guna mengatasi kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintah AS dan Indonesia, khususnya memberi pemahaman kepada Kongres AS mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan militer dengan AS tatkala Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi tamu pertama AS pasca peristiwa 11 September. Namun, Presiden Megawati kurang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan langkah diplomatik guna mengakhiri embargo militer terhadap Indonesia.

Menurut staf profesional Komisi Luar Negeri Kongres, Frank Jannuzi (Demokrat), Indonesia kehilangan beberapa kesempatan memulihkan hubungan militer dengan AS. Meski Presiden Megawati bertemu dengan Presiden Bush dan Kongres AS pasca peristiwa 11 September, namun tidak ada tindak lanjut atas pertemuan tersebut. Bahkan, Jakarta selanjutnya mengeluarkan pernyataan yang disalahpahami Washington, yakni terlalu kritis terhadap AS dalam soal Afghanistan dan Irak. Sehingga, Jakarta kehilangan kesempatan untuk mendorong kemajuan pemecahan IMET, khususnya dalam meyakinkan Kongres AS. Karena menurut Jannuzi, Kongres terbuka untuk dipengaruhi. Setiap permasalahan bisa diselesaikan Kongres dengan dua cara, yakni kepemimpinan dan mobilisasi opini. Namun, untuk kasus hubungan militer, tak wajar melakukan mobilisasi opini di Amerika. Karenanya, isu IMET menjadi sulit dipecahkan di Kongres. Sebab, hanya beberapa anggota Kongres yang mempelajari isu ini. Banyak anggota Kongres segan berdebat karena tak punya pemahaman cukup tentang isu ini sehingga sulit mendorong Kongres bertindak. Oleh karena itu menurut Jannuzi, penyelesaiannya tergantung Jakarta.²² Sehingga, tidak mengherankan apabila alokasi dana IMET yang diberikan AS kepada negara Asia lainnya, seperti

²² Lihat, Priyantono Oemar, "Memahami Kebijakan Luar Negeri AS, Cara Amerika Memandang Indonesia", dalam *Republika*, 5 Maret 2005.

Thailand dan Filipina lebih besar ketimbang Indonesia (lihat Tabel 2).

Tabel 2.
Perbandingan Alokasi IMET di Negara-negara Asia
tahun Fiskal 2006

	Indonesia	Filipina	Thailand
Area (km ²)	1.919.000	300.400	513.115
Populasi	220 juta	76 juta	62 juta
Angkatan Bersenjata	361.000	108.000	334.500
IMET tahun fiskal 2006 (US\$)	800.000	2.500.000	3.000.000

Sumber : Jane's Information group: Jane's Sentinel Security Assessment- Southeast Asia, London, Mei 2005 (<http://www.janes.com>); U.S. Embassy Jakarta

Namun demikian, pemulihan hubungan militer Indonesia-AS tentu tidak sepenuhnya tergantung Jakarta. Pemerintah AS harus melakukan inisiatif pula, mengingat pulihnya hubungan militer Indonesia-AS tentunya akan menguntungkan kedua negara. Salah satu keuntungan dari dibukanya kembali program IMET adalah proses saling belajar, bertukar pikiran dan memahami satu sama lain. IMET memberi kesempatan kepada perwira militer Indonesia untuk mempelajari peran militer AS di dalam masyarakat demokratis. Hal positif yang bisa dipetik oleh perwira militer Indonesia adalah bahwa perwira militer AS tidak memiliki otoritas atau *power* yang lebih besar dibanding warga sipil. Sementara bagi AS, program IMET bisa dijadikan kesempatan untuk mendukung proses reformasi TNI untuk lebih menghargai HAM.

Mengingat Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi terorisme, memajukan proses demokrasi, mendorong perdamaian di Aceh, dan menyelesaikan kasus Papua, akhirnya pemerintah AS menunjukkan komitmennya untuk memulihkan hubungan militer dengan Indonesia. Pada 22 November 2005, Juru bicara Departemen Luar Negeri Sean McCormack, mengumumkan

rencana Washington menyediakan bantuan untuk program militer khusus dan unit yang bisa membantu modernisasi militer Indonesia, termasuk melanjutkan program IMET dan penjualan peralatan militer non-lethal.²³ Hal ini berarti pencabutan embargo militer atas Indonesia menandai pulihnya kembali hubungan militer Indonesia – AS yang memburuk sejak 1991.

Dukungan AS terhadap Demokratisasi Indonesia

Menurut pemerintah AS demokrasi merupakan *the best antidote of terrorism* (penangkal terbaik terorisme), karena terorisme akan muncul jika [1] negara gagal dalam memperbaiki perekonomian negara secepatnya; [2] negara gagal untuk mengkonsolidasikan proses demokrasi.²⁴ Menurut pemerintah AS, penanggulangan terorisme ini hampir sama dengan penanggulangan komunis,

²³ Pengumuman ini disampaikan menindaklanjuti pernyataan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice yang menyebutkan akan menormalisasi hubungan militer dengan Indonesia. Pekan lalu, Presiden George W. Bush juga bertemu Presiden Yudhoyono di sela-sela pertemuan APEC di Busan, Korea Selatan, yang antara lain juga membicarakan pencabutan embargo peralatan militer. Lihat, Amerika Cabut Embargo Militer atas Indonesia, dalam <http://www.tempointeraktif.com>, 23 November 2005.

²⁴ Sesungguhnya ancaman terhadap Indonesia tidak berada pada Islam di Indonesia maupun politik Islam. Namun hal ini lebih dikarenakan pada kerapuhan ekonomi, ketidakpastian hukum dan manajemen yang buruk pada desentralisasi dan tidak bertanggungjawabnya para elit yang berkuasa pada saat itu. Rizal Sukma, *Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12*, dalam Kumar Ramakhrisna, *After Bali : The Threat of Terrorism Southeast Asia*, (Singapore : World Scientific Printers Pte. Ltd, 2003), hlm. 352.

sehingga dengan mengembangkan demokrasi di mana-mana akan dapat mengkonter aksi-aksi terorisme.²⁵

Padahal sesungguhnya strategi tersebut digunakan untuk mencegah munculnya rival, baik di kawasan regional maupun internasional, yang nantinya akan mengancam dominasi AS di dunia, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Seperti yang ditulis Cheney:

... the goal is to preclude any hostile power from dominating a region critical to our interests and also thereby to strengthen the barriers against the reemergence of global threat to the interests of the US and our allies. These regions include Europe, the Middle East/ Persian Gulf, and Latin America. Consolidated, non democratic control of the resources of such as a critical regions could generate a significant threat to our security.²⁶

Dalam tulisan Cheney tidak disebutkan wilayah Asia Tenggara, namun kawasan ini tidak pernah lepas dari perhatian AS. Hal ini sudah berlangsung sejak lama sebelum tragedi 9/11. Kawasan Asia Tenggara sudah mulai mendapat perhatian AS sejak Perang Dingin, sebagai upaya untuk menghadapi dan membendung komunis Uni Soviet. Meskipun saat ini eksistensi komunis sudah tidak membahayakan keberadaan AS, namun AS tetap tidak bisa melepaskan perhatian dari Asia Tenggara terutama pasca 9/11. Pasca 9/11, pemerintah AS ingin menjadikan kawasan ini - termasuk Indonesia sebagai pemegang peran penting di Asia Tenggara - sebagai mitra strategis AS.

Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia merupakan komponen yang penting bagi AS dalam rangka membentuk suatu aliansi baru. Selain itu posisi Indonesia yang

²⁵ Islam radikal - yang selama ini dituduh oleh pemerintah AS sebagai teroris – dianggap sebagai suatu ideologi yang mengancam eksistensi demokrasi. Ideologi ini disamakan dengan ideologi komunis, sehingga jika sampai meluas akan membahayakan eksistensi AS sebagai pengung demokrasi.

²⁶ OJPCR : the Online journal of peace and conflict resolution 6.1 fall : 121-135, 2004, http://www.triinstitute.org/ojpcr/6_1snau.pdf

sangat penting di Asia Tenggara, juga menjadi poin penting lain yang menjadi pertimbangan AS perlunya memasukan Indonesia ke dalam aliansi yang akan dibentuknya dalam *war against terrorism*. Indonesia dianggap sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara, maka diharapkan situasi sosial politik Indonesia stabil. Sampai saat ini situasi Indonesia yang masih dalam kondisi tidak menentu dikarenakan Indonesia masih dalam tahap transisi pemerintahan—melaksanakan transisi dari tiga dekade di bawah kekuasaan rezim Soeharto yang notabene merupakan rezim yang represif dan otoriter menuju suatu negara yang demokratis - membawa kekhawatiran bagi pemerintah AS. Hal ini dipandang akan mempengaruhi situasi sosial politik negara-negara tetangganya di kawasan ini, sehingga mengancam kestabilan kawasan. Untuk itu, pemerintah AS mendukung secara penuh proses demokratisasi di Indonesia, karena dengan berhasilnya demokrasi di Indonesia, pemerintah AS akan lebih mudah untuk memprediksi situasi sosial politik Indonesia.²⁷

Dengan dalih tersebut pemerintah AS mulai mengkampanyekan demokrasi ke setiap negara. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara Gedung Putih, Ari Fleischer, Selasa (18 September 2001), mengungkapkan pernyataan tentang politik *carrot and stick* AS terhadap negara-negara yang ada di dunia.²⁸ Pemerintah AS menawarkan bantuan ekonomi, keuangan dan teknis kepada negara-negara yang *concern* terhadap kelangsungan demokrasi dan negara-negara yang sedang menjalani masa transisi dari sistem

²⁷ [Http://www.usindo.org](http://www.usindo.org), *Report of The National Commission on US – Indonesian Relations : Strengthening US Relations with Indonesia : Toward a Partnership for Human Resource Development*, 2003.

²⁸ Yang dimaksud dengan politik *carrot* adalah berupa dukungan dan bantuan dari pemerintah AS yang akan diberikan kepada negara-negara yang mendukung kebijakan AS terhadap terorisme dan demokratisasi. Sedangkan *stick* akan diberikan kepada negara-negara yang tidak mendukung kebijakan AS tersebut <http://www.fajar.co.id>, “Standar Ganda Amerika dalam Penegakkan HAM”, tanggal 28 Juni 2005.

pemerintah otoriter ke demokratis.²⁹ Namun semua bantuan tersebut dapat ditunda atau bahkan dibatalkan, ketika negara yang diberi bantuan dianggap pemerintah Amerika tidak serius dalam menjalankan demokratisasi. Dengan menggunakan kebijakan *carrot and stick* ini pemerintah AS mulai melancarkan demokratisasi. Sampai di sini terlihat bahwa ukuran demokratis tidaknya suatu negara, yang dipakai Amerika, menjadi satu ukuran general dan abstrak sehingga suatu negara yang tengah dalam proses demokrasi itu sebenarnya terkesan tidak memiliki hak dan wewenang untuk menyatakan bahwa negaranya telah sukses sebagai negara yang demokratis. Hal ini berlaku juga bagi Indonesia di mana ukuran apakah Indonesia telah berhasil atau tidak dalam membangun demokrasi kurang lebih banyak ditentukan oleh penilaian AS, terutama oleh Konggresnya.

Sejak tahun 2001 hingga 2004 ini pemerintah Indonesia secara terus menerus menerima bantuan dari AS, karena kerjasamanya dengan AS dalam perang terhadap terorisme. Tahun 2001, Indonesia menerima 1331,1 juta dollar AS, kemudian tahun 2002 menerima 129,9 juta dollar AS, tahun 2003 144,9 juta dollar AS dan untuk tahun 2004 direncanakan 132,1 juta dollar AS. Khusus untuk *development aid* (bantuan pembangunan) pada tahun 2001 Indonesia menerima 51,48 juta dollar, tahun 2002 sebesar 38,7 juta dollar AS, 39,02 juta dollar AS untuk tahun 2003 dan untuk tahun 2004 diperkirakan 31,69 juta dollar AS.³⁰ Pada bulan Mei 2005, pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian penambahan bantuan pembangunan ekonomi sebesar 73,7 juta dollar AS. Perjanjian ini merupakan bagian dari bantuan sebesar 750 juta dollar untuk strategi 5 tahun Indonesia dengan USAID dalam penguatan

²⁹ [Http://www.usembassyjakarta.org](http://www.usembassyjakarta.org), *Dukungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Demokrasi : Catatan AS 2004 –2005*.

³⁰ [Http://www.usindo.org](http://www.usindo.org), USAID Programs in Indonesia.

demokrasi dan desentralisasi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³¹

Demokrasi inilah yang kemudian digunakan pemerintah AS untuk menjustifikasi tindakannya yang berupa intervensi terhadap negara-negara yang ada di dunia. Dengan menggunakan alasan ini juga Pemerintah AS melakukan invasi militernya atas Irak. Namun berbeda dengan Irak, Indonesia dianggap sebagai negara yang mendukung kebijakan presiden Bush dalam *war against terrorism*, sehingga Indonesia mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan transisi demokrasi.

Pemerintah AS menawarkan bantuan ekonomi, keuangan dan teknis ke negara-negara yang memiliki perhatian besar terhadap pemberantasan terorisme terutama yang terkait dengan kelangsungan demokrasi. Jika pemerintah AS mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, situasi politik di Indonesia akan lebih mudah untuk diprediksi. Untuk itu pemerintah AS mendukung secara penuh untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia. Karena perubahan situasi politik di Indonesia tidak hanya berpengaruh di Indonesia saja, namun juga akan mempengaruhi stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara, terutama tetangga-tetangga dekatnya seperti Malaysia, Singapura dan Filipina.

Pemerintah AS memberikan bantuan untuk melaksanakan proses demokrasi di Indonesia. Juli 2004, pemerintah AS dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian bantuan sejumlah 12,65 juta dollar AS untuk proses demokrasi, terutama untuk program desentralisasi.³² Selain itu, untuk tahun berikutnya pemerintah AS memberikan bantuan lagi kepada Indonesia sebesar 120 juta dollar AS untuk tata pemerintahan yang demokratis.³³

³¹ [Http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/USG-econ-aid.html](http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/USG-econ-aid.html)
"US and Indonesia Agree to \$73,7 million in Economic Development Assistance", 7 Mei 2005.

³² [Http://www.jkt.detiknews.com](http://www.jkt.detiknews.com), "AS Sumbang lagi 12,65 juta dolar AS Untuk Desentralisasi di RI", 28 Juli 2004.

³³ [Http://www.jkt.detiknews.com](http://www.jkt.detiknews.com), "AS Beri Bantuan 120 juta dolar AS untuk Demokrasi", 11 Juli 2005.

Bantuan ini akan dialokasikan untuk 3 program utama. Ketiga program tersebut merupakan partnership antara pemerintah AS, pemerintah RI dan pemerintah daerah, serta institusi lokal. 3 program tersebut adalah reformasi hukum, desentralisasi dan misi perdamaian di daerah konflik.³⁴

Pemerintah AS juga mengucurkan dana ketika pemerintah RI akan melaksanakan pemilu legislatif 2004. Mereka mengucurkan dana sebesar 25 juta dollar AS dan 60 orang pemantau di setiap provinsi untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif 5 April 2005.³⁵ Dengan suksesnya pemilu kali ini, maka situasi politik di Indonesia pun diharapkan akan semakin stabil. Tidak hanya itu saja, pemerintah AS juga menyediakan dana sebesar 2,4 juta dollar AS untuk konsolidasi pasca Pemilu di Indonesia. Hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD dan departemen untuk mengkonsolidasi demokrasi di Indonesia.³⁶

Meski pemerintah AS sangat giat mendukung demokratisasi di Indonesia, namun dukungan tersebut seperti “bermata dua.” Pemerintah AS mendukung pemerintah Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan demokratis. Namun di sisi lain, pemerintah AS juga menguatkan militer di Indonesia, di mana dengan penguatan militer sesungguhnya merupakan penguatan terhadap kecenderungan anti demokrasi. Pemerintah AS menyatakan bahwa penguatan hubungan militer Indonesia-AS ditujukan untuk memberantas terorisme global. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penguatan militer di Indonesia nantinya akan berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi.

³⁴ [Http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/USG-aid-governance.html](http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/USG-aid-governance.html).

³⁵ [Http://www.jkt.detiknews.com](http://www.jkt.detiknews.com)

³⁶ [Http://www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), “Pemerintah AS Berikan Sumbangan US\$2,4 juta”, 22 September 2004.

a. Reformasi Hukum

Tidak hanya pihak AS saja yang agresif mendekati Indonesia, dari pemerintah Indonesia sendiri juga bersikap proaktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah AS. Pada awalnya Indonesia dituduh bersikap tidak serius dalam memberantas teroris, karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan AS. Presiden Megawati memang tidak selalu mengikuti keinginan pemerintah AS – meskipun telah mengeluarkan *statement* bersama akan mendukung sepenuhnya kebijakan *war against terrorism* AS – karena harus menyeimbangkan antara keinginan dari pemerintah AS dan situasi di dalam negeri.³⁷ Untuk mendukung kebijakan pemerintah AS ini, pemerintah RI telah menyiapkan kerangka kebijakan untuk melawan teroris yang berdasar pada enam prinsip, yang salah satunya adalah supremasi hukum.³⁸ Apalagi setelah terjadinya ledakan bom di Legian Bali tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk mengisi kekosongan hukum sebelum adanya UU yang dikeluarkan oleh DPR RI sebagai pengganti UU antisubversif yang dicabut pada masa presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini dilakukan agar pemberantasan tindak pidana terorisme mempunyai aturan yang jelas dan tidak keluar dari jalur hukum. UU ini juga mengatur tentang *money laundering* untuk mencegah penggunaan sistem keuangan ini oleh jaringan terorisme.

³⁷ Presiden Megawati berupaya untuk mencari *win-win solution*, sehingga hubungan dengan pemerintah Amerika tetap terjalin baik, namun situasi di dalam negeri pun bisa tetap terkendali. Hal ini juga terkait dengan mengamankan posisinya sebagai presiden Indonesia, karena Megawati dianggap tidak populer di kalangan umat Islam.

³⁸ Keenam prinsip tersebut adalah supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, demokrasi, koordinasi, dan partisipasi. Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negara Kita dari Terorisme*, (Jakarta : Kementerian Koordinator Polkam, Oktober 2002), hlm. 8 – 10.

Dengan dikeluarkan Perpu No. 1, merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan terhadap terorisme. Hal ini mengangkat posisi Indonesia di mata pemerintah AS yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan kebijakan *war against terrorism*. Tidak hanya itu saja yang mengakibatkan naiknya *bargaining position* Indonesia di mata AS. Penangkapan serta disidangkannya Abubakar Ba'asyir – yang selama ini dituduh oleh pemerintah AS memiliki jaringan yang kuat dengan jaringan teroris internasional – meskipun pada akhirnya tuntutananya terhadap Abubakar Ba'asyir bukanlah karena kasus terorisme, namun kasus keimigrasian. Bahkan Duta Besar AS untuk RI, Ralph Boyce bersikap kontraproduktif dan bertujuan mempolitisir proses hukum Abubakar Ba'asyir. Selama ini pemerintah AS terlalu banyak ikut campur dalam masalah Ba'asyir. Ralph Boyce juga meminta Kapolri Da'I Bachtiar dan Ketua pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu agar Ba'asyir dapat terus ditahan.³⁹ Meskipun pemerintah RI tidak serta merta mengikuti keinginan AS, namun pemerintah RI sudah mendapat nilai plus dari pemerintah Amerika dengan membawa Abubakar Ba'asyir ke ruang pengadilan. Selain itu yang sangat mengangkat nama Indonesia di mata internasional, khususnya AS adalah kecepatan pihak kepolisian Indonesia dalam mengusut para pelaku bom 12 Oktober 2002 di Legian Bali. Tidak sampai satu bulan, pihak kepolisian Indonesia telah berhasil menangkap para pelaku bom tersebut.⁴⁰ Dan saat ini telah disidangkan dan telah ada keputusan pengadilan terhadap para pelaku tersebut.

Selain itu pemerintah RI juga mengeluarkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pemberantasan dan penanganan aksi terorisme, khususnya untuk penanganan kasus bom Bali. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, selain UU No.

³⁹ [Htp://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/04/16/brk.2004041618.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/04/16/brk.2004041618.id.html).

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua investigasi dalam kasus bom Bali yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Bali, Made Mangku Pastika, 26 Juli 2005.

15 tahun 2003 sebagai UU anti terorisme- pemerintah RI juga mengeluarkan beberapa produk hukum lain. UU No. 16 tahun 2003 yang khusus untuk mengatur penanganan kasus bom Bali. Presiden Megawati juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 ditujukan kepada menkopolkam dan Inpres No. 5 ditujukan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani kasus bom Bali. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengatur tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme.

Pemerintahan Megawati dianggap cukup berhasil dalam mengeluarkan UU anti terorisme. Walaupun demikian, produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia masih banyak memiliki kekurangan seperti dalam pendefinisian terorisme. Dalam pendefinisian terorisme, lebih banyak melibatkan unsur politik daripada hukum. Tidak hanya itu saja, UU anti terorisme ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena UU ini semakin memperluas peran negara yang seharusnya semakin terbatas. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia sedikit banyak mampu memperlihatkan keseriusannya untuk bersama-sama dengan AS melawan terorisme.

Melihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus terorisme, maka pemerintah AS mulai mengucurkan dananya untuk penegakkan hukum di Indonesia sebagai tanggapan dari keseriusan tersebut.⁴¹ Saat ini pemerintah AS akan menambah dana bantuan sebesar 750 ribu dollar AS untuk mengadili berbagai kejahatan transnasional, termasuk di dalamnya kejahatan terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Bantuan tersebut akan difokuskan untuk gugus tugas yang baru dibentuk di bawah

⁴¹ [Http://www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), "Joint Statement Between The United States of America and The Republic of Indonesia".

Kejaksaan Agung untuk memfokuskan diri pada pengadilan kejahatan transnasional.⁴²

Apa yang telah dilakukan AS terhadap Indonesia tidak pernah terlepas dari kepentingan ekonominya. AS memiliki kepentingan investasi yang cukup substansial di Indonesia. Pemberian bantuan dalam penegakkan supremasi hukum tidak hanya terkait dengan aturan-aturan tentang pemberantasan aksi terorisme, namun juga terkait dengan pemberdayaan aparatur hukum. Masalah kepastian hukum juga merupakan agenda yang penting bagi pemerintah AS, karena hal ini berkaitan penciptaan iklim investasi yang baik bagi investor AS di Indonesia. Meski hal ini juga akan membawa dampak yang menguntungkan bagi Indonesia. Investasi AS di Indonesia kurang lebih 25 milyar dollar AS dan kurang lebih terdapat 300 perusahaan AS yang ada di Indonesia termasuk sektor minyak dan gas.⁴³

Masalah inilah yang pada akhirnya membuat para investor AS tidak mau datang ke Indonesia. Banyak kasus pengadilan yang tidak jujur, sehingga seolah-oleh pemerintah RI ingin mengambil keuntungan dari perusahaan AS. Masalah lainnya adalah kasus pemerjaan investor-investor asing, bahkan sebelum dilakukan penyelidikan, seperti dalam kasus Newmont.⁴⁴ Tidak hanya itu, masalah kepastian hukum ini juga sangat terkait dengan isu desentralisasi. AS khawatir jika tidak ada kepastian hukum, nantinya

⁴² Dalam perjanjian tersebut, Duta Besar AS Lynn Pascoe, menyatakan bahwa AS akan terus bekerjasama dengan Indonesia dan negara-negara lain untuk mengembangkan cara-cara yang lebih efektif untuk memerangi kejahatan transnasional, terutama terorisme. http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran_pers/transnasional.htm, "Pemerintah AS Memberikan US\$750.000 untuk Membantu Indonesia dalam Memerangi Kejahatan Transnasional", 12 September 2005.

⁴³ [Http://www.usindo.org](http://www.usindo.org), *Report of The National Commission on US – Indonesian Relations : Strengthening US Relations with Indonesia : Toward a Partnership for Human Resource Development*.

⁴⁴ [Http:// www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id), *Dubes AS Lynn Pascoe : Tak Ada Krisis dalam Hubungan Indonesia-Amerika Serikat*.

bisa terjadi tidak adanya penghargaan atas kontrak yang telah dibuat oleh suatu perusahaan dengan pemerintah pusat.

b. Bantuan Pendidikan

Serangan militer AS ke Afghanistan memunculkan suatu antipati baru dan memicu aksi-aksi demonstrasi di mana-mana yang mengancam aksi pemerintah AS atas serangan itu. Tidak hanya itu saja, bahkan muncul isu *sweeping* terhadap warga AS di beberapa daerah di Indonesia serta upaya pemboikotan terhadap produk-produk AS.⁴⁵ Untuk meredam aksi-aksi tersebut Presiden Megawati segera mengeluarkan 6 butir pernyataan yang berisikan sikap Indonesia atas serangan itu. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah

1. Pemerintah sangat prihatin dengan serangan militer yang telah terjadi
2. Indonesia menggarisbawahi pernyataan AS bahwa operasi hanya dilakukan terhadap kamp pelatihan teroris dan instalasi militer dan bukan merupakan aksi oposisi terhadap Islam
3. Menghimbau AS untuk meminimalkan korban sipil
4. Indonesia meminta PBB untuk mengambil langkah kolektif untuk memulihkan perdamaian
5. Indonesia mengingatkan warganya untuk tidak beraksi atau mengekspresikan simpati dengan cara yang melanggar hukum
6. Indonesia akan menyediakan bantuan kemanusiaan yang maksimal untuk mengurangi penderitaan rakyat Afghanistan, khususnya dalam wujud bantuan medis dan makanan. Poin ini didukung penuh oleh militer sebagaimana tercermin dalam komentar Panglima TNI Endriartono Sutarto ketika beliau

⁴⁵ Rizal Sukma, "Indonesia and the September 11 Attacks : Domestic Reactions and Implications" dalam *The Indonesian Quarterly*, vol. XXX, (Jakarta : CSIS : 2002), h. 265.

berpendapat bahwa perang Afghanistan bukanlah perang melawan Islam, tetapi perang melawan terorisme.⁴⁶

Dari pernyataan tersebut pemerintah RI dapat sedikit meredam kemarahan umat Islam Indonesia. Keberadaan Islam di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah Amerika. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah AS akan selalu mendapat tanggapan dari rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apalagi itu menyangkut isu-isu sensitif yang berkaitan dengan solidaritas keagamaan.

Namun, kemarahan umat semakin besar dengan dilancarkannya invasi militer AS ke Irak. Umat Islam di Indonesia melihat bahwa pemerintah AS saat ini sedang melancarkan perang terhadap negara-negara Muslim. Ada kecurigaan bahwa Indonesia juga akan dijadikan sasaran berikutnya oleh pemerintah AS setelah Afghanistan dan Irak. Kecurigaan tersebut juga dilontarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa serangan AS ke Afghanistan merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap umat Muslim dan merupakan tindakan terorisme, ketidakadilan dan bentuk imperialisme AS terhadap komunitas Muslim di dunia.⁴⁷ Melihat kecenderungan tersebut, pemerintah AS melihat pentingnya mengubah kebijakan dari “hard power” menjadi “soft power”, khususnya terhadap Indonesia guna mengembalikan simpati rakyat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan bantuan, pemerintah Amerika ingin menjangkau simpati dari umat Islam di Indonesia.

Setelah pertemuan antara Presiden Megawati dan Bush di Bali, Presiden Bush mengumumkan bantuan pendidikan senilai 157 juta dollar AS selama jangka waktu 6 tahun untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.⁴⁸ Dari pertemuan ini Presiden Bush

⁴⁶ Landry Haryo Subianto, M.A., *Indonesia – Australia : Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, (Jakarta : Granit, 2005), hlm. 40.

⁴⁷ Rizal Sukma, *Op.cit.* hlm.266

⁴⁸ [Http://www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), “Hubungan Bilateral Indonesia-AS”, 2003.

berharap untuk mendapat dukungan atas kebijakannya dari para tokoh Muslim yang ikut dalam pertemuan tersebut. Pemerintah AS mendekati pemimpin-pemimpin Muslim terutama dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, karena dua organisasi Islam ini adalah terbesar di Indonesia dan memiliki massa yang kurang lebih sekitar 30 juta orang.⁴⁹ Selain itu, kedua organisasi ini dianggap moderat dalam penafsiran Islam, sehingga akan lebih mudah untuk didekati pemerintah AS. Pada saat itu, kedua organisasi ini menekankan bahwa toleransi dan kemoderatan dalam penafsiran Islam akan terus menjadi kendala di negara ini. Untuk itu kedua organisasi ini setuju untuk memberikan perhatian lebih terhadap penafsiran-penafsiran Islam secara radikal. Melihat hal ini, AS semakin mengintensifkan bantuan-bantuannya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren dan madrasah memang menjadi sorotan AS. Hal ini dikarenakan adanya tuduhan dari berbagai pihak bahwa pesantren memiliki hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional, lebih-lebih setelah terjadinya ledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa ini seperti sebuah pembenaran dan semakin memperkuat anggapan bahwa pesantren memang terkait erat dengan teroris internasional. Dari ledakan bom tersebut orang yang mengakui melakukan tindakan itu merupakan alumni dari pesantren-pesantren yang ada di Ngruki-Solo (Al-Mukmin) dan di Solokuro-Lamongan (Al-Islam). Akibatnya pesantren-pesantren tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah Indonesia.

Pesantren dan institusi-institusi pendidikan Islam yang lain akan membawa dampak fanatisme yang berlebihan terhadap suatu

⁴⁹ Hal ini sangat diperlukan untuk mengkonter kekuatan-kekuatan Islam yang dianggap ekstrim oleh pemerintah AS. Dan diharapkan dari kedua organisasi ini dapat dikembangkan semangat demokrasi. *Http://www.usindo.org*, "Report of The National Commission on US – Indonesian Relations : Strengthening US Relations with Indonesia : Toward a Partnership for Human Resource Development."

agama merupakan asumsi baru yang terbentuk, khususnya pasca bom Bali. Untuk itu pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mereformasi ataupun merubah kurikulum pendidikan yang diterapkan di pesantren dan institusi-institusi pendidikan Islam.⁵⁰ Keputusan tersebut mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah AS. Hal ini dapat sekaligus digunakan oleh pemerintah AS sebagai media untuk upaya propaganda ke sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Dengan menggunakan alasan ingin turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah AS sangat gencar memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren dan institusi-institusi pendidikan Islam.

Pemerintah AS mengundang para kiai (pimpinan pesantren) dari beberapa pesantren untuk mengadakan kunjungan ke AS. Pada tahun 2002 pemerintah AS mengundang 25 kiai untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah negeri, swasta dan sekolah-sekolah agama untuk melihat bagaimana kurikulum pendidikan di sana sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Para kiai tersebut juga ditunjukkan tentang kepemimpinan yang demokratis di pemerintahan AS.⁵¹ Hal ini dimaksudkan agar para kiai tersebut mengadopsi sistem tersebut ke pesantrennya.

Kunjungan-kunjungan ini ternyata telah dilaksanakan selama 3 tahun ini. Tahun 2003 Departemen Luar Negeri AS telah mengirim 40 kiai ke AS untuk mengikuti program tentang pluralisme agama. Dalam kunjungan tersebut para kiai juga diajarkan kurikulum sekuler dalam pendidikan.⁵² Tahun 2004 pemerintah AS juga melakukan hal yang sama. Setiap tahun jumlah para kiai yang dikirim ke AS semakin banyak⁵³

⁵⁰ [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), “Berbagai Bentuk Bantuan itu”, 10 September 2004.

⁵¹ [Http://www.usembassy.org](http://www.usembassy.org), “Supporting Righth and Democracy : U.S. Records 2002-2003”, 24 Juni 2003.

⁵² [Http://www.usembassy.org](http://www.usembassy.org), “Supporting Righth and Democracy : U.S. Records 2003-2004”, 17 Mei 2004

⁵³ [Http://www.usembassy.org](http://www.usembassy.org), “Supporting Righth and Democracy : U.S. Records 2004-2005”, 28 Maret 2005

Pemerintahan AS juga menyediakan bantuan ke berbagai universitas Islam di Indonesia. Pemerintah AS membuka *American Corners* di universitas-universitas di Indonesia, diantaranya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Universitas Gajah Mada. Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai AS, baik itu bersangkutan dengan segala kebijakannya maupun informasi-informasi lainnya.⁵⁴

Tidak hanya itu, pemerintah AS juga intens melakukan kunjungan ke universitas-universitas Islam seperti Universitas Islam Negeri Jakarta, IAIN Ar-Ranirry Aceh melalui perwakilannya di Indonesia, Duta Besar Ralph L Boyce. Duta besar tersebut mengemban misi mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat merubah sistem pendidikan yang ada di pesantren dan madrasah sehingga tidak lagi sarat dengan muatan-muatan Islam. Pemerintah AS menginginkan terjadinya pergeseran penafsiran-penafsiran terhadap Islam, sehingga terjadi sekularisasi di institusi-institusi pendidikan Islam.⁵⁵ Sebenarnya program-program AS tersebut merupakan "*brain washing*" terhadap tenaga-tenaga pengajar di institusi-institusi pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program utama pemerintah AS yaitu mengupgrade

⁵⁴ [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), "Berbagai Bentuk Bantuan itu", 10 September 2004.

⁵⁵ Pemerintah AS juga memberikan bantuan untuk mendirikan pusat untuk membangun jaringan secara regional dan internasional di antara intelektual Muslim yang memiliki pemikiran moderat untuk mempromosikan wacana baru dalam penafsiran Islam termasuk didalamnya masalah pluralisme, jender dan hak-hak wanita. Masalah kesetaraan jender ini dipromosikan lebih intensif di pesantren-pesantren, sehingga wanita dapat menjadi pemimpin pesantren. Hal ini jelas akan menggeser ajaran Islam yang selama ini dipahami di pesantren, bahwa wanita tidak dapat menjadi pemimpin (Imam). Lihat <http://www.usembassy.org>, "Supporting Rights and Democracy : U.S. Records 2004-2005"

guru-guru dan kurikulum dari sekolah-sekolah Islam. AS berpendapat bahwa dengan membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat mengajarkan tentang pluralisme dan toleransi dalam beragama. Hal tersebut akan membantu mengcounter pertumbuhan penafsiran Islam secara ekstrim.

Hanya saja bantuan-bantuan yang diberikan AS ini bukan semata-mata hanya karena Indonesia mempunyai perhatian besar serta mendukung kebijakan perang terhadap terorisme AS, tetapi juga karena ada beberapa kepentingan AS di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey Winters dalam tulisannya “*Bringing Security Home*” (*Northwestern Journal of International Affairs* Vol.I, 1999) mengkritik kebijakan Amerika yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi dan keamanan, karena telah mengabaikan unsur humanisme (demokrasi, kebebasan, martabat manusia dan keadilan). Amerika selalu menempatkan yang lainnya lebih rendah daripada kepentingannya.⁵⁶

c. Bantuan Kemanusiaan

Sebagai negara yang mengagung-agungkan demokrasi dan penghormatan terhadap kemanusiaan, AS tidak dapat mengabaikan korban-korban bencana, seperti yang terjadi di Aceh pasca Tsunami. Meskipun Presiden Bush dianggap terlambat dalam memberikan respon terhadap bencana Tsunami yang melanda Indonesia - Aceh dan Sumatera Utara – Thailand, Srilanka dan negara-negara lainnya, namun bantuan AS terhadap pemulihan pasca Tsunami cukup signifikan.

Khusus di Indonesia, bantuan AS untuk korban Tsunami tergolong cukup besar. Pemerintah AS telah membantu setidaknya sebesar 33.5 juta dollar AS bagi bantuan kemanusiaan langsung.

⁵⁶ Tim Peneliti Hubungan Internasional Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal DPR-RI, 2001), hlm. 298-299.

Selain itu, 11 kapal AS telah ditempatkan di kawasan sekitar bencana, termasuk kapal induk AS USS Abraham Lincoln.⁵⁷

Dengan bantuan dari pemerintah AS, pelayanan kemanusiaan pasca Tsunami dapat segera dilaksanakan. Pemerintah AS mengucurkan dana sebesar 2,3 juta dollar AS untuk membantu Palang Merah Indonesia (PMI). Hal ini sangat membantu PMI dalam menyediakan pelayanan untuk korban bencana termasuk memberikan tempat penampungan, suplai air bersih, makanan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah AS juga memberikan tambahan dana sebesar 3,5 juta dollar AS untuk mendistribusikan makanan, suplai air bersih dan peralatan kesehatan.

Untuk rekonstruksi Aceh, Pemerintah Indonesia dan pemerintah AS melakukan penandatanganan perjanjian bantuan sebesar 400 juta dollar AS untuk penanggulangan Tsunami dan rekonstruksi Aceh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sejak Desember 2004, pemerintah AS telah menyediakan dana sebesar 68.1 juta dollar AS dalam bentuk makanan darurat, tempat berteduh, air dan sanitasi, kesehatan, dan dukungan lain.⁵⁸

Upaya ini dilakukan Pemerintah AS untuk pembangunan Aceh diantaranya penanganan masalah kemiskinan, pendidikan, demokrasi dan kesehatan. Memang bantuan ini bersifat kemanusiaan, namun hal ini juga dapat membawa dampak positif bagi AS. Artinya, dengan bantuan-bantuan tersebut sedikit banyak bisa memberi dampak pada perbaikan citra AS di mata internasional, khususnya di mata orang Indonesia. Dari peristiwa ini akan mengurangi pandangan miring dari orang Indonesia bahwa Amerika tidak menghargai kemanusiaan akibat dua perang ke Afghanistan dan Irak yang dilancarkan AS pasca 9/11. Dan tuduhan bahwa sebenarnya serangan 9/11

⁵⁷ [Http://www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), "Hubungan Bilateral RI-Amerika Serikat", Selasa, 23 Agustus 2005.

⁵⁸ [Http://www.usaid.gov](http://www.usaid.gov), "AS dan Indonesia Menandatangani Bantuan 400 juta dolar AS bagi penanggulangan Bencana, Pemulihan dan Rekonstruksi Aceh di Aceh", 7 Juli 2005.

merupakan suatu konspirasi yang direncanakan oleh pemerintah AS sendiri diharap tidak muncul lagi.⁵⁹

Peran USINDO pasca 9/11

Bentuk USINDO (*United States – Indonesia Society*) merupakan suatu komisi yang bergerak khusus menangani hubungan bilateral antara Indonesia dan AS. Keanggotaan USINDO ini berasal dari berbagai elemen, diantaranya kelompok kepentingan, militer, kelompok bisnis dan akademisi. Komisi ini berusaha membuat suatu konsensus yang mencerminkan kepentingan AS di Indonesia, dan memberikan saran kepada Kongres AS bahwa dengan mengedepankan hubungan dengan Indonesia, maka keduanya akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi peranan USINDO di sini adalah membangun *mutual understanding* antara kedua negara ini. Namun USINDO ini merupakan komisi independen dan tidak mempunyai afiliasi dengan pemerintah AS.⁶⁰

Dengan adanya berbagai masalah antara Indonesia dan AS, yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan keduanya dirasa perlu untuk meningkatkan saling pengertian antar keduanya. Setelah peristiwa 9/11 dan Bom Bali pada Oktober 2002 yang pada tahun berikutnya disusul dengan beberapa peristiwa pemboman hotel di Jakarta mengakibatkan situasi di Indonesia semakin tidak menentu. Untuk itu perlu rasanya melakukan penguatan hubungan dari kedua negara tersebut lewat peran USINDO sebagai mediator bagi kedua negara.

Komisi ini melihat signifikansi untuk mempererat keduanya. Komisi ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah AS dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan

⁵⁹ Bronson Percival, *Indonesia and the United States : Shared Interest in Maritime Security*, (United States – Indonesia Society, Juni 2005), hlm. 35.

⁶⁰ [Http://www.usindo.org](http://www.usindo.org), "Report of The National Commission on US – Indonesian Relations : Strengthening US Relations with Indonesia : Toward a Partnership for Human Resource Development", 2003.

Indonesia. USINDO berharap agar pemerintah AS dapat memberi bantuan kepada Indonesia untuk memperbaiki kondisi di Indonesia, terutama dalam mensukseskan proses demokrasi di Indonesia. Dengan terciptanya demokrasi, USINDO berharap kondisi sosial Indonesia akan menjadi stabil, sehingga tidak rentan terhadap serangan-serangan terorisme. Dengan stabilnya situasi di Indonesia akan membawa keuntungan juga bagi Amerika, terutama kelangsungan ekonomi investasi AS di Indonesia yang cukup besar.

USINDO beranggapan bahwa tahun-tahun belakangan ini merupakan masa yang sangat kritis bagi Indonesia, karena ketika Indonesia berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi selalu saja terinterupsi oleh aksi-aksi terorisme yang terjadi setiap tahun. Dalam kaitan itu, USINDO menegaskan kepada pemerintah AS agar lebih memberi perhatian berupa bantuan-bantuan yang bisa mendukung kekuatan Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Bantuan ini diprioritaskan untuk penguatan sistem pendidikan, demokratisasi, pertumbuhan ekonomi dan penguatan militer⁶¹, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Penutup

Pasca 9/11, Pemerintah Indonesia masih sangat berhati-hati dalam memberikan dukungan terhadap perang melawan terorisme yang dicanangkan Presiden Bush. Namun terjadinya Bom Bali 2002, Pemerintah Indonesia mulai menganggap terorisme sebagai ancaman nyata. Dan mulai saat itu pemerintah Indonesia dan AS mempunyai kepentingan yang sama yaitu memerangi terorisme.

Indonesia dan AS sama-sama menyadari pentingnya mempererat hubungan keduanya. Berbagai kerjasama dan bantuan antara Indonesia dan AS terus ditingkatkan. Pemerintah AS sangat mengharapkan partisipasi aktif dari pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme. Untuk itu AS memberikan bantuan melalui program bernama bantuan anti terorisme (*Anti Terrorism Assistance/ATA*). Dengan program ATA ini, AS di bawah Presiden

⁶¹ *Ibid.*

George W. Bush tidak sekedar ingin menunjukkan perhatian mendalam bahwa baik Indonesia maupun AS sama-sama menjadi sasaran dari kekuatan terorisme. Tetapi lebih dari itu, Bush sebenarnya ingin menciptakan satu tingkat ketergantungan Indonesia yang lebih tinggi ke AS daripada tingkat ketergantungan sebelum kejadian 9/11 maupun bom Bali 2002. Hal yang demikian tentu disadari oleh Indonesia meskipun secara riil Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh kuat AS.

Untuk menciptakan *mutual understanding* antara kedua negara dilakukan peningkatan hubungan di segala bidang. Dialog keamanan (*security dialogue*) bertujuan untuk memulihkan hubungan militer Indonesia – AS. Dialog ini diharap mampu mewujudkan normalisasi hubungan militer kedua negara pasca embargo militer atas Indonesia. Pemerintah AS juga gencar memberikan bantuan ekonomi, pendidikan dan reformasi hukum dan sebagainya yang semuanya diarahkan pada upaya pencegahan terorisme. Di luar semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua negara pasca 9/11 itu, Indonesia sebaiknya menyikapi ancaman terorisme secara proporsional. Artinya, keinginan untuk menciptakan *mutual understanding* yang lebih rasional bagi kepentingan Indonesia harus lebih diutamakan, dan bukan menggadaikan kepentingan kita berada di bawah kepentingan hegemonis AS. Sebab kedudukan kita dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebenarnya lebih kuat daripada kedudukan dan kepentingan AS di Asia Tenggara. Satu contoh, betapa AS di bawah Bush terlihat begitu khawatir atas sistem pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam Indonesia. Betapa AS bersedia mengeluarkan bantuan besar-besaran kepada Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Dari kacamata AS, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ini mungkin dilihatnya sebagai satu potensi yang mengancam kedigdayaannya. Jika begitu, betapa AS sebenarnya adalah bangsa yang “kecil” dan “buta” dalam memahami dan mengenal Indonesia. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan kekurangan AS ini dengan lebih berani mengatakan “No” daripada “Yes” kepada AS.

Bab 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tim Peneliti

Tragedi 9/11 memang telah menjadi titik balik (*turning point*) bagi arah politik luar negeri AS terutama terhadap dunia Islam. Sikap Amerika yang menyatakan perang melawan terorisme terkesan lebih diwarnai oleh kepentingan bisnis ekonomi lingkaran Bush. Pada masa pemerintahan Bush I politik luar negerinya lebih terkesan kaku dan sepihak, tanpa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan luar negeri para sekutu dan kebijakan PBB. Pada masa pemerintahan Bush II menjadi satu tantangan sekaligus ujian bagi Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice untuk mengembalikan pola politik luar negeri AS berdasar pada pola yang tidak unilateral.

Hubungan AS dengan Indonesia adalah menjadi bagian peta kekuatan AS di Asia Tenggara yang sangat penting. Peristiwa 9/11 (2001) disertai dengan peledakan bom Bali (2002) yang mengguncang dunia “mempertemukan” dua kepentingan Amerika dan Indonesia untuk menghadapi dan mencegah terorisme. Berbagai bantuan dan kerjasama antar mereka mengalami peningkatan. Namun bagi Indonesia semua bentuk kerjasama itu tidak semata bahwa Indonesia mengikuti dan masuk dalam lingkaran peta politik luar negeri AS yang lebih bersifat unilateral, *pre-emptive strike* serta menyatakan perang melawan terorisme global. Pemunculan stigmatisasi “Islam identik dengan terorisme” buatan AS jelas menyudutkan Indonesia. Tuduhan dan penangkapan Abubakar Ba’asyir yang diyakini AS sebagai pimpinan JI di Indonesia memperkuat siasat AS dalam membuktikan adanya *non-state terrorism*. Penangkapan Ba’asyir yang belum jelas proses pengadilannya merupakan rangkaian yang tak terlepas dari bentuk

skenario AS di dalam menekan kaum Muslim. Sehingga jika ditanya apakah misi AS di dalam memerangi terorisme global itu dilakukan dalam konteks *state security vis a vis terrorism* ataukah *human security vis a vis terrorism*, jawabnya adalah konteks yang pertama disebut itulah yang lebih mengedepan.

Ada beberapa kepentingan Indonesia yang penting diperjuangkan yaitu pengusutan serta upaya meminimalisasi ancaman teroris di dalam negeri sendiri. Semua itu ditujukan untuk memberi dan menjaga kelangsungan perbaikan dan peningkatan ekonomi dalam negeri. Jika aktivitas sentra-sentra ekonomi terganggu karena ulah teroris akan runyamlah stabilitas nasional kita. Untuk itu menjaga kepercayaan dan meredam gejolak masyarakat yang bisa mempengaruhi stabilitas keamanan sangatlah penting. Respon masyarakat yang muncul, terutama dari kelompok Radikal, dalam menyikapi tindak AS itu tidak bisa dinafikan. Sikap AS yang menggiring definisi teroris pada sesuatu yang “identik” dengan Islam semakin dilihat sebagai bagian dari konspirasi AS. Masyarakat melihatnya itu dengan tingkat antusiasme yang rendah.

Pemerintah menyadari bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler. Untuk meredam setiap gejolak masyarakat terhadap sikap AS yang kontroversial diperlukan kehati-hatian pemerintah di dalam mengakomodir gejolak itu. Untuk itu diperlukan satu sikap ataupun respon yang tegas dari pemerintah di dalam menyikapi semuanya dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasionalnya.

Guna meningkatkan level saling memahami antara kedua negara diperlukan upaya peningkatan hubungan dalam segala bidang. Yang telah berjalan adalah upaya di bidang keamanan lewat Dialog keamanan Amerika Serikat-Indonesia; bantuan ekonomi; bantuan pendidikan; kerjasama militer dan sebagainya. Untuk itu, baik Indonesia maupun Amerika sangat menyambut positif atas upaya mereka itu. Bagi Indonesia upaya peningkatan hubungan itu tentunya harus disesuaikan dengan skala prioritas kepentingan nasional, yang kini dituntut didalamnya untuk lebih memperjuangkan keamanan manusia. Selama pemerintah Indonesia mampu berdiri di luar

kepentingan global AS yang unilateral itu, dan tanpa perlu “menggadaikan” kepentingan warga sipilnya demi segelintir kepentingan kelompok elit tertentu, selama itu pula mekanisme yang dibangun AS dan Indonesia dalam rangka peningkatan hubungan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dan ke arah itulah sebaiknya Indonesia bergerak dan membina hubungan dengan AS.

Rekomendasi

- AS merupakan sebuah negara besar, bahkan satu-satunya “superpower” dunia di bidang ekonomi, politik, maupun militer. Oleh sebab itu, keberadaannya tidak mungkin diabaikan.
- Hubungan RI-AS memiliki sejarah yang cukup panjang. Peranan AS dalam pemulihan ekonomi RI pasca-Soekarno sangat besar, dan sejak itu hubungan kedua negara berjalan relatif baik. Ketergantungan RI pada “bantuan” (baca: utang) ekonomi AS pun tidak bisa dielakkan. Oleh sebab itu, dalam situasi ekonomi RI yang masih dilanda krisis, mempertahankan hubungan dengan AS menjadi suatu yang tak terelakkan.
- RI merupakan sebuah negara yang berdaulat, dan kedaulatan negara jelas tidak bisa diperjual-belikan, sekalipun kepada negara “superpower”. Karenanya, sekalipun di satu sisi mempertahankan hubungan baik dengan AS merupakan suatu keharusan, namun di sisi lain, RI hendaknya tidak terjebak untuk menjadi “bawahan” bagi AS.
- Sebagai negara berdaulat, RI hendaknya menjalankan kebijakan luar negerinya atas dasar kesetaraan, dan di atas prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi RI (UUD 1945).
- Sebuah kebijakan luar negeri juga harus sepenuhnya “diabdikan” bagi kepentingan nasional. Bagi RI, kepentingan nasional itu adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia sendiri, bukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara lain manapun.
- Sebagai negara berdaulat, RI juga harus mampu mengembangkan sikap kritis terhadap negara mana pun,

termasuk kepada AS. Perlu dicatat, sikap kritis tidak harus diartikan sebagai sikap permusuhan. AS adalah negara yang memproklamkan dirinya sebagai penganut sistem demokrasi, dan dalam sistem demokrasi (juga dalam sistem Islam maupun Pancasila) terkandung prinsip menghargai perbedaan pendapat.

- Dalam hal doktrin “anti-terorisme” AS di bawah GW Bush, RI pun dituntut untuk bersikap kritis, agar tidak terjebak dalam permainan dan ambisi-ambisi politik segelintir elite yang kini mengendalikan politik AS, yang pada ujungnya justru dapat merugikan kepentingan nasional RI sendiri. Apalagi jika doktrin “anti-terorisme” itu dalam realitasnya hanya ditujukan pada satu kelompok agama tertentu (dalam hal ini Islam), yang justru diskriminatif serta berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia itu sendiri.

Sebagai negara yang beradab dan menjunjung tinggi asas perikemanusiaan, RI jelas menolak segala bentuk terorisme, baik itu yang dilakukan oleh para aktor non-negara maupun (dan apalagi) terorisme yang dilakukan oleh negara (“state terrorism”). Oleh sebab itu, RI harus secara tegas menyatakan perang terhadap terorisme; tanpa pandang bulu, apakah itu dilakukan oleh para aktor negara maupun non-negara. Namun, perang terhadap terorisme harus tetap dilakukan dalam koridor demokrasi, hak-hak asasi manusia, serta hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. *Terrorism and Security in Asia: Redefining Regional Order?*, Asia Research Centre, Murdoch University, Working Paper No. 113, Oktober 2004.
- Adian, Donny Gahral. "Mencegah Lahirnya Terorisme Negara: Indonesia Pasca Bom Bali", *Analisis CSIS*, tahun XXXII, No. 1, 2003.
- Awwas, Irfan S. "Sidney Jones dan Terorisme," *Republika* (11 Juni 2004).
- Barber, Benjamin R. *Jihad vs McWorld: How Globalism are Reshaping The World*, New York, Ballentin Books, 1995.
- Berrigan, Frida. "Balancing Security and Democracy : Lessons from Indonesia", 25 Oktober 2004.
- Bhakti, Ikrar Nusa. "Implikasi Kebijakan Keamanan AS Terhadap Indonesia 1990-an", pada hasil-hasil penelitian PPW-LIPI berjudul *Kebijakan Keamanan AS Tahun 1990-an; Implikasi Terhadap Politik Keamanan di Asia Pasifik*. Jakarta: PPW-LIPI, 1998.
- Bush, George W. *Address to a Joint Session of Congress and the American People*, 20 September 2001.
- Buzan, Barry. *People States and Fear: National Security Problem in International Relations*, Hemel Hempstead, HarvesterWheatseaf, 1983.
- Byers, Michael. "Teror and the Future of International Law", dalam Ken Booth dan Tim Dunne, *World in Collision: Terror and Future of Global Order*, New York, Palgrave Macmillan, 2002.

Chomsky, Noam. *Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?* Bandung: Mizan, 2001.

_____. "Who are the Global Terrorists?", dalam Ken Booth dan Tim Dunne, *World in Collision: Terror and Future of Global Order*, (New York, Palgrave Macmillan, 2002).

Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara: Tantangan Baru Bagi Kerjasama ASEAN* pada Lokakarya Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001

East Asian Strategic Review 2002, The National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2002.

Falk, Richard. "Pursuing The Quest for Human Security" dalam Majid Tehranian (ed.), *Worlds Apart: Human Security and Global Governance*, New York, IB Tauris/St. Martin Press, 1999.

Fitriani, Evi. *Invasi AS ke Irak: Isu Demokrasi dan Masa Depan Sistem Internasional*, makalah diskusi di Universitas Paramadina Jakarta, 8 April 2003.

Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*, London, Penguin, 1993.

Helmanita, Karlina, Irfan Abubakar, Dina Afrianty (ed.). *Dialogue in The World Disorder: A Response to Threat of Unilateral and World Terrorism*, Jakarta, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah-Konrad-A Denauer Stiftung, 2004.

Hunter, Shireen T. "Terrorism: A Balance Sheet," dalam *The Washington Quarterly*, Summer, 1989.

Joint Statement Indonesia-United States Security Dialogue II, Washington DC, AS, 22-23 April 2004.

- Keohane, Robert. "The Public Delegation of Terrorism and Coalitional Politics" dalam Ken Booth dan Tim Dunne, *World in Collision: Terror and Future of Global Order*, New York, Palgrave Macmillan, 2002.
- Kessler, Glenn. "Rice Gives Diplomacy New Focus Secretary of State Reshapes State Department in White House Image", *Washington Post*, 20 Maret 2005
- Krieger, David. "Nuclearism and Its Insecurities", dalam Majid Tehranian (ed.), *Worlds Apart: Human Security and Global Governance*, New York, IB Tauris/St. Martin Press, 1999.
- "KSAD: TNI AD tidak tergantung Bantuan Amerika Serikat", Kantor Berita *ANTARA*, 21 Juli 2003.
- Luhulima, C.P.F. "Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara", *Analisis*, Tahun XXXII, No. 1/2003, 2003.
- McSweeney, Bill. *Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Mockaitis, Thomas R. Paul B. Rich (ed.), *Grand Strategy in The War Against Terrorism*, London, Frank Cass, 2003.
- Muna, M. Riefqi. *Securitization in Globalized World: Emergence of Non-Traditional Security Discourse*, Makalah Seminar disampaikan pada Seminar Intern P2P LIPI, 27 Januari 2003
- Nye, Jr., Joseph S. "A North American Perspective", dalam Joseph S. Nye, Jr., Yukio Satoh, Paul Wilkinson, *Addressing The New International Terrorism: Prevention, Intervention, and Multilateral Cooperation, Trilateral Commission*, Washington DC, 2003.

- Oemar, Priyantono. "Memahami Kebijakan Luar Negeri AS, Cara Amerika Memandang Indonesia", dalam *Republika*, 5 Maret 2005
- Oots, Kent Layne. *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism*, 1986.
- Percival, Bronson. *Indonesia and the United States : Shared Interest in Maritime Security*, United States – Indonesia Society, 2005.
- Pereira, Derwin. "Indonesian Terrorist Bombings : Fact and Fiction", *The Straits Times*, 15 Agustus 2003, dalam Kumar Ramakhrisne, *After Bali : The Threat of Terrorism Southeast Asia*, Singapore : World Scientific Printers Pte Ltd, 2003.
- Perwita, Anak Agung Banyu. *Atribut Politik Luar Negeri Indonesia*, dalam Seminar Politik Luar Negeri: Pola, Kinerja dan Strategi, Jakarta, 31 Juli 1997.
- Pillar, Paul R. *Terrorism and U.S. Foreign Policy*, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2001.
- Ramakrishna, Kumar. "US Strategy in Southeast Asia: Counter-Terrorist or Counter-Terrorism?", dalam Kumar Ramakhrisne, *After Bali : The Threat of Terrorism Southeast Asia*, Singapore : World Scientific Printers Pte Ltd, 2003.
- Reed, Laura dan Majid Tehranian. "Evolving Security Regime" dalam Majid Tehranian (ed.), *Worlds Apart: Human Security and Global Governance*, New York, IB Tauris/St. Martin Press. 1999
- Ross, Jeffrey Ian dan Ted Robert Gurr. "Why Terrorism Subsides," dalam *Comparative Politics*, 1989.

- Sebastian, Leonard C. "The Indonesian Dilemma: How to Participate in the War on Terror Without Becoming a National Security State dalam Kumar Ramakhrisne, *After Bali : The Threat of Terrorism Southeast Asia*, Singapore : World Scientific Printers Pte Ltd, 2003.
- Subianto, Landry Haryo, M.A. *Indonesia – Australia : Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, Jakarta : Granit, 2005.
- Sudarsono, Juwono. "Indonesia dan Terorisme Internasional," *Kompas* (17 Oktober 2002).
- Sukma, Rizal. "Indonesia and the September 11 Attacks: Domestic Reactions and Implications", *The Indonesia Quarterly*, Vol. Xxx, No. 3 Third Quarter, 2002.
- Sukma, Rizal. "Indonesia and the Challenge of Radical Islam After October 12", dalam Kumar Ramakhrisna, *After Bali : The Threat of Terrorism Southeast Asia*, Singapore : World Scientific Printers Pte Ltd, 2003.
- Sukarjaputra, Rakaryan. "Skenario Irak untuk Iran Mulai Jalan?," *Kompas* (2 Oktober 2005).
- Tadashi, Yamamoto, *et.al. America's Role in Asia: American Views*, "a Report of the Asia Foundation Commissioned Task Force", California: The Asia Foundation, 2001.
- Tells, Ashley J. *Assessing America's War on Terror: Confronting Insurgency, Cementing Primacy*, NBR Analysis, 2004.
- The White House. *National Strategy for Combating Terrorism*, February 2003.
- ul-Haq, Mahbub. "Global Governance for Human Security" dlm Majid Tehranian (ed.), *Worlds Apart: Human Security and Global Governance*, New York, IB Tauris/St. Martin Press, 1999.

Tim Peneliti Hubungan Internasional Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*, Jakarta : Sekretaris Jenderal DPR-RI, 2001.

United States Code Congressional and Administrative News, 98th Congress, Second Session, Oct. 19, Vol. 2; par 3077, 98 STAT. 270, 1984.

Vermonte, Philips Jusario. "Problematika Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina dan Indonesia", *Analisis CSIS*, Vol. XXXII, No. 1, 2003.

White, Jonathan R. *Terrorism: An Introduction*(4th ed.), Toronto, Thomson Wadsworth, 2003.

Widjajanto, Andi. "Menangkal Terorisme Global", dalam Dr. F. Budi Hardiman, dkk., *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi, Imparsial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*, Jakarta, 2003.

Wise, William. *Indonesia's War on Terror*, United States-Indonesia Society, 2005.

Yudhoyono, Susilo Bambang. *Selamatkan Negara Kita dari Terorisme*, Jakarta: Kementrian Koordinator Polkam, 2002.

Media Massa

International Herald Tribune (24 September 2002)

Kompas (4 Oktober 2005).

Kompas (6 September 2002).

Kompas, 18 Agustus 2005.

Kompas, 20 Oktober 2005.

- Kompas dan Republika* (25 September 2002).
Tempo (edisi 28 Oktober 2002)
Time (edisi 23 September 2002).
Men's Obsession, edisi khusus bulan Agustus 2005.
Pikiran Rakyat, 17 September 2001
The Jakarta Post, 22 September 2001

Media Elektronik

- Antara Online* (10 November 2002).
Arabia (Agustus 1985).
BBC (20 September 2002).

<http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/14/prn,20040414-05.id.html>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang”, diakses pada tanggal 21 Oktober 2005, pk. 11.30 Wib.

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/print/20050202-11.html>, “State of the Union Address”, 2 Februari 2005,

<http://www.deplu.go.id/2005/detail.php?doc=7289d5d93e964d0d14b84244133c9aa4#>, “Joint Statement: Indonesia-United States Security Dialogue III.”

<http://www.deplu.go.id/joinstatement.htm>, “Joint Statement Between The United States of America and The Republic of Indonesia”, pada 22 Oktober 2003.

<http://www.deplu.go.id/hub.bilateralind-AS.htm>, “ Hubungan Bilateral Indoensia-Amerika Serikat”

<http://www.rnw.nl/in/berita/gemawarta.html>, “Di Tengah Persaingan Teroris, Bermanfaatkah Melarang Jamaah Islamiyah” 9 Oktober 2005.

http://www.worldpress.org/article_model.cfm?article_id=2010&don't=yes, Cochrane, Paul, “Will U.S. Foreign Policy Increase Terrorism?” 1 April 2005.

<http://ciponline.org/nationalsecurity/articles/021105borg.htm>, Borg, Parker, 11 Februari 2005. “Condoleeza Rice and American Foreign Policy in the Second Bush Administration”, *Center for International Policy's National Security Project*, Fifth Column, 17 Maret 2005.

<http://www.apcss.org>, Anthony L. Smith, “Reluctant Partner: Indonesia's Response to U.S. Security Policies”, *Asia-Pacific Center for Security Studies*, Maret 2003.

<http://www.jkt.detiknews.com>, “AS Beri Bantuan 120 juta dollar AS untuk Demokrasi”, 11 Juli 2005.

<http://www.jkt.detiknews.com>, “AS Sumbang lagi 12,65 juta dollar AS Untuk Desentralisasi di RI”, 28 Juli 2004.

<http://www.detik.com>, “Dana Bantuan untuk TNI dari AS Terancam Tertunda”, 8 Mei 2003.

<http://www.deplu.go.id>, “Hubungan Bilateral Indonesia-AS”, 2003.

<http://www.deplu.go.id>, “Hubungan Bilateral RI-Amerika Serikat”, Selasa, 23 Agustus 2005.

<http://www.fajar.co.id>, “Standar Ganda Amerika dalam Penegakkan HAM”, tanggal 28 Juni 2005.

<http://www.fpi.org>, John Gershman, “Fighting Terrorism, Undermining Democracy in Indonesia”, dalam *Foreign Policy in Focus*, September 2001.

- <http://www.indonesia-house.org/focusa/papua>, “Penghentian IMET Tidak Ganggu Hubungan AS-RI”, dalam *Suara Pembaruan Daily*, 22 Juli 2003.
- <http://www.kompas.co.id>, “Dubes AS Lynn Pascoe : Tak Ada Krisis dalam Hubungan Indonesia-Amerika Serikat”.
- <http://www.republika.co.id>, “Berbagai Bentuk Bantuan itu”, 10 september 2004.
- <http://www.satunet.com>, , “Kongres AS Finalkan Pemulihan Hubungan Militer AS-RI”, 18 Oktober 2002.
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/04/16/brk,2004041618,id.html>
- <http://www.tempointeraktif.com>, “Pemerintah AS Berikan Sumbangan US\$2,4 juta”, 22 September 2004.
- <http://www.usindo.org>, “Report of The National Commission on US – Indonesian Relations : Strengthening US Relations with Indonesia : Toward a Partnership for Human Resource Development”, 2003.
- <http://www.usaid.gov>, “AS dan Indonesia Menandatangani Bantuan 400 juta dollar AS bagi penanggulangan Bencana, Pemulihan dan Rekonstruksi Aceh di Aceh”, 7 Juli 2005
- <http://www.usembassy.org>, “Supporting Right and Democracy : U.S. Records 2002-2003”, 24 Juni 2003.
- <http://www.usembassy.org>, “Supporting Right and Democracy : U.S. Records 2003-2004”, 17 Mei 2004.
- <http://www.usembassy.org>, “Supporting Right and Democracy : U.S. Records 2004-2005”, 28 Maret 2005.

http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran_pers/transnasional.htm
"Pemerintah AS Memberikan US\$750.000 untuk Memban-
t Indonesia dalam Memerangi Kejahatan Transnasional", 12
September 2005

http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/USG-aid-governance.html.

<http://www.usembassyjakarta.org>, "Issue Brief for Congress :
Terrorism, the Future and US Foreign Policy", 11 April 2003.

http://www.indonesian_embassy.or.jp/menui/information/state/bali.bak.

http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/joint_press.html. 29. Joint
Press Statement Indonesia-United States Security Dialogue I",
U.S. Embassy Press Release, 5 April 2002.

<http://www.embassyofindonesia.org>, "Joint Statement Indonesia-U.S.
Security Dialogue II", 23 April 2004.

